

LAPORAN PP 39

TRIWULAN IV TA. 2025

BALAI STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA INDUSTRI
SAMARINDA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP39) Triwulan IV tahun 2025 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban Balai dalam menjalankan tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan disektor industri. Di samping itu juga dimaksudkan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang ingin turut serta dalam menunjang pembangunan dan pengembangan industri terutama di daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP39) Triwulan IV tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 39 tahun 2006. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Triwulan IV tahun 2025 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pimpinan Kementerian Perindustrian khususnya Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dalam menilai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh BSPJI Samarinda dan sekaligus dapat menjadi umpan balik untuk perbaikan dalam upaya optimalisasi pencapaian program kerja dan kinerja pada tahun yang akan datang.

Diharapkan Laporan Triwulan IV BSPJI Samarinda Tahun 2025 ini dapat bermanfaat, dan dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 8 Januari 2026

Plt. Kepala BSPJI Samarinda,



Achmad Taufik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN	19
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	37
BAB IV PENUTUP	108

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 1 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, yang berlaku sejak tanggal 21 Februari 2022. Peraturan Menteri tersebut diterbitkan menyusul adanya Permenperin nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang memuat perubahan tugas Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) menjadi menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BSPJI menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen produk, teknologi dan industri hijau
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan kearsipan dan rumah tangga
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

1. 2. Latar Belakang Kegiatan/ Program

Visi

Visi BSPJI Samarinda 2025-2029 dirumuskan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, visi dan misi Kementerian Perindustrian dan visi BSKJI. Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 memuat “Visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Kata “Berdaulat” dalam Visi Indonesia Emas 2045 tersebut mengandung makna “Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman”; secara khusus, kata “Mandiri” di sini sangat relevan dengan perindustrian:

Mandiri: Indonesia yang mandiri tidak tergantung kepada negara lain karena memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, seperti pangan, energi, dan produk-produk industri termasuk produk industri pertahanan dan keamanan. Indonesia juga mampu mengambil keputusan yang independen tanpa tergantung pada negara lain.

Adapun kata “Maju” dalam Visi Indonesia Emas 2045 mengandung makna “Berdaya, Modern, Inovatif, Tangguh, Adil”; secara khusus, kata “Inovatif” dan “Modern” sangat relevan dengan perindustrian:

Inovatif: Indonesia memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan kemampuan ini, Indonesia memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

Modern: Indonesia memiliki infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman, dan terjangkau. Infrastruktur ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan rakyat Indonesia terhubung dengan dunia.

Selain itu, kata “Berkelanjutan” dalam Visi Emas Indonesia 2045 memberi arah akan pentingnya keseimbangan dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi.

Berkelanjutan: Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan

pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Adapun Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045 dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045

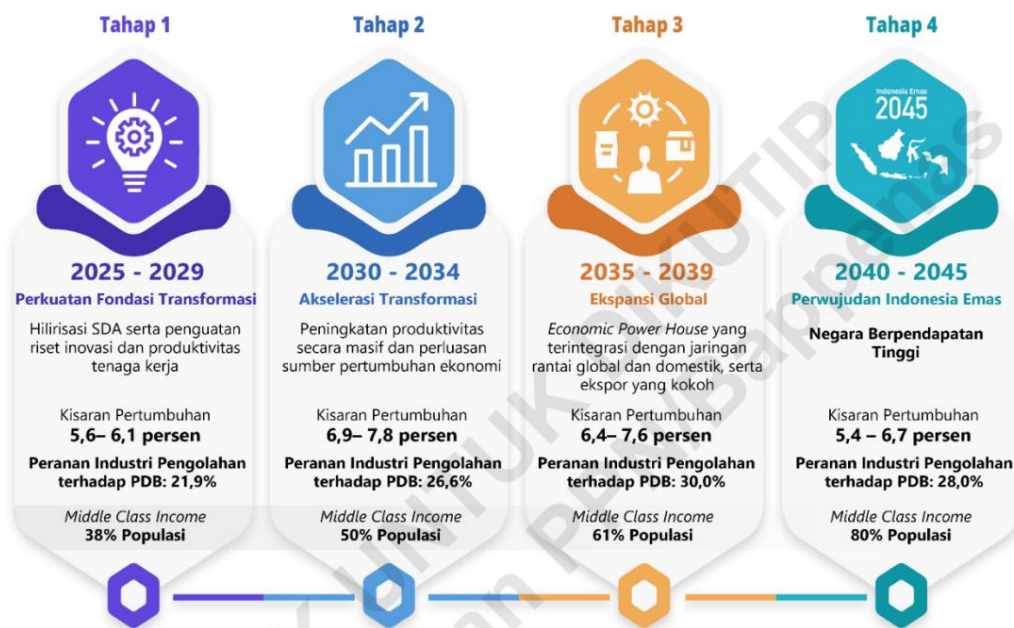
Selaras dengan visi di atas, setidaknya dua dari lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 terkait erat dengan perindustrian dan sangat mungkin bersinggungan dengan BSKJI, yaitu sasaran pertama terkait peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur dan sasaran kelima terkait intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Sasaran pertama, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US\$23.000-30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima besar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak (decent job) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.

Sasaran kelima dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, Indonesia bermitmen untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi GRK

menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan intensitas emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2010 dan menuju net zero emission pada tahun 2060.

Maka dari itu, industrialisasi (hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor) menjadi bagian dari transformasi ekonomi sekaligus salah satu dari Tiga Belas (13) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk Transformasi Indonesia. Dampak penyerta industrialisasi berupa lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.



Gambar 2. Tahapan Transformasi Ekonomi

Untuk itu, Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 memuat Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Ekosistem Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri dengan target Peranan Industri Pengolahan terhadap PDB mencapai 21,9%. Selain strategi industrialisasi untuk industri prioritas, secara eksplisit disebutkan juga pengarusutamaan penerapan Industri Hijau. Pada Tahap 1 ini, Strategi Pengembangan Industri Nasional berfokus pada empat hal, yaitu: penguatan ekosistem industrialisasi (pembiayaan, riset, inovasi, standardisasi, skema insentif); peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; penguatan daya saing industri menuju ekspansi global (SDM, energi, rantai pasok); serta mencapai *net export* positif.

Sejalan dengan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, industrialisasi menjadi bagian penting upaya transformasi ekonomi yang dimuat dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029. Setidaknya terdapat dua pokok upaya transformatif superprioritas bidang ekonomi yang berkaitan dengan industrialisasi, yaitu (1) industrialisasi; hilirisasi industri berbasis SDA unggulan,

industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor; (2) percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.

Baik Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 maupun Rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 sudah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun RIPIN 2015-2035 sedang dalam proses reviu untuk dilakukan revisi/perubahan menyesuaikan dengan periode pembangunan jangka panjang.

Visi Kementerian Perindustrian: “Terwujudnya Industri Nasional Yang Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Adapun sebagai salah satu organ struktural Kementerian Perindustrian, visi BSKJI dalam Renstra BSKJI 2025-2029: “Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang maju, berdaulat dan berkelanjutan.”

Selaras dengan visi BSKJI, maka visi BSPJI Samarinda ditetapkan sebagai berikut : “Menjadi Balai yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang maju, berdaulat dan berkelanjutan.”

Misi

Selaras dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BKSJI terkait beberapa kata kunci (*keywords*) (i) peningkatan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standarisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau.

Misi BSKJI: Peningkatan kemandirian, daya saing, inovasi, dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standarisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri, dan industri hijau, yang bercirikan:

1. Standarisasi industri secara mandiri (mengurangi ketergantungan pada asing), produktif (efektif, efisien, dengan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri
2. Pengawasan implementasi standarisasi industri yang efektif
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan digital manufaktur untuk meningkatkan kemandirian, daya saing, dan inovasi industri
4. Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional
5. Penguatan industri hijau secara bertahap

6. Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing
7. Pelaksanaan tata kelola yang baik/good governance dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel, efektif, dan efisien.

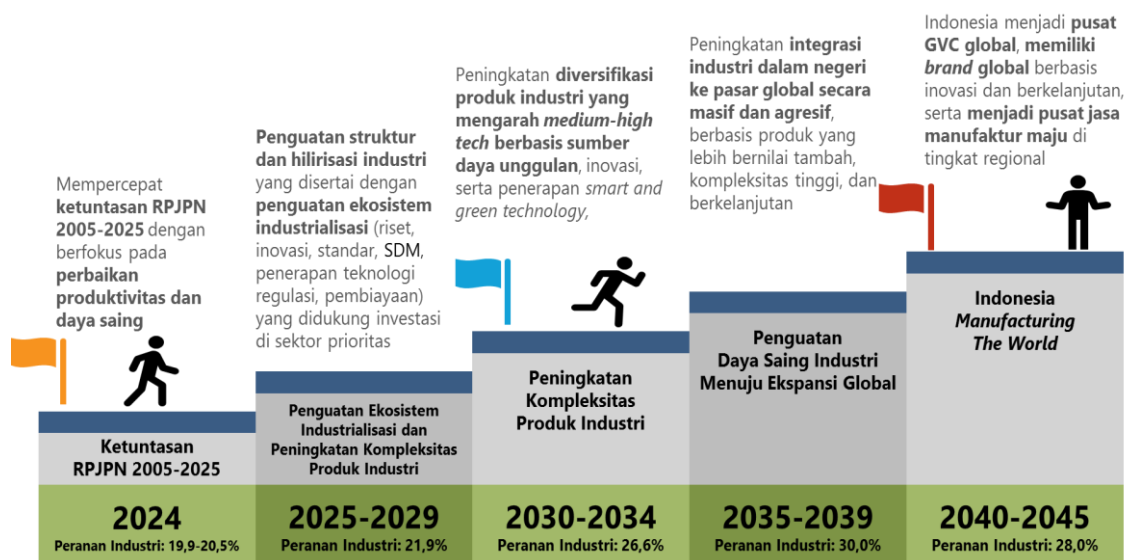
Misi BSKJI tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Ciri pertama pada Misi BSKJI merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan standardisasi industri yang mandiri (tidak tergantung asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri. Ciri kedua merepresentasikan P2SI dalam mewujudkan pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif. Ciri ketiga dan keempat merepresentasikan POPTIKJI dalam mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri, serta peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional. Ciri kelima merepresentasikan PIH dalam mewujudkan penguatan industri berkelanjutan secara bertahap. Ciri keenam merepresentasikan BBSPJI dan BSPJI dalam mewujudkan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing. Ciri ketujuh merepresentasikan BKSJI secara umum dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Sejalan dengan misi BSKJI, maka misi BSPJI Samarinda adalah Peningkatan kemandirian, daya saing, inovasi, dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri, dan industri hijau, yang bercirikan:

1. Standardisasi industri secara mandiri, produktif (efektif, efisien, dengan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri;
2. Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan digital manufaktur untuk meningkatkan kemandirian, daya saing, dan inovasi industri;
4. Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional;
5. Penguatan industri hijau secara bertahap;
6. Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing; dan
7. Pelaksanaan tata kelola yang baik/ good governance dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Tujuan

Berdasarkan identifikasi Kementerian Perindustrian dengan mengacu pada RPJPN 2025-2045, Tahap Pembangunan Sektor Industri Jangka Panjang diilustrasikan dalam gambar berikut:



Gambar 3. Arah Kebijakan Industrialisasi dalam RPJPN 2025-2029

Sumber: RPJPN 2025-2029

Arah kebijakan industrialisasi RPJMN 2025-2029 mengangkat tema "Penguatan Ekosistem Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri", terutama diarahkan pada penguatan standar dan hilirisasi industri yang disertai dengan penguatan ekosistem industrialisasi (riset, inovasi, standar, SDM, penerapan teknologi, regulasi, pembiayaan) dan didukung investasi di sektor prioritas.

Selaras dengan arah kebijakan industrialisasi di atas, tujuan Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

TJ	Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional
	Indikator kinerja: 1. Rasio industri pengolahan nonmigas terhadap PDB 2. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 3. Pertumbuhan PDB industri pengolahan

Adapun untuk mendukung tujuan di tingkat Kementerian Perindustrian, tujuan dari BSKJI adalah sebagai berikut:

TJ1	Meningkatnya dukungan standardisasi dan jasa industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri
	Indikator kinerja: 1. Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri Target 2025-2029 adalah 1; 1,5; 2; 2,5; 3 (Persen) 2. Kontribusi jasa industri terhadap PDB nasional 3. Target 2025-2029 adalah 3,12; 3,18; 3,23; 3,29; 3,35 (Persen)

TJ2	Meningkatnya implementasi dekarbonisasi sektor industri untuk ekonomi berkelanjutan
	Indikator kinerja: 1. Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi Target 2025-2029 adalah 6,7501; 6,7998; 6,8502; 6,90; 6,93 (Juta Ton CO2eq)

Sesuai tujuan BSKJI, maka ditetapkan tujuan dari BSPJI Samarinda sebagai berikut:

TJ	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri
	Indikator kinerja: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Target 2025-2029 adalah 3,66; 3,66; 3,67; 3,67; 3,68 (indeks) 2. Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi/ yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri Target 2025-2029 adalah 210; 221; 232; 243; 255 (industri/ pelaku usaha/ instansi)

Dari tujuan tersebut, BSPJI Samarinda menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 – 2029 meliputi:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
2. Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi yang memanfaatkan layanan Jasa Industri.

Sasaran Kegiatan

Pengembangan sasaran kegiatan BSPJI Samarinda dilakukan dengan memperhatikan kedua pernyataan tujuan di atas dan keselarasan dengan sasaran program BSKJI. Berikut Sasaran Program (SP) BSKJI untuk periode 2025-2029.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Program BSKJI 2025-2029

Tujuan BSKJI	Sasaran Program BSKJI	
TJ2	SP 1	Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular
TJ1	SP 2	Berkembangnya standardisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif
TJ1	SP 3	Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi
TJ1	SP 4	Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif
TJ1	SP 5	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri
TJ1	SP 6	Terwujudnya SDM yang profesional
TJ1	SP 7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik
TJ1	SP 8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
TJ1	SP 9	Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Mengacu pada Sasaran Program BSKJI 2025-2029 tersebut, ditetapkan Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda sebagai berikut:

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Program BSPJI Samarinda 2025-2029

Tujuan BSPJI Samarinda	Sasaran Kegiatan* BSPJI Samarinda	
TJ	SK 6.1	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional
TJ	SK 6.2	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri
TJ	SK 6.3	Terwujudnya SDM yang Profesional
TJ	SK 6.4	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik
TJ	SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
TJ	SK 6.6	Terwujudnya Akuntabilitas organisasi
TJ	SK 6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri

*) Kode Sasaran Kegiatan mengikuti kode pada Renstra BSKJI 2025-2029

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan tujuh sasaran kegiatan BSPJI Samarinda yang ditentukan berdasarkan sasaran program BSKJI. Berikut adalah sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan dan target dari indikator tersebut, yaitu:

1. SK 6.1 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional. SK 6.1 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKK 6.1.1 Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreemen* (SLA), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 86% dan meningkat menjadi 88% di tahun 2029.
 - 2) IKK 6.1.2 Nilai *Net Promoter Score* (NPS), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan memperoleh nilai 6 dan meningkat menjadi 10 di tahun 2029.
2. SK 6.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri, SK 6.2 memiliki indikator kinerja antara lain :
 - 1) IKK 6.2.1 Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 2 dan meningkat menjadi 3 pada tahun 2029.
 - 2) IKK 6.2.2 Jumlah hasil layanan jasa industri, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 4.545 dan meningkat menjadi 4.919 pada tahun 2029.
 - 3) IKK 6.2.3 Nilai *Revenue on Aset* (RoA), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 8,10% dan meningkat menjadi 8,50% pada tahun 2029.
 - 4) IKK 6.2.4 Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 41,50% dan meningkat menjadi 43,50% pada tahun 2029.
3. SK 6.3 Terwujudnya SDM yang profesional, SK 6.3 memiliki indikator antara lain :
 - 1) IKK 6.3.1 Indeks Profesionalitas ASN (IPASN), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan memperoleh indeks 81,30 dan meningkat menjadi 81,70 pada tahun 2029.

4. SK 6.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik, SK 6.4 memiliki indikator antara lain :
 - 1) IKK 6.4.1 Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 20% dan meningkat hingga 100% di tahun 2029
 - 2) IKK 6.4.2 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 77,00% dan meningkat menjadi 85,00% di tahun 2029.
 - 3) IKK 6.4.3 Indeks Pelayanan Publik (IPP), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan mencapai nilai 4,51 dan meningkat menjadi 4,53 pada tahun 2029.
5. SK 6.5 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien, SK 6.5 memiliki indikator kinerja antara lain :
 - 1) IKK 6.5.1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan tercapai 60% dan meningkat menjadi 70% di tahun 2029.
 - 2) IKK 6.5.2 Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan mencapai nilai 70,1 dan meningkat menjadi 82 di tahun 2029.
6. SK 6.6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi, SK 6.6 memiliki indikator kinerja antara lain :
 - 1) IKK 6.6.1 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan memperoleh nilai 79,45 dan meningkat hingga 79,50 di tahun 2029.
 - 2) IKK 6.6.2 Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan memperoleh nilai 93,40 dan meningkat menjadi 93,60 di tahun 2029.
 - 3) IKK 6.6.3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan, pada tahun 2025 indikator ini ditargetkan memperoleh nilai 75,00 dan meningkat menjadi 76,00 di tahun 2029.
7. SK 6.7 Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri, SK 6.7 memiliki indikator antara lain :
 - 1) IKK 6.7.1 Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 80,00% dan menjadi 82,00% pada tahun 2029.

Keseluruhan sasaran kegiatan dan pemetaannya terhadap tujuan BSPJI Samarinda ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda

Tujuan	SK/ IKK	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
TJ	TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri							
	ITJ 1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,71	3,66	3,66	3,67	3,67	3,68
	ITJ 2	Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri	Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	200	210	221	232	243	255
	SK 6.1	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional							
	IKK 6.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu Layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	85,00	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00
	IKK 6.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	5	6	7	8	9	10
	SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri							
	IKK 6.2.1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	8.068.215.000	2	2	4	3	3
	IKK 6.2.2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	Hasil Layanan	4.500	4.545	4.590	4.682	4.776	4.919
	IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	%	8,00	8,10	8,20	8,30	8,40	8,50
	IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	%	41,00	41,50	42,00	42,50	43,00	43,50
	SK 6.3	Terwujudnya SDM Profesional							
	IKK 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	82,96	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70
	SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik							
	IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
	IKK 6.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	-	77	78	80	83	85
	IKK 6.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,76	4,51	4,51	4,52	4,53	4,53
	SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien							
	IKK 6.5.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	%	-	60	62	65	67	70
	IKK 6.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Nilai	94,98	70,1	73	76	79	82
	SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi							
	IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	80,45	79,45	79,45	79,45	79,45	79,50
	IKK 6.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94,18	93,40	93,40	93,50	93,50	93,60
	IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00
	SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri							
	IKK 6.7.1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	%	65,24	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00

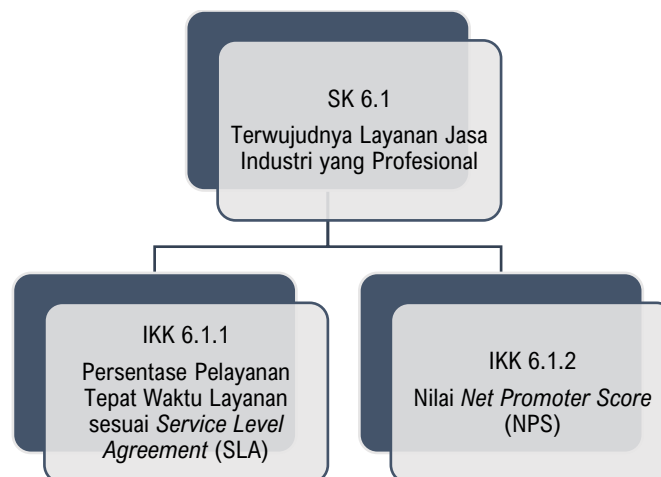
Arah Kebijakan dan Strategi

Pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Samarinda mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI yang selaras dengan arah kebijakan pengembangan industri nasional yang tertuang dalam UU No. 3/2014 tentang Perindustrian, RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2025-2029.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa beberapa Sasaran Program BSKJI melekat pada UPT, pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Samarinda yang melekat pada Sasaran Program BSKJI diterjemahkan melalui Sasaran Kegiatan dan diwujudkan melalui Indikator Kinerja Kegiatan. BSPJI Samarinda melaksanakan aktivitas maupun kegiatan sebagai bentuk strategi pencapaian yang dianggap mampu untuk mencapai target yang diharapkan, namun tidak terbatas dan dapat dilakukan perubahan apabila diperlukan penyesuaian.

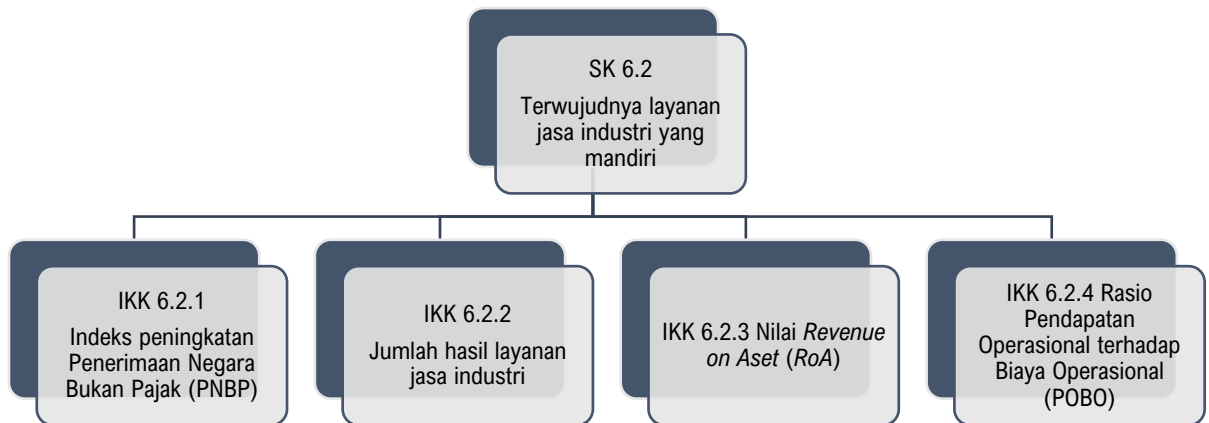
Pada Sasaran Program BSKJI keempat (SP 4) didukung oleh dua Sasaran Kegiatan yaitu SK 6.1 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional dan SK 6.2. Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri.

SK 6.1 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional diwujudkan dengan indikator kinerja: IKK 6.1.1 Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA) dan IKK 6.1.2 Nilai *Net Promoter Score* (NPS).



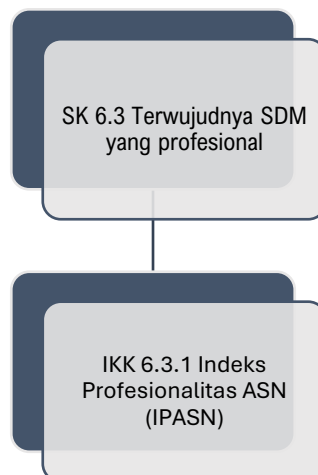
Gambar 4. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.1 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Samarinda 2025-2029

SK 6.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri, sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja antara lain : IKK 6.2.1 Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), IKK 6.2.2 Jumlah hasil layanan jasa industri, IKK 6.2.3 Nilai *Revenue on Aset* (RoA), dan IKK 6.2.4 Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO).



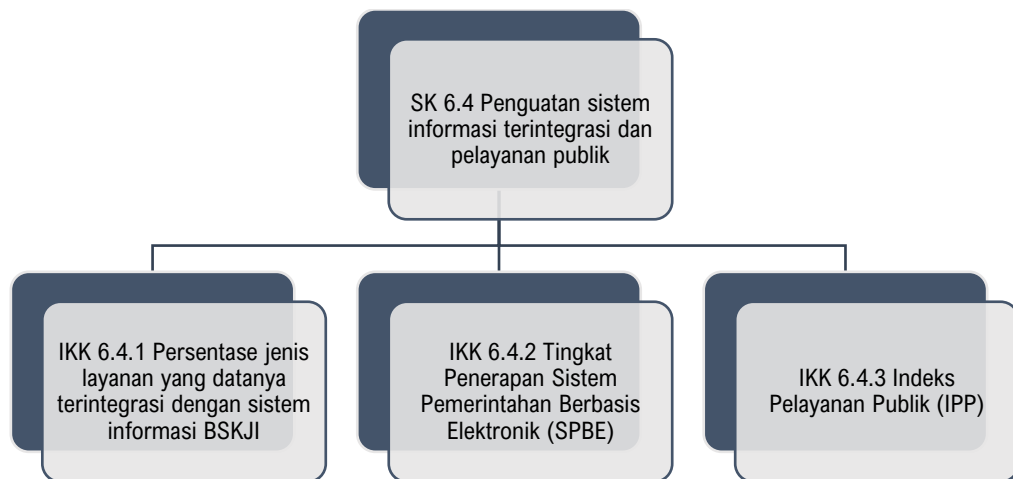
**Gambar 5. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.2 dan Indikator Kinerja Kegiatan
BSPJI Samarinda 2025-2029**

Pada Sasaran Program BSKJI keenam (SP 6) didukung SK 6.3 Terwujudnya SDM yang profesional, sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator IKK 6.3.1 Indeks Profesionalitas ASN (IPASN).



**Gambar 6. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.3 dan Indikator Kinerja Kegiatan
BSPJI Samarinda 2025-2029**

Pada Sasaran Program BSKJI ketujuh (SP 7) didukung dengan SK 6.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik, sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator antara lain : IKK 6.4.1 Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI, IKK 6.4.2 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), IKK 6.4.3 Indeks Pelayanan Publik (IPP).



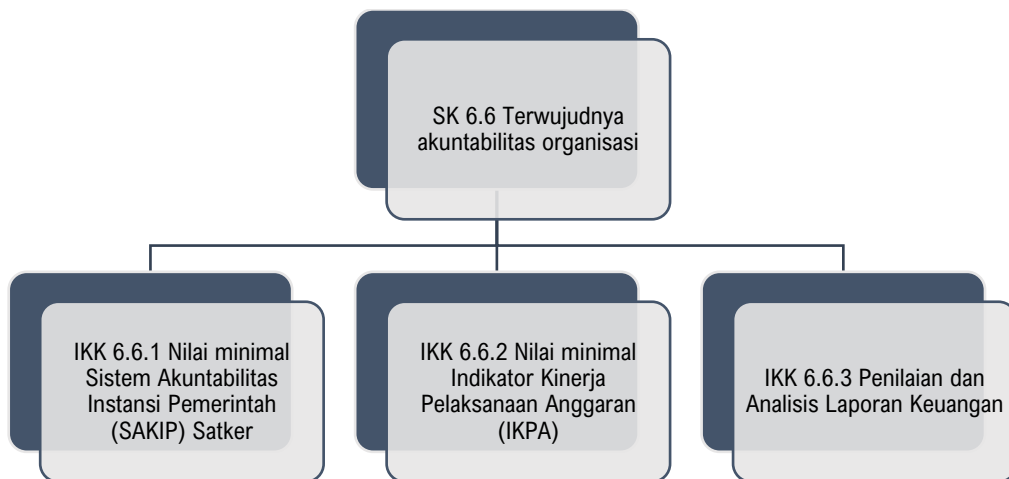
Gambar 7. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.4 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Samarinda 2025-2029

Pada Sasaran Program BSKJI kedelapan (SP 8) didukung dengan SK 6.5 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien, sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator IKK 6.5.1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker, dan IKK 6.5.2 Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan).



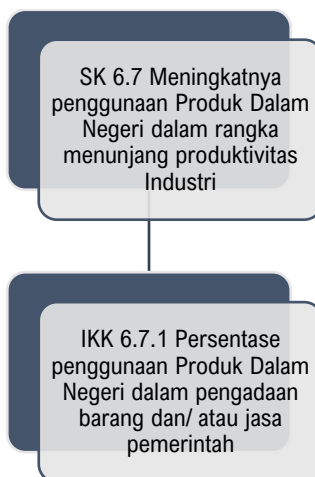
Gambar 8. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.5 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Samarinda 2025-2029

Pada Sasaran Program BSKJI kesembilan (SP 9) didukung dengan SK 6.6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi, sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja IKK 6.6.1 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker, IKK 6.6.2 Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan IKK 6.6.3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan.



**Gambar 0-1. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.6 dan Indikator Kinerja Kegiatan
BSPJI Samarinda 2025-2029**

SK 6.7 Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri, dengan indikator IKK 6.7.1 Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah.



**Gambar 0-2. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.7 dan Indikator Kinerja Kegiatan
BSPJI Samarinda 2025-2029**

Dalam rangka menjamin ketercapaian target indikator kinerja untuk mencapai sasaran kegiatan, BSPJI Samarinda melaksanakan aktivitas yang relevan serta perencanaan penganggaran yang efektif dan efisien. Aktivitas atau kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja diterjemahkan melalui kerangka sub komponen dalam struktur anggaran/ pendanaan sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 4. Indikator Kinerja dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Target Indikator

Kode	Uraian Sasaran Program, Kegiatan dan indikator kinerja	Satuan	Aktivitas/ Kegiatan
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri		
TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	<i>Temu Pelanggan</i>
TJ.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	<i>Kerjasama dan Kemitraan</i>
			<i>Focus Group Discussion</i>
			<i>Webinar</i>
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional		
IKK.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Persen	<i>Pengujian/Proses Produksi</i>
			<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium</i>
			<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium Kalibrasi</i>
			<i>Kalibrasi peralatan uji/proses produksi</i>
			<i>Sampling</i>
			<i>Pemeliharaan Kelembagaan (Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi/Witness)</i>
			<i>Pengembangan Kelembagaan (Penambahan Ruang Lingkup</i>
IKK.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	<i>Pameran</i>
			<i>Promosi dan Pemasaran Layanan</i>
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri		
IKK.2.1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	<i>Sampling</i>
			<i>Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi</i>
			<i>Pengujian/Proses Produksi</i>
			<i>Sertifikasi Produk</i>
			<i>Kalibrasi In Situ</i>
IKK.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	<i>Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vokasi</i>
			<i>Sampling</i>
			<i>Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi</i>
			<i>Pengujian/Proses Produksi</i>
			<i>Pembimbingan dan Pendampingan Teknis Industri</i>
			<i>Konsultasi dan Pembinaan Industri</i>
			<i>Kalibrasi In Situ</i>
IKK.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Persen	<i>Pengadaan Pengolah Data</i>
			<i>Pengadaan Alat Perkantoran</i>
			<i>Pengadaan Mebelair</i>
			<i>Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian</i>
			<i>Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium</i>
IKK.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	Persen	<i>Layanan Operasional Perkantoran</i>
			<i>Layanan Operasional Laboratorium</i>
			<i>Layanan Operasional Pendukung Perkantoran</i>
			<i>Langganan Daya dan Jasa</i>
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional		

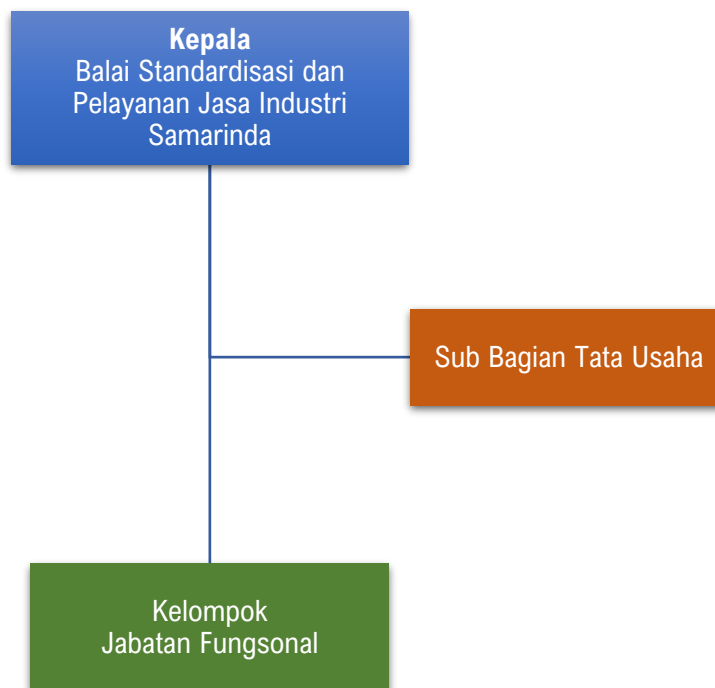
Kode	Uraian Sasaran Program, Kegiatan dan indikator kinerja	Satuan	Aktivitas/ Kegiatan
IKK.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	<i>Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vokasi</i>
			<i>Peningkatan Kompetensi SDM Balai</i>
			<i>In House Training</i>
			<i>Peningkatan Potensi SDM</i>
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik		
IKK.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	<i>Pengembangan Aplikasi</i>
IKK.4.2	Tingkat Penerapan SPBE	Persen	<i>Pengembangan Aplikasi</i>
IKK.4.3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	<i>Unit Pelayanan Publik</i>
			<i>Perawatan Gedung</i>
			<i>Perbaikan Peralatan Perkantoran</i>
			<i>Perawatan Kendaraan</i>
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien		
IKK.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	<i>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</i>
			<i>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai</i>
IKK.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Nilai	<i>Penatalaksanaan Kearsipan</i>
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi		
IKK.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	<i>Penyusunan Program/Kegiatan</i>
			<i>Layanan Operasional Pimpinan dan Manajemen</i>
IKK.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	<i>Pelaporan Keuangan Akuntansi Negara (SAP)</i>
			<i>Penatausahaan BMN</i>
IKK.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	<i>Pelaporan Keuangan Akuntansi Negara (SAP)</i>
			<i>Penatausahaan BMN</i>
			<i>Perjalanan Pimpinan dan Manajemen</i>
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri		
IKK.7.1	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	<i>Pengadaan Pengolah Data</i>
			<i>Pengadaan Alat Perkantoran</i>
			<i>Pengadaan Mebelair</i>
			<i>Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian</i>
			<i>Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium</i>

Nomenklatur Program dan Kegiatan

BSPJI Samarinda melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan menjalankan program dan kegiatan antara lain :

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
- b. Program Dukungan Manajemen
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri

1. 3. Struktur Organisasi



Gambar 12. Struktur Organisasi BSPJI Samarinda

BAB II

RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN

2. 1. Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Perencanaan dan pelaksanaan kinerja 2025 merupakan proses penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029, yang akan dilaksanakan oleh organisasi melalui berbagai kegiatan secara tahunan yang berjenjang dan berkelanjutan. Proses perencanaan kinerja telah didokumentasikan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan target kinerja Tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi organisasi untuk mencapainya dalam satu periode Tahun 2025, yang disusun setiap awal tahun anggaran.

Kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda juga harus sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam menyukseskan Tri Program Utama yang sedang dilaksanakan, yaitu pembangunan di bidang peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan pertanian dalam arti luas.

Pada tahun 2025 anggaran kegiatan BSPJI Samarinda yang tertuang dalam dokumen penganggaran DIPA terbagi dalam 2 Program antara lain :

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Kegiatan : 6077. Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri

Klasifikasi Rincian Output :

- AEC. Kerja sama
- AEF. Sosialisasi dan Diseminasi
- BAD. Pelayanan Publik kepada industri
- BDI. Fasilitasi dan Pembinaan Industri
- CAH. Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan : 6042. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri

Klasifikasi Rincian Output :

- EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal
- EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
- EBC. Layanan Manajemen SDM Internal
- EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal

2.1.1. Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen Tahun 2025

Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen Tahun 2025 sesuai DIPA tertera pada tabel berikut:

Tabel 4. Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
AEC	Kerja sama
002	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis
051	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis
A	<i>Kerjasama dan Kemitraan</i>
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi
AEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis
051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis
A	<i>Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Layanan Jasa Industri</i>
B	<i>Temu Pelanggan</i>
C	<i>Pameran</i>
D	<i>Webinar</i>
E	<i>Promosi dan Pemasaran Layanan</i>
F	<i>Unit Pelayanan Publik</i>
BAD	Pelayanan Publik kepada industri
BAD.001	Jasa pelayanan teknis pengujian
051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian
A	<i>Pengujian Produk/ Proses Produksi</i>
B	<i>Sampling</i>
056	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi/Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian
A	<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium</i>
BAD.024	Jasa pelayanan teknis kalibrasi
051	Jasa pelayanan teknis kalibrasi
A	<i>Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi Industri</i>
B	<i>Kalibrasi In Situ</i>
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi
A	<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium Kalibrasi</i>
BAD.036	Jasa pelayanan teknis sertifikasi
051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi
A	<i>Sertifikasi Produk</i>
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi
A	<i>Pemeliharaan Kelembagaan (Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi/Witness)</i>
B	<i>Pengembangan Kelembagaan (Penambahan Ruang Lingkup LS Pro, Lab uji, LSSM, LSIH)</i>
BAD.058	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri
051	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri
A	<i>Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri</i>
B	<i>Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produk melalui Pembuatan Alat Pengering dan Alat Pengiris Mekanis</i>

Kode	Program/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen
BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri
BDI.006	Pemanfaatan Teknologi Industri
051	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri
A	<i>Konsultasi dan Pembinaan Industri</i>
CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan
CAH.021	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan
051	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan
A	<i>Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian</i>
B	<i>Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium</i>
WA	Program Dukungan Manajemen
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
051	Pengelolaan Data dan Informasi
A	<i>Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem Informasi</i>
EBA.994	Layanan Perkantoran
001	Gaji dan Tunjangan
A	<i>Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium, dan Vokasi</i>
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
A	<i>Layanan Operasional Pimpinan dan Manajemen</i>
B	<i>Layanan Operasional Perkantoran</i>
C	<i>Layanan Operasional Laboratorium</i>
D	<i>Layanan Operasional Pendukung Perkantoran</i>
E	<i>Perawatan Gedung</i>
F	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>
G	<i>Perbaikan Peralatan Perkantoran</i>
H	<i>Perawatan Kendaraan</i>
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
EBB.951	Layanan Sarana Internal
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
A	<i>Pengadaan Pengolah Data</i>
053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran
A	<i>Pengadaan Alat Perkantoran</i>
B	<i>Pengadaan Mebelair</i>
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan
051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM
A	<i>Peningkatan Kompetensi SDM Balai</i>
B	<i>In House Training</i>
C	<i>Peningkatan Potensi SDM</i>
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
A	<i>Penyusunan Program/ Kegiatan</i>
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
A	<i>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai</i>
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
A	<i>Pelaporan Keuangan Akutansi Negara (SAP)</i>
B	<i>Penatausahaan BMN</i>
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP
A	<i>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</i>
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
051	Penyelenggaraan Kearsipan
A	<i>Penatalaksanaan Kearsipan</i>

2.1.2. Rincian Anggaran Tahun 2025

Rincian anggaran kegiatan standardisasi dan pelayanan jasa Industri tahun anggaran 2025 sesuai DIPA tertera pada tabel berikut:

Tabel 5. Rincian Anggaran Tahun 2025 (Revisi DIPA 21)

Kode	Program/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen	Pagu	Pagu Blokir	Pagu Efektif
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5,465,505,000	1,161,408,000	4,304,097,000
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	5,465,505,000	1,161,408,000	4,304,097,000
AEC	Kerja sama	152,319,000	28,145,000	124,174,000
002	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	152,319,000	28,145,000	124,174,000
051	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	152,319,000	28,145,000	124,174,000
A	<i>Kerjasama dan Kemitraan</i>	154,899,000	28,145,000	126,754,000
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	623,313,000	377,793,000	245,520,000
AEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis	623,313,000	377,793,000	245,520,000
051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	623,313,000	377,793,000	245,520,000
A	<i>Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Layanan Jasa Industri</i>	91,827,000	69,227,000	22,600,000
B	<i>Temu Pelanggan</i>	187,280,000	187,280,000	-
C	<i>Pameran</i>	100,786,000	100,786,000	-
D	<i>Webinar</i>	8,000,000	8,000,000	-
E	<i>Promosi dan Pemasaran Layanan</i>	174,230,000	-	174,230,000
F	<i>Unit Pelayanan Publik</i>	61,190,000	12,500,000	48,690,000
BAD	Pelayanan Publik kepada industri	2,385,225,000	89,562,000	2,385,225,000
BAD.001	Jasa pelayanan teknis pengujian	1,704,016,000	-	1,704,016,000
051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	1,670,191,000	-	1,670,191,000
A	<i>Pengujian Produk/ Proses Produksi</i>	960,691,000	-	960,691,000
B	<i>Sampling</i>	709,500,000	-	709,500,000

Kode	Program/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen	Pagu	Pagu Blokir	Pagu Efektif
056	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi/Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian	33,825,000	-	33,825,000
A	<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium</i>	33,825,000	-	33,825,000
BAD.024	Jasa pelayanan teknis kalibrasi	41,842,000	-	41,842,000
051	Jasa pelayanan teknis kalibrasi	32,382,000	-	32,382,000
A	<i>Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi Industri</i>	27,222,000	-	27,222,000
B	<i>Kalibrasi In Situ</i>	5,160,000	-	5,160,000
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi	9,490,000	-	9,490,000
A	<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium Kalibrasi</i>	9,490,000	-	9,490,000
BAD.036	Jasa pelayanan teknis sertifikasi	460,317,000	89,562,000	370,755,000
051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	87,009,000	13,044,000	73,965,000
A	<i>Sertifikasi Produk</i>	87,009,000	13,044,000	73,965,000
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi	373,308,000	76,518,000	296,790,000
A	<i>Pemeliharaan Kelembagaan (Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi/Witness)</i>	292,570,00	41,310,000	251,260,000
B	<i>Pengembangan Kelembagaan (Penambahan Ruang Lingkup LS Pro, Lab uji, LSSM, LSIH)</i>	80,738,000	35,208,000	45,530,000
BAD.058	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri	179,050,000	-	179,050,000
051	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	179,050,000	-	179,050,000
A	<i>Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri</i>	140,620,000	-	140,620,000
B	<i>Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produk melalui Pembuatan Alat Pengering dan Alat Pengiris Mekanis</i>	38,430,000	-	38,430,000
BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	297,148,000	-	297,148,000
BDI.006	Pemanfaatan Teknologi Industri	297,148,000	-	297,148,000
051	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri	297,148,000	-	297,148,000
A	<i>Konsultasi dan Pembinaan Industri</i>	297,148,000	-	297,148,000
CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	2,007,500,000	665,908,000	1,341,592,000
CAH.021	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	2,007,500,000	665,908,000	1,341,592,000
051	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	2,007,500,000	665,908,000	1,341,592,000
A	<i>Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian</i>	1,966,000,000	661,408,000	1,304,592,000
B	<i>Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium</i>	41,500,000	4,500,000	37,000,000
WA	Program Dukungan Manajemen	14,682,889,000	1,256,847,000	13,426,042,000
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	14,682,889,000	1,256,847,000	13,426,042,000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	13,268,903,000	479,121,000	12,789,782,000
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	150,000,000	-	150,000,000
051	Pengelolaan Data dan Informasi	150,000,000	-	150,000,000
A	<i>Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem Informasi</i>	150,000,000	-	150,000,000
EBA.994	Layanan Perkantoran	13,118,903,000	479,121,000	12,639,782,000

Kode	Program/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen	Pagu	Pagu Blokir	Pagu Efektif
001	Gaji dan Tunjangan	8,709,981,000	-	8,709,981,000
A	Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium, dan Vokasi	8,709,981,000	-	8,709,981,000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4,408,922,000	479,121,000	3,929,801,000
A	Layanan Operasional Pimpinan dan Manajemen	408,416,000	-	408,416,000
B	Layanan Operasional Perkantoran	1,998,099,000	479,121,000	1,518,978,000
C	Layanan Operasional Laboratorium	271,304,000	-	271,304,000
D	Layanan Operasional Pendukung Perkantoran	212,153,000	-	212,153,000
E	Perawatan Gedung	389,151,000	-	389,151,000
F	Langganan Daya dan Jasa	524,089,000	-	524,089,000
G	Perbaikan Peralatan Perkantoran	473,960,000	-	473,960,000
H	Perawatan Kendaraan	131,750,000	-	131,750,000
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	621,000,000	382,626,000	238,374,000
EBB.951	Layanan Sarana Internal	621,000,000	382,626,000	238,374,000
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	342,800,000	243,000,000	99,800,000
A	Pengadaan Pengolah Data	342,800,000	243,000,000	99,800,000
053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	278,200,000	139,626,000	138,574,000
A	Pengadaan Alat Perkantoran	229,325,000	139,626,000	89,699,000
B	Pengadaan Mebelair	48,875,000	-	48,875,000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	532,806,000	161,120,000	371,686,000
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	532,806,000	161,120,000	371,686,000
051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	532,806,000	161,120,000	371,686,000
A	Peningkatan Kompetensi SDM Balai	261,548,000	-	261,548,000
B	In House Training	110,138,000	-	110,138,000
C	Peningkatan Potensi SDM	161,120,000	161,120,000	-
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	260,180,000	233,980,000	26,200,000
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	87,370,000	87,370,000	-
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	87,370,000	87,370,000	-
A	Penyusunan Program/ Kegiatan	87,370,000	87,370,000	-
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	71,110,000	71,110,000	-
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	71,110,000	71,110,000	-
A	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai	71,110,000	71,110,000	-
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	75,500,000	75,500,000	-
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	75,500,000	75,500,000	-
A	Pelaporan Keuangan Akutansi Negara (SAP)	39,088,000	39,088,000	-
B	Penatausahaan BMN	36,412,000	36,412,000	-
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	25,100,000	-	25,100,000
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP	25,100,000	-	25,100,000
A	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	25,100,000	-	25,100,000
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1,100,000	-	1,100,000
051	Penyelenggaraan Kearsipan	1,100,000	-	1,100,000
A	Penatalaksanaan Kearsipan	1,100,000	-	1,100,000
Total		20,148,394,000	2,418,255,000	17,730,139,000

2. 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

2.2.1. Sasaran dan Indikator Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sasaran strategis dan indikator kinerja yang ingin dicapai BSPJI Samarinda dalam rencana kerja tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis BSPJI Samarinda Tahun yang mengacu pada dokumen perencanaan institusi induk, yaitu Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dan BSKJI Tahun 2025– 2029, yang terangkum dalam Matriks Alur IKU BSKJI adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri

Indikator Tujuan:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Cara Pengukuran:

Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuisioner dan indeks mengacu pada PermenPANRB 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

b. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri

Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri merujuk pada jumlah total entitas bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam sektor industri dan/atau pelanggan yang menggunakan layanan yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI.

Cara Pengukuran:

Menghitung jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ pelanggan yang memanfaatkan layanan jasa industri di Satker pada tahun ke-n.

2. Sasaran Kinerja Pertama:

Terwujudnya layanan jasa industri yang professional

Indikator Kinerja:

a. Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Industri adalah komitmen tertulis antara UPT dan pihak yang menerima layanan (misalnya, perusahaan/pelaku usaha industri/pelanggan) mengenai kualitas, cakupan, dan standar layanan yang diberikan. SLA ini biasanya mencakup beberapa elemen penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan. SLA pada UPT merujuk pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Waktu layanan pada SLA adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan.

Cara Menghitung:

Menghitung jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/SPK/transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%.

$$\% \text{ pemenuhan waktu layanan sesuai SLA} = \frac{\sum \text{Pelayanan yang tepat waktu sesuai SLA}}{\sum \text{Pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

Catatan: Untuk layanan yang bersifat kontrak, waktu SPM ditetapkan berdasarkan durasi kontrak.

b. Nilai Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score (NPS) adalah metode untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain.

Cara Menghitung:

NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan: “Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?” Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10.

NPS dihitung dengan mengurangi persentase *Detractors* dari persentase *Promoters*:

$$\text{NPS} = \% \text{ Promoters} - \% \text{ Detractors}$$

3. Sasaran Kinerja Kedua

Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri

Indikator Kinerja:

a. Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri.

Cara Menghitung:

Menghitung selisih jumlah PNBP pada tahun ke-n (B) dan jumlah PNBP pada tahun n-1 (A) dibagi A dikalikan 100%.

$$\text{Peningkatan PNBP} = \frac{(B-A)}{A} \times 100\%$$

Indeks ditentukan berdasarkan range persentase peningkatan PNBP sebagai berikut:

Indeks	Range Peningkatan PNBP
1	$\leq 5\%$
2	$5 < x \leq 20$
3	$20 < x \leq 50$
4	$50 < x \leq 100$
5	> 100

b. Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Yang dimaksud dengan jumlah hasil layanan adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam satu tahun.

Cara Menghitung:

Menghitung jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun ke-n.

c. Nilai Revenue on Asset (RoA)

Revenue on Asset (RoA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap unit aset yang dimiliki.

Cara Menghitung:

Menghitung PNBPN layanan jasa yang diperoleh pada tahun berjalan dibagi dengan total nilai aset pada akhir tahun ke-n dikalikan 100%.

d. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)

Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu UPT dalam menghasilkan pendapatan dari aktivitas operasionalnya dibandingkan dengan biaya atau beban yang harus dikeluarkan untuk menjalankan operasionalnya. Rasio ini menunjukkan efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas intinya.

Pendapatan Operasional dalam indikator kinerja ini adalah seluruh pendapatan dalam Laporan Operasional dikurangi pendapatan dari APBN.

Beban Operasional dalam indikator kinerja ini adalah seluruh beban dalam Laporan Operasional dikurangi dengan penyusutan dan amortisasi dan belanja penugasan dari K/L.

Cara Menghitung:

Menghitung Pendapatan Operasional (PNBP) tahun ke-n dibagi realisasi biaya operasional tahun ke-n dikalikan 100%.

$$POBO = \left(\frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Beban Operasional}} \times 100\% \right)$$

4. Sasaran Kinerja Ketiga

Terwujudnya SDM Profesional

Indikator Kinerja:

a. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN tingkat individu (PNS dan PPPK) maupun tingkat Kementerian/Lembaga yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Cara Menghitung:

Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 dan penyesuaiannya melalui pedoman BKN lainnya yang terkait.

5. Sasaran Kinerja Keempat

Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja:

a. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI

Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Oleh karena itu, BSKJI menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem pada UPT dimana sistem ini dapat memberikan data terbaru terkait layanan yang diberikan oleh UPT di lingkungan BSKJI. Adapun 5 jenis layanan yang perlu diintegrasikan oleh setiap UPT yaitu Pengujian (A), Sertifikasi (B), Kalibrasi (C), Pelatihan (D), dan Konsultasi (E).

Cara Menghitung:

Menghitung jumlah jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada tahun ke-n dibagi dengan total jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%.

b. Tingkat Penerapan SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan Layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Adapun pada indikator ini aspek penilaian hanya terdiri dari 3 aspek penilaian yaitu 1) Tata Kelola SPBE, 2) Manajemen SPBE, dan 3) Layanan SPBE.

Cara Menghitung:

Terdapat dalam LKE Indikator Penerapan SPBE 2025-2029

c. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Cara Menghitung:

Menghitung nilai minimal Indeks Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara mandiri.

Catatan:

- Perhitungan IPP mengikuti Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 29/2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023.
- Apabila Satker mengikuti/dipilih/ditugaskan dalam penilaian PEKPPP oleh KemenPANRB, maka nilai IPP menggunakan nilai yang diperoleh dari penilaian tersebut.

6. Sasaran Kegiatan Kelima

Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien

Indikator Kinerja :

a. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal di mana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud. Indikator ini menghitung penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal (audit) sampai mencapai status Sesuai Rekomendasi (SR).

Cara Menghitung:

Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi (SR) dengan rumus: $A = (B+C) / 2$

Keterangan:

A = Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR)

B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran (T-1) dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran (T-1)

C = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) pemeriksaan Tahun 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) dibagi dengan saldo rekomendasi Tahun Pemeriksaan 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) yg telah ditetapkan.

b. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)

Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek Pengawasan. Setiap unit kerja dilakukan penilaian kearsipan sesuai dengan kategori unitnya yaitu unit kearsipan dan unit pengolah.

Cara Menghitung:

Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai (arsiparis Kemenperin) dan diverifikasi oleh ANRI yang merujuk kepada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.

7. Sasaran Kinerja Keenam

Terwujudnya akuntabilitas organisasi Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Indikator Kinerja:

a. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker

Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.

Cara Menghitung:

Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian merujuk pada Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

b. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan perencanaan anggaran kualitas anggaran.

Cara Menghitung:

Tata cara perhitungan IKPA mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 atau peraturan yang berlaku pada tahun berjalan.

c. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan

Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk menilai ketepatan waktu, kesesuaian, kewajaran serta menganalisis akurasi serta keandalan Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi sistematis atas data keuangan, kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektifitas pengendalian intern serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan.

Cara Menghitung:

Data hasil penilaian dan analisis laporan keuangan dikeluarkan oleh Biro Keuangan.

<u>Tingkat Satuan Kerja</u>	
Komponen Penilaian	Bobot (%)
1. Kesesuaian dengan SAP	24%
2. Kecukupan Informasi	54%
3. Efektivitas Pengendalian Internal	11%
4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan	11%
Jumlah	100%

8. Sasaran Kinerja Ketujuh

Penguatan Layanan Publik

Indikator Kinerja:

a. Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Penggunaan Produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian.

Cara Menghitung:

Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus:

$$RP3DN = RAP3DN / TotAP3DN$$

2.2.2. Indikator Kinerja berdasarkan Kegiatan

Tabel 6.Indikator Kinerja Kegiatan

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/ Sub Komponen	Indikator Kinerja	Output	Satuan
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		-	
EC.6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri		-	
AEC	Kerja sama	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis yang dihasilkan	5	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan
AEC.002	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis		5	Dokumen
051	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis		-	
A	Kerjasama dan Kemitraan		-	
AEF	Sosialisasi dan DiseminasiKesepakatan, Dokumen, Kegiatan	Capaian jumlah peserta yang mengikuti Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Layanan Teknis	500	Orang
AEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis		500	Orang
051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis		-	
A	Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Layanan Jasa Industri		-	
B	Temu Pelanggan		-	
C	Pameran		-	
D	Webinar		-	
E	Promosi dan Pemasaran Layanan		-	
F	Unit Pelayanan Publik			
BAD	Pelayanan Publik kepada industri	Jumlah industri yang mendapatkan layanan jasa	386	Industri
BAD.001	Jasa pelayanan teknis pengujian		300	Industri
051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian		-	
A	Pengujian Produk/ Proses Produksi		-	
B	Sampling		-	
056	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi/ Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian		-	
A	Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium		-	
BAD.024	Jasa pelayanan teknis kalibrasi		29	Industri
051	Jasa pelayanan teknis kalibrasi		-	
A	Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi Industri		-	
B	Kalibrasi In Situ		-	
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi		-	
A	Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium Kalibrasi		-	

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/ Sub Komponen	Indikator Kinerja	Output	Satuan
BAD.036	Jasa pelayanan teknis sertifikasi		44	Industri
051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi		-	
A	Sertifikasi Produk		-	
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi		-	
A	Pemeliharaan Kelembagaan (Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi/Witness)		-	
B	Pengembangan Kelembagaan (Penambahan Ruang Lingkup LS Pro, Lab uji, LSSM, LSIH)		-	
BAD.058	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri		13	Industri
051	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri		-	
A	Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri		-	
B	Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produk melalui Pembuatan Alat Pengering dan Alat Pengiris Mekanis		-	
BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Jumlah industri yang dibina	10	Industri, IKM, Miliar, USD
BDI.006	Pemanfaatan Teknologi Industri		10	Industri
051	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri		-	
A	Konsultasi dan Pembinaan Industri		-	
CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	Jumlah sarana peralatan dan mesin untuk menunjang workshop/layanan/lab	59	Unit
CAH.021	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan		59	Unit
051	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan		-	
A	Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian		-	
B	Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium		-	
WA	Program Dukungan Manajemen		-	
WA.6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri		-	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Terselenggaranya layanan manajemen internal Satker	2	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1	Layanan
051	Pengelolaan Data dan Informasi		-	
A	Pengelolaan Data dan Informasi		-	
EBA.994	Layanan Perkantoran		1	Layanan
001	Gaji dan Tunjangan		-	
A	Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium, dan Vokasi		-	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		-	
A	Layanan Operasional Pimpinan dan Manajemen		-	

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/ Sub Komponen	Indikator Kinerja	Output	Satuan
B	Layanan Operasional Perkantoran		-	
C	Layanan Operasional Laboratorium		-	
D	Layanan Operasional Pendukung Perkantoran		-	
E	Perawatan Gedung		-	
F	Langganan Daya dan Jasa		-	
G	Perbaikan Peralatan Perkantoran		-	
H	Perawatan Kendaraan		-	
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Tersedianya layanan sarana dan prasarana internal	37	Unit, m2, Paket
EBB.951	Layanan Sarana Internal		37	Unit
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		-	
A	Pengadaan Pengolah Data		-	
053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran		-	
A	Pengadaan Alat Perkantoran		-	
B	Pengadaan Mebelair		-	
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya	52	Orang, Layanan, Rekomendasi
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		52	Orang
051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM		-	
A	Peningkatan Kompetensi SDM Balai		-	
B	In House Training		-	
C	Peningkatan Potensi SDM		-	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Terselenggaranya layanan manajemen kinerja internal	6	Dokumen, Layanan, Laporan, Laporan, Rekomendasi
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1	Dokumen
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran		-	
A	Penyusunan Program/ Kegiatan		-	
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1	Dokumen
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		-	
A	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai		-	
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		2	Dokumen
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan		-	
A	Pelaporan Keuangan Akutansi Negara (SAP)		-	
B	Penatausahaan BMN		-	
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		1	Dokumen
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP		-	
A	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		-	
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1	Dokumen
051	Penyelenggaraan Kearsipan		-	
A	Penatalaksanaan Kearsipan		-	

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada triwulan IV tahun anggaran 2025, BSPJI Samarinda telah melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan sasaran dan indikator kinerja yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja maupun rencana Aksi TA. 2025. Progres realisasi fisik dari target Perjakin hingga triwulan IV mencapai 100,00%. Capaian ini sesuai dengan target yang tertuang dalam rencana aksi BSPJI Samarinda tahun 2025.

Capaian kinerja BSPJI Samarinda juga mencakup capaian indikator kinerja kegiatan dalam Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Capaian kinerja keuangan telah terealisasi sebesar 91,31% menurut Aplikasi SAKTI berbasis SP2D terhadap pagu efektif. Sementara berdasarkan Sistem Informasi Keuangan Intranew diperoleh capaian kinerja keuangan sebesar 91,3% berbasis SP2D terhadap pagu efektif, sedangkan menurut aplikasi OMSPAN adalah sebesar 80.34% terhadap pagu total. Capaian kinerja keuangan belum memenuhi target yang ditetapkan oleh BSKJI untuk triwulan IV yaitu 93,50%. Adapun capaian kinerja fisik menurut perhitungan realisasi fisik perjanjian kinerja diperoleh sebesar 100,00% dan telah melebihi target yang ditetapkan oleh BSKJI yaitu 100,00%.

Pada pelaksanaan kegiatan BSPJI Samarinda menerapkan optimalisasi sumber daya baik anggaran, SDM serta sarana dan prasarana yang dimaksudkan agar seluruh sumber daya yang dimiliki dapat menunjang tercapainya seluruh target tersebut. Langkah optimalisasi sumber daya diharapkan berdampak pada terciptanya efisiensi anggaran. Pada Triwulan IV telah dilakukan 6 kali revisi dengan rincian 1 kali revisi DIPA kewenangan DJA, 1 kali revisi DIPA kewenangan Kanwil, dan 4 kali revisi DIPA kewenangan KPA. Revisi DIPA kewenangan DJA dilaksanakan dalam rangka penambahan pagu belanja pegawai dan relaksasi blokir belanja sehingga total blokir belanja menjadi sebesar Rp. 2,418,255,000 dari total pagu sebesar Rp. 20,148,394,000. Selanjutnya, revisi kewenangan Kanwil dilakukan dalam rangka pemutakhiran Halaman III DIPA. Selanjutnya, revisi DIPA kewenangan KPA maupun revisi POK dilaksanakan dalam rangka revisi administrasi. Dengan berakhirnya Triwulan IV, maka secara keseluruhan BSPJI Samarinda telah melaksanakan revisi DIPA sebanyak 21 kali dalam Tahun 2025.

Tabel 7. Rencana Aksi TA. 2025

Unit Organisasi : Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi											
						Target Antara	Triwulan I	Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV					
							Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan				
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,66	Indeks	24%	1	a) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	48%	4	a) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	72%	7	a) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	100%	10	a) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target
							2	a) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target		5	a) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target		8	a) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target		11	a) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target
							3	a) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target		6	a) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target		9	a) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target		12	a) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target
		TJ.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	210	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	25%	1	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Verifikasi d) Penyusunan jadwal audit perusahaan dan pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal serta Sertifikasi produk	50%	4	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultansi, dan Pembinaan SDM Industri	75%	7	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultansi, dan Verifikasi	100%	10	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultansi, dan Pembinaan SDM Industri

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi							
						Target Antara	Triwulan I	Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
							Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
							2 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi serta melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi d) Pelaksanaan layanan Verifikasi dan Pembinaan SDM Industri e) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		5 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Konsultasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		8 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Verifikasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		11 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Verifikasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk
							3 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi serta melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi d) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Pembinaan SDM Industri e) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		6 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Konsultasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		9 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Pembinaan SDM Industri d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		12 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Verifikasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	SK.1.1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	86,00	Persen	25%	1 a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu	50%	4 a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan	75%	7 a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu	100%	10 a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi																			
						Target Antara	Triwulan I	Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV													
							Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan												
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12												
							c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan		kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan		c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan		c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan												
							2		a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan		5		a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	8	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	11	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan								
							3		a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan		6		a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	9	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	12	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan								
							SK.1.2		Nilai Net Promoter Score (NPS)		6		Nilai	24%	1	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	48%	4	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	72%	7	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	100%	10	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial
							2		Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial		5		Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	8	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	11	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial								
							3		Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial		6		Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	9	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	12	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial								
		3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	SK.2.1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2	Indeks	25%	1	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi	50%	4	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi	75%	7	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi	100%	10	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi						

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi															
						Target Antara	Triwulan I	Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV									
							Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan								
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12								
							c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA								
							2 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		5 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		8 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		11 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA								
							3 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		6 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		9 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		12 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA								
							SK.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		4545		Hasil Layanan	25%	1 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	50%	4 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	75%	7 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	100%	10 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA
															2 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan		5 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan		8 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan		11 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi											
						Target Antara	Triwulan I	Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV					
							Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan				
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12				
							lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA		lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA		lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA		lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA				
							3		a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA		6		a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	9	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	12	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA
							SK.2.3		Nilai Revenue on Asset (RoA)		8,10		Persen	20%	1	a) Penyampaian Laporan b) Pengawasan BMN untuk TA. 2024 c) Penyiapan konsep laporan BMN d) Inventarisasi BMN yang akan diusulkan penghapusan	45%
							2	a) Koordinasi dengan KPKNL terkait usulan proses penghapusan b) Hunting Penyedia pengadaan alat laboratorium & pengolah data melalui E-Catalog c) Proses Pengadaan Alat Laboratorium & Pengolah Data d) Reviu Laporan BMN Unaudited TA. 2024 e) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL		5	a) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan Lelang Inventaris kantor b) Hunting Penyedia dan Koordinasi terkait pengadaan AC, dll c) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL		8	a) Reviu Laporan BMN Semester 1 oleh APIP b) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL c) Finalisasi Laporan BMN Semester 1		11	a) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL b) Penyelesaian To Do List Triwulan III
							3	a) Penyiapan dokumen usulan penghapusan BMN b) Pelaksanaan pemeliharaan Gedung kantor c) Penyiapan proses pengadaan meubelair		6	a) Pelaksanaan pemeliharaan/perbaikan Gedung kantor tahap 2 b) Pengusulan RKBMN c) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL		9	a) Reviu Laporan BMN Semester 1 oleh APIP b) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL c) Finalisasi Laporan BMN Semester 1		12	a) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL b) Pengusulan PSP untuk pengadaan belanja modal Semester 2 c) Perhitungan dan Evaluasi capaian nilai ROA

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi							
						Target Antara	Triwulan I	Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
							Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
							d) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL						d) Penyelesaian To Do List Triwulan III
		SK.2.4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	42,00	Persen	20%	1 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNPB BLU pada minggu ke IV setiap bulannya	50%	4 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNPB BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNPB BLU	75%	7 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNPB BLU pada minggu ke IV setiap bulannya	100%	10 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNPB BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNPB BLU
							2 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNPB BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNPB BLU		5 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNPB BLU pada minggu ke IV setiap bulannya		8 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNPB BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNPB BLU		11 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNPB BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNPB BLU
							3 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNPB BLU pada minggu ke IV setiap bulannya		6 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNPB BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNPB BLU		9 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNPB BLU pada minggu ke IV setiap bulannya		12 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNPB BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNPB BLU
4	Terwujudnya SDM yang profesional	SK.3.1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,30	Indeks	25%	1 a) Membuat laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi TA. 2024 b) Identifikasi kebutuhan pelatihan dari masing-masing Ketua Tim c) Perencanaan pelatihan pengadaan Barang/Jasa	50%	4 Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengembangan layanan	75%	7 a) Update data pengembangan kompetensi pegawai pada Link yang dikeluarkan Biro OSDM b) Penetapan nilai sementara IP ASN Semester I	100%	10 a) Evaluasi kebutuhan pelatihan dengan ketersediaan anggaran b) Revisi anggaran pengembangan kompetensi (bila diperlukan)
							2 a) Membuat program pelatihan tahun 2025 b) Pelaksanaan pelatihan bidang sertifikasi dan pengujian		5 Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengembangan layanan		8 Evaluasi hasil penetapan nilai IP ASN Semester 1		11 a) Update data pengembangan kompetensi pegawai pada Link yang dikeluarkan Biro OSDM b) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi terkait pengembangan layanan

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi											
						Target Antara	Triwulan I	Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV					
							Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan				
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12				
						3	a) Evaluasi pelaksanaan pelatihan Triwulan I b) Revisi kegiatan pengembangan kompetensi		6	a) Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengembangan layanan b) Evaluasi pelaksanaan pelatihan Triwulan II		9	Pelaksanaan Pelatihan pengembangan kompetensi non teknis (In House Training)	12	Evaluasi hasil penetapan nilai IP ASN Semester 2		
5	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	SK.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00	Persen	15%	1	Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA	40%	4	Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA	80%	7	Membuat perencanaan pengembangan aplikasi SILABISA	100%	10	Melakukukan pengujian pengembangan aplikasi SILABISA
							2	Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA		5	Membuat Analisis Kebutuhan pengembangan aplikasi SILABISA		8	Membuat rancang bangun pengembangan aplikasi SILABISA		11	Melakukan Implementasi pengembangan aplikasi SILABISA
							3	Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA		6	Membuat Analisis Kebutuhan pengembangan aplikasi SILABISA		9	Membuat rancang bangun pengembangan aplikasi SILABISA		12	Kegiatan selesai
		SK.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77,00	Persen	15%	1	Membuat data dukung LKE SPBE	35%	4	Membuat data dukung LKE SPBE	70%	7	Membuat data dukung LKE SPBE	100%	10	Membuat data dukung LKE SPBE
							2	Membuat data dukung LKE SPBE		5	Membuat data dukung LKE SPBE		8	Membuat data dukung LKE SPBE		11	Membuat data dukung LKE SPBE
							3	Membuat data dukung LKE SPBE		6	Membuat data dukung LKE SPBE		9	Membuat data dukung LKE SPBE		12	Kegiatan selesai
		SK.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,51	Indeks	15%	1	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	40%	4	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	70%	7	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	100%	10	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan
							2	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan		5	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan		8	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan		11	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan
							3	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan		6	a). Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan e) Penyusunan perubahan SPM		9	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan		12	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi											
						Target Antara	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV				
							Rencana Kegiatan		Target Antara	Rencana Kegiatan		Target Antara	Rencana Kegiatan		Target Antara	Rencana Kegiatan	
1	2	3		4		5	6		7	8		9	10		11	12	
6	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	SK.5.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	60,00	Persen	20%	1	Menyelesaikan seluruh bukti pertanggungjawaban keuangan kegiatan TA. 2024	80%	4	Mereviu Laporan hasil Pemeriksaan Audit Kinerja	100%	7	Monitoring progress penyampaian tindak lanjut LHP Ke Sekretariat Inspektorat Jenderal		10	Kegiatan selesai
							2	Pengumpulan permintaan data dukung untuk keperluan Audit Kinerja Inspektorat		5	Menyelesaikan saran-saran tindaklanjuti audit kinerja yang tercantum dalam LHP		8	Reviu Tindak Lanjut LHP oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal		11	Kegiatan selesai
							3	Koordinasi dengan tim auditor terkait jadwal rencana audit		6	Penyampaian hasil tindak lanjut audit kinerja ke Sekretariat Inspektorat Jebdederal		9	Kegiatan selesai		12	Kegiatan selesai
		SK.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	94,98	Nilai	20%	1	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Menyiapkan sarana penyimpanan arsip aktif menggunakan Filling Cabinet, sekat guide Primer, Skunder dan Tersier	50%	4	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Melakukan penyimpanan arsip aktif di Ruang Central File	80%	7	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Membuat daftar arsip kegiatan per 6 bulan (Januari – Juni)	100%	10	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Melaksanakan pemberkasan arsip aktif
							2	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Menyiapkan out indicator arsip aktif yang digunakan dalam peminjaman arsip aktif c) Menyajikan arsip aktif bagi kepentingan internal		5	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Melakukan pengelolaan arsip vital c) Melakukan perlindungan arsip vital		8	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Menyusun daftar arsip aktif		11	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Melaksankan penyimpanan arsip aktif
							3	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Pemberkasan arsip aktif melauai penerapan SRIKANDI c) Menginput daftar arsip aktif dan daftar isi berkas		6	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Pemberkasan arsip aktif melauai penarapan SRIKANDI c) Menginput daftar arsip aktif		9	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Pemberkasan arsip aktif melauai penarapan srikandi c) Menginput daftar arsip aktif dan daftar isi berkas arsip aktif		12	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Membuat daftar arsip kegiatan per 6 bulan (Juli-Desember) c) Melaksanakan Pemindahan arsip dari unit pengolah berdasarkan Jadwal Retensi Arsip mewakili fungsi satker d) Membuat berita acara pemindahan arsip
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	SK.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	80,45	Nilai	25%	1	a) Penyelesaian dan Reviu LAK 2024 b) Penyusunan Revisi RSB 2023-2027 c) Rapat Kerja 2025	50%	4	a) Penyusunan Laporan PP39 TW 1 b) Penyusunan Renstra 2025-2029	75%	7	Penyusunan Laporan PP 39 TW 2	100%	10	a) Penyusunan Laporan PP 39 TW 3 b) Penyusunan RBA Indikatif TA.2027

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi														
						Target Antara	Triwulan I	Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV								
							Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan							
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12							
		SK.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,18	Nilai	24%	2	a) Kick Off Pelaksanaan Kegiatan TA. 2025 b) Penyusunan Renkin TA. 2026 c) Evaluasi SAKIP TA. 2024		5	a) Reviu Internal KAK RAB dan data dukung TA. 2026 b) Penyusunan RBA 2026 definitive		8	Reviu APIP KAK RAB dan Data dukung TA. 2026		11	a) Penyusunan TRPNBP TA. 2027 b) Rapat Monev TW 4			
							3	a) Pengumpulan usulan KAK RAB dan data dukung TA. 2026 b) Rapat Monev TW 1 c) Pelaporan Monev BAPPENAS		6	a) Penyesuaian Pagu Indikatif TA. 2026 b) Rapat Monev TW 2 c) Pelaporan Monev BAPPENAS		9	a) Reviu DJA KAK RAB dan Data dukung TA. 2026 b) Rapat Monev TW 3 c) Pelaporan Monev BAPPENAS		12	a) Penyusunan Renja TA. 2026 b) Pelaporan Monev BAPPENAS c) Penyusunan Laporan PP 39 TW 4			
							1	a) Revisi DIPA awal dan Pencantuman Saldo Awal b) Penyusunan Rencana Belanja per Kegiatan (Sub Komponen) c) Pengajuan UP d) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Januari		48%	4		a) Pelaporan CAPUT Maret b) Revisi DIPA TW 2 - Pemutakhiran RPD (maks 10 April) c) Pengesahan Penerimaan dan Belanja April d) Pengajuan GUP April	72%		7	a) Pelaporan CAPUT Juni b) Revisi DIPA TW 3 - Pemutakhiran RPD (maks 10 Juli) c) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Juli d) Pengajuan GUP Juli	100%	10	a) Pelaporan CAPUT September b) Revisi DIPA TW 4 - Pemutakhiran RPD (maks 10 Oktober) c) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Oktober d) Pengajuan GUP Oktober
							2	a) Penyusunan RPD (maks 10 Februari) b) Pelaporan CAPUT Januari c) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Februari d) Pengajuan GUP Februari			5		a) Pelaporan CAPUT April b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Mei c) Pengajuan GUP Mei			8	a) Pelaporan CAPUT Juli b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Agustus c) Pengajuan GUP Agustus		11	a) Pelaporan CAPUT Oktober b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja November c) Pengajuan TUP d) Pengajuan GUP November
							3	a) Pelaporan CAPUT Februari b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Maret c) Pengajuan GUP Maret d) Monev Penyerapan Anggaran TW 1			6		a) Pelaporan CAPUT Mei b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Juni c) Pengajuan GUP Juni d) Monev Penyerapan Anggaran TW 2			9	a) Pelaporan CAPUT Agustus b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja September c) Pengajuan GUP September d) Monev Penyerapan Anggaran TW 3		12	a) Pelaporan CAPUT November b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Desember c) GUP/TUP Nihil d) Monev Penyerapan Anggaran TW 4
							SK.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		75,00	Nilai		25%	1		Penyiapan penyusunan laporan keuangan Semester II TA. 2024	50%	4	Penatausahaan BMN	75%
		2	a) Peningkatan kompetensi Pengelola Keuangan b) Penyiapan administrasi penatausahaan keuangan c) Penatausahaan BLU	5	Melakukan rekonsiliasi internal antara laporan persediaan dan laporan BMN ke Laporan SAI	8			Reviu Laporan Keuangan oleh APIP			11		Update data persediaan dan penyusunan laporan						
		3	Tindak lanjut pengusulan Izin Penempatan Rumah Dinas	6	Melakukan penginputan sertifikat BMN dalam aplikasi SIINTIP	9			a) Update data BMN hasil pengadaan TA. 2025			12		Penyelesaian pelaporan keuangan bendahara (GU, Pengesahan, LPJ, dll)						
		8	Terwujudnya SDM yang profesional	SK.7.1	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam	80			Persen			20%		1	Penginputan data pengadaan pada aplikasi SIRUP	45%		4	Penyampaian laporan reviu pengadaan barang/ jasa Triwulan I 2025	

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Target Antara	Triwulan I	Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		rangka menunjang produktivitas Industri							pengadaan barang/ jasa Triwulan II 2025		
					2 Tagging proses pengadaan dan pengumuman paket pengadaan pada LPSE		5 Koordinasi pelaksanaan pengadaan tambahan alat laboratorium		8 Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa		11 Evaluasi capaian penggunaan TKD pada pengadaan barang/ jasa Semester II TA. 2025
					3 a) Pelaksanaan pengadaan alat laboratorium b) Pengusulan Izin Import untuk alat laboratorium dan Bahan Kimia		6 Monitoring capaian penggunaan PDN pada pengadaan barang/ jasa sampai semester I dan monitoring progress usulan izin impor		9 Proses Pengadaan Barang/Jasa alat laboratorium		12 Evaluasi penyelesaian pengadaan barang/ jasa
				22%		49%		76%		100%	

3.3.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Pada perjanjian kinerja tahun 2025 terdapat 1 (satu) Tujuan dan 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dengan total 18 (delapan belas) indikator yang harus dicapai. BSPJI Samarinda melaksanakan seluruh kegiatan dengan berfokus pada seluruh sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya dalam rangka mencapai akuntabilitas kinerja yang optimal dan mampu memberikan *outcome* bagi masyarakat serta mencapai tujuan yang telah tertuang dalam renstra. Realisasi capaian kinerja BSPJI Samarinda berdasarkan indikator pada Perjanjian Kinerja dilaksanakan berdasarkan rencana aksi. Pada Triwulan IV diperoleh rata-rata capaian realisasi masing-masing indikator kinerja sebesar 168,74%.

Pada Tujuan Kegiatan, yakni **Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri**, untuk indikator pertama *“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”*, pada Triwulan IV telah diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,85 dengan mutu pelayanan 96,34 (Sangat Baik). Selanjutnya indikator kedua *“Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri”*, pada Triwulan IV terdapat 358 perusahaan yang telah memanfaatkan layanan jasa industri BSPJI Samarinda.

Pada Sasaran Kegiatan pertama, yakni **Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional**, untuk indikator pertama *“Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)”*, pada Triwulan IV diperoleh capaian SLA sebesar 96,96% untuk seluruh layanan jasa di BSPJI Samarinda. Selanjutnya, indikator kedua *“Nilai Net Promoter Score (NPS)”*, pada Triwulan IV telah dilakukan penyampaian survei NPS dan telah diperoleh nilai NPS sebesar 60,58 dari 274 orang responden yang merupakan pelanggan BSPJI Samarinda.

Pada sasaran kegiatan kedua, yakni **Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri**, untuk indikator pertama *“Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”*, pada Triwulan IV diperoleh penerimaan sebesar Rp. 6.781.819.885, yang jika dibandingkan dengan realisasi PNBP di tahun sebelumnya maka diperoleh penurunan sebesar 5,65 sehingga berada pada Indeks 1. Selanjutnya, indikator kedua *“Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri”*, pada Triwulan IV diperoleh jumlah layanan jasa yang telah digunakan oleh pelanggan BSPJI Samarinda sebanyak 6.021 order. Pada indikator ketiga, *“Nilai Revenue on Asset (RoA)”*, pada Triwulan IV telah dilakukan perhitungan RoA dengan hasil sebesar 17,07%. Pada indikator keempat, *“Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)”*, pada Triwulan IV berdasarkan perhitungan diperoleh rasio POBO sebesar 47,33%.

Pada sasaran kegiatan ketiga, yakni **Terwujudnya SDM Profesional**, dengan indikator *“Indeks Profesionalitas ASN”*, dilaksanakan melalui pengukuran IP ASN berdasarkan data kualifikasi, kompetensi, dan kinerja seluruh pegawai, dengan hasil penilaian IP ASN dari Biro OSDM pada Intranet sebesar 83,18.

Pada sasaran kegiatan keempat, yakni **Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik**, untuk indikator pertama *“Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI”*, pada triwulan IV layanan pengujian telah terintegrasi dengan SIPPT BSKJI sehingga diperoleh realisasi sebesar 20%. Selanjutnya, indikator kedua *“Tingkat Penerapan SPBE”*, pada Triwulan IV telah diperoleh hasil penilaian kertas kerja dengan hasil sebesar 87,19. Pada indikator ketiga, *“Indeks Pelayanan Publik (IPP)”*, pada Triwulan IV diperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,73 dan masuk dalam kategori “A” yang bermakna “Pelayanan Prima”.

Pada sasaran kegiatan kelima, **Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien**, indikator pertama *“Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker”*, pada triwulan sebelumnya telah diterima surat balasan dari Inspektur Jenderal Wilayah III Kementerian Perindustrian yang menyatakan bahwa seluruh temuan telah ditindaklanjuti dan selesai sesuai dengan lingkup program dan keuangan yang telah diaudit. Indikator kedua, *“Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)”* pada Triwulan IV telah diperoleh hasil penilaian untuk Unit Kearsipan BSPJI Samarinda dengan capaian nilai sebesar 100.

Pada sasaran keenam, **Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi**, pada indikator pertama *“Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker”*, dimana penilaian SAKIP telah dilaksanakan dan diperoleh bahwa nilai SAKIP BSPJI Samarinda sebesar 85,40. Pada indikator kedua, *“Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)”*, pada triwulan ini diperoleh nilai IKPA sebesar 95,46. Pada indikator ketiga, *“Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan”*, diperoleh nilai Laporan Keuangan sebesar 92,00.

Pada sasaran ketujuh, **Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri** dengan indikator *“Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”*, pada Triwulan IV telah diperoleh capaian Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar 87,62% berdasarkan perhitungan mandiri terhadap akun belanja terpilih dan diperoleh capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar 80,65% berdasarkan aplikasi LKPP.

Tabel Realisasi Rencana Aksi Sampai Triwulan IV TA. 2025 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda dapat dilihat pada bagian lampiran. Selanjutnya, berikut pembahasan masing-masing capaian indikator kinerja pada Triwulan IV:

TJ : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri

Tabel 8. Capaian Kinerja TJ

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,66	3,85	105,19%	100	100	B10: a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target B11: a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target B12: a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target d) Evaluasi hasil survei e) Melakukan tindakan korektif/ perbaikan	B10: a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA. b) Pemantauan pengaduan pelanggan B11: a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA. b) Pemantauan pengaduan pelanggan B12: a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA. b) Pemantauan pengaduan pelanggan c) Melakukan analisis hasil survey kepuasan pelanggan kepada responden yang memberi nilai di bawah 3,66
		Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	210	358	170,48%	100	100	B10: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Verifikasi B11: a) Melakukan penambahan lingkup	B10: a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Pengajuan peningkatan kualifikasi dan penambahan ruang lingkup Lembaga Pemeriksa Halal c) Persiapan dokumen teknis untuk parameter yang akan diakreditasi d) Monitoring jumlah perusahaan industri pada layanan SILABISA e) Pengelolaan Database Industri potensial guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Verifikasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk B12: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Pembinaan SDM Industri d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk	pelayanan dan kepercayaan serta memberikan inovasi program promosi penawaran harga B11: a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Pengajuan peningkatan kualifikasi dan penambahan ruang lingkup Lembaga Pemeriksa Halal c) Persiapan dokumen teknis untuk parameter yang akan diakreditasi d) Monitoring jumlah perusahaan industri pada layanan SILABISA e) Pengelolaan Database Industri potensial guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan serta memberikan inovasi program promosi penawaran harga B12: a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Pengajuan peningkatan kualifikasi dan penambahan ruang lingkup Lembaga Pemeriksa Halal c) Persiapan dokumen teknis untuk parameter yang akan diakreditasi d) Monitoring jumlah perusahaan industri pada layanan SILABISA e) Pengelolaan Database Industri potensial guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan serta memberikan inovasi program promosi penawaran harga

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

Indikator Tujuan 1: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan IV TA. 2025 target fisik dari indikator ini 100% dengan realisasi 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan akhir triwulan IV adalah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA, pemantauan pengaduan pelanggan, serta melakukan analisis hasil survei kepuasan pelanggan kepada responden yang memberi nilai di bawah 3,66.

Dari data di atas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

Hasil survei indeks kepuasan masyarakat sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2025 diperoleh dari penilaian 274 responden dari jumlah total sebanyak 358 pengguna jasa. Keseluruhan responden yang melakukan survei merupakan pengguna jasa selama periode Tahun 2025. Pada hasil survei yang diperoleh terdapat 27 responden yang memberi nilai <3,66 dengan rata - rata nilai unsur terendah terdapat pada unsur “waktu pelayanan” dan juga “biaya/tarif”.

Berdasarkan data survei yang diterima, penilaian indeks responden dapat dikelompokkan seperti tabel berikut:

Tabel 9. Klasifikasi Nilai Indeks

Indeks 1 (1,00-2,59996)	Indeks 2 (>=2,6-<3,064)	Indeks 3 (>=3,064-<3,5324)	Indeks 4 (>=3,5324 - 4,000)	Total Responden	Jumlah Pegguna Jasa
0	5	18	251	274	358

Nilai perolehan indeks kepuasan masyarakat sampai dengan triwulan IV tahun 2025 adalah 3,85 dengan mutu pelayanan 96,34 (Sangat Baik) sesuai dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 10. Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata unsur	Nilai rata-rata (NRR) Tertimbang (NRR x 0,11)
U1	Persyaratan	3,92	0,43
U2	Prosedur	3,91	0,43
U3	Waktu pelayanan	3,85	0,42
U4	Biaya/Tarif	3,77	0,41
U5	Produk layanan	3,91	0,43
U6	Kompetensi Pelaksana	3,92	0,43
U7	Perilaku Pelaksana	3,93	0,43
U8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,93	0,43
U9	Sarana dan Prasarana	3,91	0,43
Indeks Kepuasan Masyarakat ($\sum$ NRR Tertimbang)			3,85
IKM Unit Pelayanan ($\sum$ NRR Tertimbang x 25)			96,34
Mutu Pelayanan			Sangat Baik

Berdasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat sampai dengan triwulan IV tahun 2025, maka hasil yang diperoleh 3,85 dengan mutu pelayanan 96,34 (Sangat Baik), telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 3,66 dengan capaian sebesar 105,19%.

b) Kendala

- Pelaksanaan survei yang masih menggunakan metode konvensional pada beberapa layanan jasa sehingga tingkat partisipasi responden belum mencakup semua pengguna jasa.
- Adanya keterbatasan petugas dalam memonitoring pengguna jasa apakah telah melakukan survei secara konvensional pada layanan selain jasa pengujian karena sifat pengisiannya sukarela.
- Kurangnya pengetahuan responden akan pentingnya dilakukan survei kepuasan masyarakat dan keterbatasan SDM responden dalam melakukan survei.
- Beberapa responden memberikan penilaian survei kurang baik karena hasil uji sample pada layanan pengujian tidak sesuai harapan pengguna jasa

c) Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada triwulan ini, maka rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya meliputi:

- Evaluasi responden yang memberi nilai di bawah target guna mengidentifikasi permasalahan dan menyusun langkah perbaikan yang tepat.

- Perbaikan pada unsur dengan nilai terendah yaitu “*Waktu Pelayanan*” dan “*Biaya/Tarif*” dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.
- Pendekatan secara langsung kepada responden yang memberikan nilai terendah, yaitu: PT. Unicorn Tosan Perkasa (*nilai 2,78*), PT. ITCI Kartika Utama (*nilai 2,92*) untuk mendapatkan informasi terkait kendala yang dihadapi.
- Pengembangan pada SIL dengan menyediakan sistem pengisian survei untuk layanan jasa selain pengujian, sehingga jumlah responden dapat sesuai dengan jumlah pengguna jasa serta diperoleh nilai survei SKM secara *real time*.
- Melaksanakan sosialisasi terkait pentingnya survei kepuasan masyarakat melalui media sosial serta himbauan langsung kepada pengguna jasa, dengan tujuan meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan jumlah responden pada survei berikutnya.

Indikator Tujuan 2: Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri.

Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri merujuk pada jumlah total entitas bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam sektor industri dan/atau pelanggan yang menggunakan layanan yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI pada tahun berjalan.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan IV TA. 2025 target fisik dari indikator ini 100% dengan realisasi 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan IV adalah pelaksanaan layanan jasa seperti pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri dengan rincian sebagai berikut:

- Kegiatan Audit di PT Beratustirta Giriagung, Survailen di PT Ruhama Ponpes Alarsyadi dan PT. Giat Mandiri
- Kegiatan pemeriksaan halal
- Pendampingan penyusunan dokumen ISO 17025
- Pendampingan pendaftaran Sertifikat Halal
- Pelatihan dan sertifikasi PPC Udara Ambien dan Kebauan
- Pelatihan dan sertifikasi PPC Air dan Air Limbah

Pada Triwulan IV juga telah diperoleh sertifikat peningkatan status akreditasi LPH Utama serta dilakukan pengembangan ruang lingkup laboratorium uji dan sertifikasi produk pH tinggi, tangki silinder vertikal dan CPO. Pengembangan layanan ini dilakukan guna meningkatkan jumlah perusahaan industri yang memanfaatkan layanan jasa industri.

Selanjutnya pada Triwulan IV juga dilakukan pemanfaatan database industri potensial area Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai referensi dalam melakukan kegiatan audiensi

layanan dan peninjauan kerjasama. Kemudian melakukan perbaikan dan update data pada booklet layanan secara berkala sesuai dengan pengembangan layanan yang telah dilakukan, meningkatkan kualitas pelayanan lebih efektif dan efisien dengan pembuatan sistem penawaran harga melalui aplikasi SILABISA, memberikan program promosi dengan pemberian diskon layanan dalam rangka peninjauan kerjasama, mengikuti proses kegiatan tender pekerjaan terkait pemantauan lingkungan di beberapa perusahaan seperti PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Multi Harapan Utama, PT. Multi Kusuma Cemerlang, PT. Fairco, dll, melakukan kegiatan FGD (Focus Group Discussion) dalam rangka sosialisasi layanan Sertifikasi Halal kepada 50 industri dan stakeholder terkait, memberikan program – program promosi untuk meningkatkan jumlah pelayanan, serta melakukan evaluasi perbaikan layanan melalui survei kepuasan pelanggan.

Adapun jumlah industri yang memanfaatkan layanan jasa pada Triwulan IV ada sebanyak 358 Industri dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11. Jumlah Perusahaan Industri yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri

Jenis Layanan	sd. TW III	Okt	Nov	Des	*Total Industri Triwulan IV
Pengujian	210	74	75	66	269
Kalibrasi	8	2	4	4	15
Sertifikasi	10	2	2	2	14
Pemeriksaan Halal	4	8	2	1	30
Pelatihan	4	1	4	-	8
Konsultansi	4	-	2	2	10
Verifikasi TKDN	2	-	-	-	2
Penggunaan SDM	4	2	1	2	8
Penggunaan Aset	-	1	1	-	2
Total Keseluruhan	246	90	91	77	358

** jumlah perusahaan industri tanpa memperhitungkan perulangan order*

Berdasarkan data pada tabel diatas, jumlah perusahaan industri yang memanfaatkan layanan jasa industri pada periode Triwulan IV tahun 2025 mencapai 358 perusahaan terhadap target 210 perusahaan sehingga diperoleh capaian sebesar 170,48%.

b) Kendala

Adapun kendala pada Triwulan IV adalah:

- Adanya penghematan anggaran pemerintah berdampak pada jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa, khususnya dari Dinas Kota/Kabupaten berkurang yang sebelumnya telah dikoordinasikan.
- Penambahan lingkup layanan yang dibutuhkan pelanggan seperti layanan kalibrasi dan pengujian aneka komoditi belum bisa sepenuhnya dilakukan dikarenakan keterbatasan sumber daya terutama peralatan pendukung.

- Dari total 358 industri pengguna layanan, sebanyak 269 atau sekitar 75,14% merupakan pengguna layanan pengujian. Hal ini menunjukkan dominasi satu jenis layanan sehingga layanan lain (kalibrasi, sertifikasi produk, pelatihan, konsultasi, dll.) belum dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna jasa. Kontribusi capaian masih sangat bergantung pada layanan pengujian. Hal ini dapat menjadi kendala untuk keberlanjutan pencapaian target kedepannya jika tidak ada penguatan pada layanan lain.
- Sampai dengan akhir triwulan IV dilakukan penyesuaian pada jumlah jenis layanan dengan penambahan jenis layanan “penggunaan aset”. Pada nilai PNBP yang diterima sudah terdapat pengguna layanan penunjang pemanfaatan aset berupa penyewaan ruangan, kunjungan edukasi, dan penyewaan kendaraan operasional sampling. Namun pada penyewaan kendaraan operasional sampling beberapa *invoice* ke perusahaan masih tergabung pada layanan jasa pengujian sehingga belum dilakukan penghitungan jumlah pelanggan pada layanan penggunaan aset berupa penyewaan kendaraan operasional.
- Upaya pengembangan seperti pembuatan sistem penawaran harga melalui aplikasi SILABISA dan update booklet layanan sudah dilakukan, namun hasilnya belum terlihat signifikan pada layanan selain pengujian. Sehingga perlunya strategi promosi yang lebih terfokus pada layanan yang masih kurang diminati.

c) Tindak Lanjut

Adapun tindak lanjut pada triwulan selanjutnya adalah:

- Pelaksanaan promosi dan koordinasi di beberapa industri/pelaku usaha dan Dinas Kota/Kabupaten terkait layanan potensial dengan memanfaatkan media digital, booklet layanan, dan testimoni pengguna jasa untuk meningkatkan *awareness* pelanggan.
- Melakukan kajian terhadap lingkup layanan yang akan dikembangkan dengan menyesuaikan sumber daya yang ada. Melakukan optimalisasi terhadap layanan permintaan pelanggan disesuaikan dengan ketersediaan bahan kimia, peralatan dan metode uji.
- Melakukan diversifikasi layanan dengan melakukan sosialisasi dan promosi khusus untuk layanan non-pengujian (kalibrasi, sertifikasi produk, halal, pelatihan, TKDN, dan penggunaan aset), serta membuat paket layanan terpadu (*bundling service*) agar industri terdorong memanfaatkan lebih dari satu jenis layanan.
- Melakukan peningkatan promosi dengan memanfaatkan media digital, booklet layanan, dan testimoni pengguna jasa untuk meningkatkan *awareness* pelanggan terhadap layanan lain selain pengujian.
- Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur peningkatan pemanfaatan layanan non-pengujian serta menggunakan hasil survei kepuasan pelanggan sebagai dasar perbaikan kualitas dan penyesuaian strategi promosi

SK 1 : Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional

Tabel 12. Capaian Kinerja SK 1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	86,00	96,96	112,74%	100	100	B10: a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan B11: a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan B12: a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	B10: Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak pada aplikasi silabisa, melakukan pengembangan parameter aneka komoditi diluar lingkup serta layanan kalibrasi B11: Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak pada aplikasi silabisa, melakukan pengembangan parameter aneka komoditi diluar lingkup serta layanan kalibrasi B12: Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak pada aplikasi silabisa, melakukan pengembangan parameter aneka komoditi diluar lingkup serta layanan kalibrasi
		Nilai Net Promoter Score (NPS)	6	60,58	1000,67%	100	100	B10: Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	B10: a) Melakukan promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								B11: Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial B12: Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	b) Melakukan Survey Net Promoter Score (NPS) B11: a) Melakukan promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial b) Melakukan Survey Net Promoter Score (NPS) B12: a) Melakukan promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial b) Melakukan Survey Net Promoter Score (NPS)

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

Indikator Kinerja 1: Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Industri adalah komitmen tertulis antara UPT dan pihak yang menerima layanan (misalnya, perusahaan/pelaku usaha industri/pelanggan) mengenai kualitas, cakupan, dan standar layanan yang diberikan. SLA ini biasanya mencakup beberapa elemen penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan. SLA pada UPT merujuk pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Waktu layanan pada SLA adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan IV TA. 2025 target fisik dari indikator ini 100% dengan realisasi 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan IV adalah Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap tercapainya target waktu penyelesaian layanan jasa teknis industri sesuai SLA serta melakukan identifikasi dan tindak lanjut terhadap kendala pencapaian sasaran. Adapun jenis layanan jasa industri yang dimaksud berupa layanan jasa pengujian dan kalibrasi, layanan jasa sertifikasi, layanan jasa konsultasi.

Adapun capaian pada masing-masing SLA untuk jasa layanan di BSPJI Samarinda adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rekapitulasi SLA

No	Jenis Layanan	Capaian Mutu sesuai SLA (%)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pengujian dan Kalibrasi	96,11	94,32	100	62,37	91,60	100	94,46	95,57	100	86,20	80,40	97,32
2	Sertifikasi	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Bimbingan dan Konsultasi	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata		96,11	98,11	100	87,46	97,20	100	98,15	98,52	100	95,40	93,47	99,11
Rata-rata s.d. TW IV		96,96											

Hasil capaian mutu (target penyelesaian) layanan jasa teknis pada Triwulan IV adalah sebesar 96,96%, dimana capaian ini lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 86%.

b) Kendala

Adapun kendala yang perlu diantisipasi dalam pencapaian target sasaran mutu dalam layanan pengujian dan kalibrasi, antara lain:

- Keterbatasan jumlah peralatan pengambilan contoh serta kalibrasi dapat berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan sampling
- Waktu penyelesaian terhadap beberapa jenis sampel dengan karakteristik yang berbeda belum dipisahkan dengan jelas seperti sampel air dan aneka komoditi dengan rangkaian pengujian yang memiliki tahapan yang panjang
- Modernisasi peralatan laboratorium baik untuk peralatan pendukung proses maupun proses belum sepenuhnya dilakukan
- Terbatasnya sumber daya untuk melakukan pengujian dan kalibrasi parameter diluar lingkup yang sudah diuji
- Pada bulan November Capaian SLA untuk pengujian dan kalibrasi di bawah target dikarenakan pasokan listrik dari PLN ke laboratorium kurang stabil (grounding melebihi batas) sehingga pengoperasian alat terutama AAS untuk pengujian logam menjadi tidak optimal

Sementara untuk kegiatan sertifikasi, bimbingan dan konsultasi belum ditemukan kendala terkait pelaksanaannya. Dalam pencapaian target ketepatan waktu sampel di kegiatan pengujian dan kalibrasi diperlukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus terhadap pencapaian target penyelesaian layanan jasa teknis pengujian serta dilakukan pencegahan terhadap hal-hal yang menghambat pencapaian target penyelesaian.

c) Tindak Lanjut

Diperlukan Kerjasama dari semua pihak pencapaian target penyelesaian layanan jasa teknis sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan. Diperlukan juga perencanaan dalam pengadaan peralatan, bahan kimia, bahan pendukung pengujian, perencanaan penjadwalan sampling serta perencanaan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan sehingga kegiatan layanan dapat berjalan dengan lancar.

Indikator Kinerja 2: Nilai Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score (NPS) adalah metode untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Hingga akhir triwulan IV TA. 2025 target fisik dari indikator ini 100% dengan realisasi sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan sampai Triwulan IV adalah melakukan survey NPS pada pelanggan yang menggunakan layanan jasa industri serta melakukan analisis hasil survey kepada responden yang memberi nilai survey. Pelaksanaan survey menggunakan google form dengan link https://bit.ly/SurveyNPS_BSPJISamarinda yang di share melalui media *WhatsApp* dan kemudian akan diisi oleh masing-masing pengguna jasa.

Berdasarkan hasil survei NPS sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2025, telah diperoleh penilaian 274 responden dari jumlah total sebanyak 358 pengguna jasa. Dari data survei yang diterima, hasil rekapitulasi respon survey NPS sampai periode Triwulan IV seperti tabel berikut:

Tabel 14. Hasil Survei NPS Triwulan IV

No	Nilai / Score	Jumlah Responden
1	1 - 7	9
2	8	99
3	9	141
4	10	25
Total Responden		274
% Promoters (Promoters / total responden x 100)		60,58 %
% Detractors (Detractors /total responden x 100)		0 %
NPS = (% Promoters) – (% Detractors)		60,58

Berdasarkan tabel diatas berikut hasil perhitungan NPS :

Dari survei NPS diterima data 274 responden tanggapan. Dari tanggapan tersebut diperoleh nilai :

- 166 pelanggan memberi skor 9 atau 10 (*Promoters*)
- 108 pelanggan memberi skor 7 atau 8 (*Passives*)
- 0 pelanggan memberi skor antara 0 dan 6 (*Detractors*)

Maka Nilai NPS yang diperoleh adalah:

$$\% \text{ Promoters: } (166/274) \times 100 = 60,58$$

$$\% \text{ Detractors: } (0/36) \times 100 = 0$$

$$\text{NPS} = 60,58 - 0 = 60,58$$

Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh skor NPS periode Triwulan IV adalah 60,58 dari target 6,00 dengan capaian 1000,67%, yang menunjukkan bahwa layanan sudah baik dan lebih banyak pelanggan yang puas sehingga mau merekomendasikan layanan.

b) Kendala

Pelaksanaan survey Net Promotore Score masih dilakukan secara manual menggunakan media WhatsApp sehingga responden memberikan jawaban secara sukarela, sehingga jumlah responden belum maksimal sesuai dengan jumlah pengguna jasa yang dilayani.

c) Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah jumlah responden yang mengikuti survei NPS masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah pengguna jasa. Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah diharapkan pelaksanaan survei dapat dilakukan menggunakan sistem survei melalui aplikasi SILABISA.

SK 2 : Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri**Tabel 15. Capaian Kinerja SK 2**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2	1	50%	100	100	B10: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian PNBP di aplikasi SILABISA B11: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian PNBP di aplikasi SILABISA B12: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan	B10: a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Melakukan monitoring dan evaluasi jumlah PNBP c) Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi d) Melakukan inventarisasi dan evaluasi kontrak kerjasama serta memberikan penawaran harga dan evaluasi jumlah penawaran yang menjadi order B11: a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Melakukan monitoring dan evaluasi jumlah PNBP c) Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi d) Melakukan inventarisasi dan evaluasi kontrak kerjasama serta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian PNBP di aplikasi SILABISA	memberikan penawaran harga dan evaluasi jumlah penawaran yang menjadi order B12: a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Melakukan monitoring dan evaluasi jumlah PNBP c) Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi d) Melakukan inventarisasi dan evaluasi kontrak kerjasama serta memberikan penawaran harga dan evaluasi jumlah penawaran yang menjadi order
		Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	4500	6021	132,48%	100	100	B10: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA B11: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	B10: a) Melakukan monitoring jumlah layanan pada aplikasi SILABISA b) Melakukan penambahan dan perluasan ruang lingkup layanan c) Koordinasi dengan stakeholder melalui kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan d) Promosi sosial media B11: a) Melakukan monitoring jumlah layanan pada aplikasi SILABISA b) Melakukan penambahan dan perluasan ruang lingkup layanan c) Koordinasi dengan stakeholder melalui kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan d) Promosi sosial media B12: a) Melakukan monitoring jumlah layanan pada aplikasi SILABISA b) Melakukan penambahan dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								B12: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	perluasan ruang lingkup layanan c) Koordinasi dengan stakeholder melalui kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan d) Promosi sosial media
		Nilai Revenue on Asset (RoA)	8,10	17,07	210,74%	100	100	B10: a) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL b) Lanjutan Pengadaan Mebelair dan Inventaris Kantor Lainnya B11: a) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL b) Penyelesaian To Do list triwulan III B12: a) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL b) Pengusulan PSP untuk pengadaan belanja modal Semester 2 c) Perhitungan dan Evaluasi capaian nilai ROA d) Penyelesaian To Do list triwulan III	B10: a) Telah disampaikan laporan pengelolaan pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan BMN Bulan September tahun 2025 kepada KPKNL. b) Telah dilakukan survei penyedia untuk pengadaan meubelair dan inventaris kantor lainnya. B11: a) Telah disampaikan laporan pengelolaan pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan BMN Bulan Oktober tahun 2025 kepada KPKNL. b) Telah dilakukan penyelesaian to do list pada panatausahaan BMN triwulan III tahun 2025 B12: a) Telah disampaikan laporan pengelolaan pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan BMN Bulan November tahun 2025 kepada KPKNL. b) Telah dilakukan inventarisasi data pengadaan BMN pada Semester 2 Tahun 2025 untuk dilakukan pengusulan PSP kepada Sekretaris Jenderal dan KPKNL.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
									c) Telah dilakukan perhitungan RoA dan capaian nilai RoA pada BSPJI Samarinda pada akhir Desember Tahun 2025. d) Telah dilakukan penyelesaian to do list pada panatausahaan BMN triwulan III tahun 2025
		Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	41,50	47,33	114,05%	100	100	B10: a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBPN BLU B11: a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBPN BLU B12: a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBPN BLU	B10: a) Penyampaian target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU ke PPK BLU pada tanggal 2 Oktober 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBPN BLU pada Minggu ke IV yaitu pada 30 Oktober 2025. c) Monitoring penagihan piutang B11: a) Penyampaian target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU ke PPK BLU pada tanggal 3 November 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBPN BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 26 November 2025. c) Monitoring penagihan piutang B12: a) Penyampaian target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU ke PPK BLU pada tanggal 3 Desember 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBPN BLU pada tanggal 15 dan 31 Desember 2025. c) Monitoring penagihan piutang

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini :

1) Indikator Kinerja 1 : Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan IV TA. 2025 target fisik dari indikator ini 100% dengan realisasi 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan IV adalah inventarisasi dan evaluasi terhadap 30 kontrak kerja sama yang terjalin sepanjang Tahun 2025, baik dengan pihak perusahaan maupun instansi pemerintahan, terkait pelaksanaan pekerjaan jasa pengujian emisi sumber tidak bergerak, pengujian udara ambien, serta pengujian udara lingkungan kerja untuk periode Tahun 2025/2026.

Berdasarkan data yang terdapat di sistem SILABISA sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2025 telah dibuat sebanyak 425 penawaran harga jasa kepada pelanggan yang mencakup keseluruhan layanan. Data pendapatan PNBP berdasarkan pembukuan bendahara penerimaan dapat dilihat pada berikut:

Tabel 16. Pendapatan PNBP berdasarkan Pembukuan Bendahara Penerimaan

No.	Layanan	Total Realisasi TW III	Oktober	November	Desember	Total Realisasi TW IV
A	424113 (Jasa Pelayanan)	3.861.885.344	516.275.200	807.417.212	1.559.799.840	6.745.707.596
1.	Pengujian	3.209.045.600	420.996.200	656.552.200	1.212.975.800	5.499.899.800
2.	Kalibrasi	37.500.444	3.135.000	400.000	61.162.000	102.197.444
3.	Sertifikasi Produk	63.350.000	4.900.000	1.050.000	11.400.000	80.700.000
4.	Pemeriksaan Halal	12.928.000	1.750.000	27.030.000	3.400.000	115.108.000
5.	Pelatihan	8.000.000	-	66.870.000	99.900.000	174.770.000
6.	Konsultansi	432.000.000	71.718.000	37.619.340	150.200.000	621.537.340
7.	Verifikasi TKDN	31.240.000	-	-	-	31.240.000
8.	Penggunaan SDM	11.054.000	7.930.000	2.235.000	9.455.000	30.674.000
9.	Penggunaan Aset					
	- Transportasi/akomodasi	56.767.300	1.346.000	14.910.672	11.307.040	84.331.012
	- Sewa Ruang Rapat	-	4.500.000	-	-	4.500.000
	- Kunjungan Edukasi	-	-	750.000	-	750.000
B	424911 (Jasa Perbankan)	24.780.104	2.789.520	2.622.205	3.422.401	36.083.373
	Jasa Giro	24.780.104	2.789.520	2.622.205	3.422.401	36.083.373
C	424919 (Lain-lain BLU)	-	-	-	28.916	28.916
	Kelebihan Bayar	-	-	-	28.916	28.916
	Total Pendapatan	3.886.665.448	519.064.720	810.039.417	1.563.251.157	6.781.819.885

Sampai Periode triwulan IV, telah diperoleh PNBPN sebesar Rp. 6.781.819.885. Sementara pada tahun 2024 diperoleh penerimaan sebesar Rp. 7.187.636.112. Berdasarkan data ini, maka diperoleh indeks peningkatan PNBPN:

$$\text{Peningkatan PNBPN} = \frac{(B - A)}{A} \times 100\%$$

$$\text{Peningkatan PNBPN} = \frac{(6.781.819.885 - 7.187.636.112)}{7.187.636.112} \times 100\%$$

$$\text{Peningkatan PNBPN} = \frac{(-405.816.227)}{7.187.636.112} \times 100\%$$

$$\text{Peningkatan PNBPN} = -5,65\%$$

Dari perhitungan ini diperoleh persentase peningkatan PNBPN sebesar -5,65%, sehingga jika dikonversikan ke indeks peningkatan PNBPN maka diperoleh hasil Indeks 1. Berdasarkan hasil tersebut maka diperoleh capaian indikator indeks peningkatan PNBPN sebesar 50% dari target Indeks 2.

b) Kendala

Adapun kendala yang dihadapi pada Triwulan IV diantaranya:

- Distribusi pendapatan yang belum merata antar layanan. Kontribusi terbesar PNBPN masih didominasi oleh jasa pengujian (sekitar 81,09% dari total pendapatan jasa), verifikasi TKDN dan penggunaan SDM serta pemanfaatan aset masih sangat rendah realisasinya. Ketergantungan yang tinggi pada satu jenis layanan (jasa pengujian) berpotensi menimbulkan risiko apabila terjadi penurunan permintaan.
- Berdasarkan data SILABISA, 425 penawaran harga jasa kepada pelanggan sampai dengan akhir triwulan IV. Namun, jumlah penawaran yang terealisasi menjadi order belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan pendapatan PNBPN.
- Penerimaan PNBPN pada layanan utama selain jasa pengujian seperti kalibrasi, sertifikasi, pemeriksa halal pelatihan, verifikasi TKDN, masih menunjukkan kontribusi minim terhadap total pendapatan. Rendahnya capaian dari layanan ini menjadi salah satu faktor terhambatnya optimalisasi PNBPN.

c) Tindak Lanjut

- Melakukan monitoring dan evaluasi capaian pendapatan PNBPN secara berkala setiap bulan untuk memastikan progres realisasi PNBPN sesuai dengan target.
- Melakukan pendekatan lebih aktif kepada calon pelanggan potensial berdasarkan penawaran yang sudah diberikan agar dapat direalisasikan menjadi order serta melakukan evaluasi terhadap penawaran yang tidak menjadi order.
- Melakukan peningkatan promosi layanan Jasa Lainnya selain layanan jasa pengujian melalui kunjungan, audiensi serta promosi melalui sosial media.

2) Indikator Kinerja 2 : Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri.

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Jumlah hasil layanan yang dimaksud adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam satu tahun.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan IV TA. 2025 target fisik dari indikator ini 100% dengan realisasi 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan IV adalah pelaksanaan layanan jasa seperti pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. Dalam rangka meningkatkan jumlah hasil layanan juga telah dilakukan analisis dan pengolahan data industri yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan industri yang ada di wilayah Kalimantan Timur seperti pertambangan batubara, perkebunan kelapa sawit, perhotelan, dan rumah sakit. Selanjutnya, pada triwulan IV telah dilakukan kunjungan dalam rangka monitoring dan evaluasi kerjasama pada PT. Pupuk Kalimantan Timur dan telah dilakukan rapat lanjutan dalam rangka pendirian laboratorium satelit kerjasama dengan PT. FAP Agri.

Promosi sosial media yang meliputi publikasi sebanyak 720 konten melalui akun media sosial resmi BSPJI Samarinda. Konten yang diproduksi sebagai bahan promosi terdiri dari berbagai jenis, baik berupa gambar (poster, infografis, dokumentasi kegiatan) maupun video (video singkat, reels, maupun dokumentasi audiovisual lainnya).

Jumlah layanan jasa BSPJI Samarinda sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Jumlah Layanan Periode Triwulan IV Tahun 2025

Jenis Layanan	Order TW III	Oktober	November	Desember	Total Keseluruhan TW IV
Pengujian	3510	754	635	568	5467
Kalibrasi	302	5	41	29	377
Sertifikasi Produk	11	2	2	2	17
Pemeriksaan Halal	19	8	2	1	30
Pelatihan	62	9	12	13	96
Konsultasi	8	-	2	3	13
Verifikasi TKDN	6	-	-	-	6
Penggunaan SDM	6	4	1	2	13
Penggunaan Aset	0	1	1	-	2
Total Keseluruhan	3924	783	696	618	6021

Berdasarkan data pada tabel diatas, Jumlah Layanan pada periode Triwulan IV tahun 2025 mencapai 6.021 order dengan capaian sebesar 132,48% terhadap target 4.545 order.

b) Kendala

Adapun kendala yang dialami pada Triwulan IV adalah:

- Penambahan lingkup layanan yang dibutuhkan pelanggan seperti layanan kalibrasi dan pengujian aneka komoditi belum bisa sepenuhnya dilakukan dikarenakan keterbatasan sumber daya.
- Pemanfaatan layanan jasa di BSPJI Samarinda sangat tergantung dari kebutuhan dan permintaan industri. Selain itu, jumlah industri yang menggunakan layanan jasa seperti konsultansi, pendampingan, pembimbingan dan verifikasi didominasi oleh industri kecil yang mendapatkan fasilitasi dari pemerintah. Sementara permintaan layanan jasa dari industri menengah dan industri besar masih sangat kurang.
- Sebaran industri di wilayah Kalimantan Timur yang sangat beragam pada sektor pertambangan, perkebunan, perhotelan, rumah sakit, dll, dimana belum sepenuhnya dapat dijangkau secara merata dan masih belum terfasilitasi dengan layanan BSPJI Samarinda serta keterbatasan waktu dan sumber daya manusia pada kegiatan kunjungan dan penjajakan kerjasama.
- Meskipun telah dilakukan promosi melalui 702 konten media sosial, ketercapaian layanan belum merata pada semua jenis jasa. Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan promosi konten pada media sosial belum sepenuhnya efektif untuk menjangkau target sasaran industri secara lebih luas.

c) Tindak Lanjut

- Diperlukan kajian terhadap proses bisnis pada layanan pengujian dan kalibrasi terkait kebutuhan pengujian dan kalibrasi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan sehingga dapat meningkatkan jumlah sampel. Selain itu, perlu untuk mempererat Kerjasama dengan pihak terkait pengelolaan lingkungan seperti DLH dan KLHK sehingga dapat diperoleh informasi terkait pengelolaan lingkungan dengan lebih mudah
- Monitoring secara berkala terkait konten promosi yang disiapkan pada sosial media.
- Melakukan optimalisasi promosi layanan dengan memperluas jangkauan promosi, baik secara daring melalui media sosial maupun luring melalui audiensi langsung dengan industri potensial. Serta mengatur efisiensi penggunaan SDM dan anggaran dengan melakukan perencanaan jadwal kunjungan secara lebih terintegrasi, misalnya dengan menggabungkan beberapa agenda promosi dalam satu perjalanan dinas.
- Melakukan peningkatan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dan stakeholder dalam rangka pengembangan kapasitas dan kemampuan pelayanan jasa kepada pelanggan. Selain itu, perlu dilakukan pembentukan tim riset dan pengembangan lingkup layanan disesuaikan dengan kepentingan pelanggan.

3) Indikator Kinerja 3 : Nilai *Revenue on Asset* (RoA)

Revenue on Asset (RoA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap unit aset yang dimiliki.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan IV TA. 2025 target fisik dari indikator ini 100% dengan realisasi 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan IV adalah :

1. Penyampaian laporan pengelolaan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang berasal dari pemanfaatan BMN kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) disampaikan setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan ini mencakup rincian pendapatan yang diperoleh dari berbagai bentuk pemanfaatan BMN, seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, maupun bentuk lainnya yang sah.
2. Pada triwulan IV tahun 2025, BSPJI Samarinda melaksanakan kegiatan lanjutan pengadaan meubelair dan inventaris kantor lainnya. Pada bulan Oktober telah dilakukan survei kebutuhan dan survei harga sebagai dasar dalam penentuan spesifikasi serta estimasi biaya pengadaan. Berdasarkan hasil survei tersebut, proses pengadaan meubelair dan inventaris kantor lainnya dilaksanakan pada awal bulan Desember.
3. Sepanjang Triwulan IV Tahun 2025, BSPJI Samarinda telah melaksanakan penyelesaian to do list penatausahaan BMN pada triwulan III tahun 2025. Penyelesaian to do list tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi sehingga BMN yang dihasilkan menjadi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pengusulan Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas pengadaan BMN Semester II belum dapat dilaksanakan hingga akhir bulan desember, mengingat proses pengadaan BMN masih berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, sampai dengan bulan Desember kegiatan yang dilakukan baru sebatas inventarisasi dan pengumpulan data BMN hasil pengadaan untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi. Pengusulan PSP direncanakan akan dilaksanakan pada awal bulan Januari Tahun 2026, setelah seluruh proses pengadaan BMN Semester II selesai dan data pendukung dinyatakan lengkap.

Dari kegiatan yang telah dilakukan sepanjang Triwulan IV, dilakukan perhitungan *Nilai Revenue on Asset* (RoA) dengan hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Revenue on Asset (RoA)} &= (\text{PNBP Layanan Jasa} / \text{Total Nilai Aset}) \times 100\% \\ &= (6.781.819.885 / 39.721.881.408) \times 100\% = \mathbf{17,07\%}\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh nilai RoA pada Triwulan IV sebesar 17,07 % dari target 8,10% atau tercapai sebesar 210,74%.

b) Kendala

Tidak ditemukan kendala.

c) Tindak Lanjut

-

4) Indikator ke 4 : Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)

Rasio POBO digunakan dalam mengukur kemandirian UPT atas operasional layanannya dari beban operasional yang telah dikeluarkan untuk layanan publik, sering disebut juga sebagai rasio kemandirian UPT.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan IV TA. 2025 target fisik dari indikator ini 100 % dengan realisasi 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan IV meliputi:

- Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBP BLU
- Pengajuan pengesahan penerimaan dan penggunaan anggaran PNBP BLU, dengan rincian:
 - Periode Oktober diajukan pada tanggal 30 Oktober 2025 dengan No SP2D 250460000000058
 - Periode November diajukan pada tanggal 26 Nopember 2025 dengan No SP2D 250460000000063
 - Periode Desember diajukan pada tanggal 15 Desember 2025 dengan No SP2D 250460000000068 dan tanggal 31 Desember 2025 dengan No SP2D 254600000000001

Perhitungan POBO dilakukan berdasarkan data LO (Laporan Keuangan) dengan hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{POBO} &= \frac{\text{Realisasi Pendapatan BLU}}{\text{Belanja Operasional BLU \& RM (kecuali Belanja Modal)}} \times 100\% \\ \text{POBO} &= \frac{6,931,777,685}{14,646,475,158} \times 100\% \\ \text{POBO} &= 47,33\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh nilai POBO pada Triwulan IV sebesar 47,33% dari target 41,50% atau telah tercapai sebesar 114,05%.

b) Kendala

Tidak ada kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini.

c) Tindak Lanjut

Melakukan pengesahan penerimaan dan belanja secara tepat waktu setiap bulannya.

SK 3 : Terwujudnya SDM Profesional

Tabel 18. Capaian Kinerja SK 3

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
4	Terwujudnya SDM Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	81,30	83,18	102,31%	100	100	B10: a) Evaluasi kebutuhan pelatihan dengan ketersediaan anggaran b) Revisi anggaran pengembangan kompetensi (bila diperlukan) B11: a) Update data pengembangan kompetensi pegawai pada Link yang dikeluarkan Biro OSDM b) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi terkait pengembangan layanan B12: Evaluasi hasil penetapan nilai IP ASN Semester 2	B10: Evaluasi kebutuhan pelatihan dengan ketersediaan anggaran. B11: a) Update data pengembangan kompetensi pegawai pada Intranet Kementerian Perindustrian Menu SiPegi b) Pelaksanaan Workshop Penggunaan Aplikasi Coretax DJP pada Pelaporan SPT Tahunan pada tanggal 6 November 2025 dan diikuti seluruh pegawai. B12: a) In House Training Refreshment Teori dan Perhitungan Estimasi Ketidakpastian Pengujian dan Laboratorium pada tanggal 22 – 23 Desember 2025 dan diikuti 20 orang peserta b) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan In House Training yang telah dilaksanakan sampai dengan Desember 2025 c) Penyampaian Sertifikat In House Training kepada peserta d) Rekapitulasi Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah diikuti masing-masing pegawai

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

Indeks Profesionalitas ASN.

Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan IV TA. 2025 target fisik dari indikator ini 100% dengan realisasi 100%.

Pada triwulan IV telah dilaksanakan pelatihan teknis melalui kegiatan in house training dan pelatihan eksternal yakni:

- Workshop Penggunaan Aplikasi Coretax DJP pada Pelaporan SPT Tahunan pada tanggal 6 November 2025 dan diikuti seluruh pegawai.
- In House Training Refreshment Teori dan Perhitungan Estimasi Ketidakpastian Pengujian dan Laboratorium pada tanggal 22 – 23 Desember 2025 dan diikuti 20 orang peserta.

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian nilai IP ASN pada triwulan IV berjalan dengan baik, dimana sampai akhir triwulan IV realisasi dari target antara telah tercapai. Adapun sampai Triwulan IV telah dilaksanakan pelatihan internal (in house training) di BSPJI Samarinda sebanyak 14 (empat belas) kegiatan. Pada akhir triwulan IV juga telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan in house training yang telah terselenggara sampai bulan Desember 2025.

Biro OSDM menyampaikan nilai IP ASN BSPJI Samarinda per tanggal 16 Juni 2025 pada Intranet dengan nilai:

- Kualifikasi : 22,74
- Kompetensi : 30,64
- Kinerja : 25,19
- Disiplin : 5,00
- Total : **83,18**

Berdasarkan nilai IP ASN tersebut, BSPJI Samarinda telah memenuhi target Perjanjian Kinerja sebesar 82,54 dengan capaian sebesar 100,27%.

b) Kendala

Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi dalam rangka pencapaian IP ASN dapat dilaksanakan dengan baik. Adanya blokir anggaran mengakibatkan kegiatan peningkatan potensi SDM melalui pelaksanaan *capacity building* tidak dapat diselenggarakan. Selanjutnya, keterbatasan anggaran mengakibatkan perlu dilakukan seleksi terhadap pengajuan kegiatan pelatihan/ pengembangan kompetensi dengan mempertimbangkan urgensi dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

c) Tindak Lanjut

Dalam menindaklanjuti kondisi keterbatasan anggaran pada pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, maka setiap pegawai diarahkan untuk dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara online yang dapat diikuti secara gratis. Hal ini juga dapat menjadi solusi agar kesempatan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi dapat lebih merata keseluruh pegawai.

SK 4 : Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik

Tabel 19. Capaian Kinerja SK 4

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00	20,00	100%	100	100	B10: Melakukan pengujian pengembangan aplikasi SILABISA B11: Melakukan Implementasi pengembangan aplikasi SILABISA B12: Kegiatan Selesai	B10: Melaksanakan proses integrasi SILABISA dengan SIPPT melalui pengembangan Modul API Client di SILABISA B11: Melaksanakan proses integrasi SILABISA dengan SIPPT melalui pengembangan Modul API Client di SILABISA B12: Melaksanakan proses integrasi SILABISA dengan SIPPT melalui pengembangan Modul API Client di SILABISA
		Tingkat Penerapan SPBE	77,00	87,19	113,23%	100	100	B10: Membuat data dukung LKE SPBE B11: Membuat data dukung LKE SPBE B12: Membuat data dukung LKE SPBE	B10: a) Membuat dokumen revidi sesuai indikator Tata Kelola SPBE b) Membuat dokumen revidi sesuai indikator Manajemen SPBE c) Membuat dokumen revidi sesuai indikator Layanan SPBE d) Rapat Konsultasi Pembangunan SPBE

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
									e) Rapat pembahasan indikator Tingkat penerapan SPBE B11: a) Membuat dokumen revidi sesuai indikator Tata Kelola SPBE b) Membuat dokumen revidi sesuai indikator Manajemen SPBE c) Membuat dokumen revidi sesuai indikator Layanan SPBE d) Rapat Konsultasi Pembangunan SPBE e) Rapat pembahasan indikator Tingkat penerapan SPBE B12: a) Memperbaiki dokumen revidi sesuai indikator Tata Kelola SPBE b) Memperbaiki dokumen revidi sesuai indikator Manajemen SPBE c) Memperbaiki dokumen revidi sesuai indikator Layanan SPBE.
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,51	4,73	104,88%	100	100	B10: a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan B11: a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update	B10: a) Melakukan review dan evaluasi internal standar pelayanan dan penerapan sistem diskon layanan b) Pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan terhadap sarana serta prasarana layanan publik. c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update melalui sosmed resmi d) Melakukan perbaikan dan pengembangan sistem survey kepuasan melalui aplikasi SIL. B11: a) Menyediakan sistem informasi layanan berupa booklet dan flyer layanan di ruang konsultasi dan front office. b) Diklat SDM Kehumasan sebagai penguatan kompetensi peningkatan kualitas pelayanan publik. c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update pada media sosial resmi. d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan melalui

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan B12: a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	nomor customer service, media sosial, dan website resmi. B12: a) Melakukan evaluasi sarana dan prasarana pelayanan publik b) Melakukan publikasi layanan publik melalui media cetak dan media sosial dengan bekerjasama pihak ketiga c) Melakukan sosialisasi dalam forum konsultasi publik dengan 4 unsur masyarakat dan stakeholder terkait. d) Melakukan evaluasi hasil survey indeks kepuasan masyarakat.

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

1) Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI

Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan IV TA. 2025 target fisik dari indikator ini 100% dengan realisasi 100%.

BSPJI Samarinda melaksanakan integrasi sistem SILABISA dengan aplikasi SIPPTBSKJI (<https://sipptbskji.kemenperin.go.id/nasional>) dalam rangka penyediaan data terbaru terkait layanan jasa industri. Data yang di integrasikan meliputi jumlah order, jumlah sampel, nilai pendapatan PNB/BLU dan jumlah pengguna jasa. Dengan terintegrasinya data tersebut, dashboard SIPPT BSKJI dapat menampilkan capaian UPT secara realtime.

Integrasi SILABISA dengan SIPPT pada tahun 2025 direncanakan mencakup 2 layanan yaitu layanan Pengujian dan layanan Kalibrasi. Hingga triwulan IV progres kegiatan integrasi telah selesai dilakukan dengan hasil integrasi berupa 3 layanan yang telah terintegrasikan yaitu layanan pengujian, kalibrasi dan pelatihan.

Pada tahun 2025, BSPJI Samarinda memiliki 9 layanan jasa Industri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20. Layanan Jasa BSPJI Samarinda

No	Jenis Layanan	Data Terintegrasi Sistem Informasi BSKJI	Ket.
1.	Pengujian	v	Selesai integrasi
2.	Kalibrasi	x	Proses integrasi
3.	Sertifikasi Produk	x	
4.	Pemeriksaan Halal	x	
5.	Pelatihan	x	Proses integrasi
6.	Konsultasi	x	
7.	Verifikasi TKDN	x	
8.	Penggunaan SDM	x	
9.	Penggunaan Aset	x	

Berdasarkan rencana tahapan integrasi SILABISA dan SIPPT BSKJI, proses integrasi layanan pengujian telah mencapai 100%. Informasi ini disampaikan melalui Nota Dinas BSKJI Nomor: 5684/BSKJI.1/LP/XXI/2025 tentang Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Layanan Publik Satker UPT BSKJI Triwulan III 2025.

Tabel 21. Layanan Jasa BSPJI Samarinda

No.	Tahapan	Bobot	Progres	Capaian
1.	Analisis Kebutuhan dan Mapping Layanan	10%	100%	10%
2.	Desain Arsitektur Integrasi	25%	100%	25%
3.	Pendaftaran dan Autentikasi API	15%	100%	15%
4.	Pengembangan Modul API Client di SILABISA	30%	100%	30%
5.	Pengujian Integrasi	10%	100%	10%
6.	Implementasi dan Monitoring	10%	100%	10%
	Total			100%

BSPJI Samarinda memiliki 9 layanan jasa, sementara hanya 5 layanan jasa saja yang perlu diintegrasikan dengan BSKJI. Berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan maka diperoleh persentase jenis layanan yang terintegrasi sebagai berikut:

$$\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{\text{Jumlah jenis layanan yang terintegrasi pada tahun ke-n}}{\text{Jumlah Total Layanan (yang wajib diintegrasikan)}} \times 100\%$$

$$\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{1}{5} \times 100\%$$

$$\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{1}{5} \times 100\%$$

$$\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = 20 \%$$

Dari perhitungan BSPJI Samarinda telah mencapai 20% dari terget 20% dengan capaian sebesar 100%.

b) Kendala

Proses integrasi data pada aplikasi SIPPT BSKJI masih bergantung pada jasa pihak ketiga dan infrastruktur IT belum maksimal sehingga berpotensi menimbulkan kendala teknis, keterlambatan, serta keterbatasan fleksibilitas dalam pengembangan dan pengelolaan sistem.

c) Tindak Lanjut

Melakukan monitoring dan koordinasi intensif dengan BSKJI terkait standar data dan prosedur integrasi agar tidak terjadi pengulangan proses.

2) Tingkat Penerapan SPBE

Penerapan (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) SPBE pada masing-masing Satuan Kerja.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan IV TA. 2025 target fisik dari indikator ini 100% dengan realisasi 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan IV adalah :

1. Mengikuti rapat konsultasi pengembangan aplikasi dan reviu LKE (tgl 17 November 2025)
2. Mengikuti rapat dengan Pusdatin terkait Penyampaian Informasi Nilai Sementara Perkin SPBE Tahun 2025 dan Penyampaian Informasi Pelaksanaan Klarifikasi dan Perbaikan Data Dukung LKE SPBE Tahun 2025 (tgl 22 Desember 2025)
3. Mengikuti rapat dengan pusdatin terkait klarifikasi dan perbaikan data dukung LKE SPBE Tahun 2025 (tgl 24 Desember 2025)
4. Membuat dokumen reviu sesuai indikator Tata Kelola SPBE
5. Membuat dokumen reviu sesuai indikator Manajemen SPBE
6. Membuat dokumen reviu sesuai indikator Layanan SPBE
7. Memperbaiki dokumen reviu sesuai indikator Tata Kelola SPBE
8. Memperbaiki dokumen reviu sesuai indikator Manajemen SPBE
9. Memperbaiki dokumen reviu sesuai indikator Layanan SPBE.

Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Pusat Data dan Informasi Nomor 2/SJ-IND.7/TIK/I/2026 tanggal 2 Januari 2026, BSPJI Samarinda memperoleh nilai 87,19 sehingga tercapai 113,23% dari target 77%. Seluruh dokumen pendukung diunggah pada aplikasi: <https://lemon.kemenperin.go.id/>.

Tabel 22. Kertas Kerja Perhitungan Indikator Kinerja

No.	Indikator	Bobot		Pemenuhan Data Dukung (Range 0 - 1)	Nilai
1	TATA KELOLA SPBE	100%	45%		30,94
	1 Reviu Arsitektur SPBE Kemenperin telah dilaksanakan	8%		1	8,00
	2 Reviu Peta Rencana SPBE Kemenperin telah dilaksanakan	8%		1	8,00
	3 Konsultasi Rencana dan Anggaran SPBE dengan Pusdatin telah dilakukan	15%		0,95	14,25
	4 Reviu Rencana dan Anggaran SPBE telah dilaksanakan	4%		1	4,00
	5 Reviu inovasi proses bisnis telah dilaksanakan	3%		1	3,00
	6 Proses pembangunan Aplikasi SPBE telah dikonsultasikan kepada Pusdatin	15%		0,3	4,50
	7 Pembangunan Aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai dengan siklus pembangunan aplikasi	20%		1	20,00
	8 Reviu pembangunan aplikasi SPBE telah dilaksanakan	7%		0	0,00
	9 Reviu layanan Pusat Data Kemenperin dan Layanan Pusat Data Pemerintah	7%		1	7,00
	10 Reviu tugas dan program kerja Tim Koordinasi SPBE Kemenperin	7%		0	0,00
	11 Reviu pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan	6%		0	0,00
2	MANAJEMEN SPBE	100%	25%		25,00
	12 Reviu Manajemen Data SPBE telah dilaksanakan	20%		1	20,00
	13 Reviu Manajemen Keamanan Informasi SPBE telah dilaksanakan	20%		1	20,00
	14 Reviu Manajemen Risiko SPBE telah dilaksanakan	10%		1	10,00
	15 Reviu Manajemen Aset TIK (SPBE) telah dilaksanakan	10%		1	10,00
	16 Reviu Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE telah dilaksanakan	10%		1	10,00
	17 Reviu Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan	5%		1	5,00
	18 Reviu Manajemen Perubahan SPBE telah dilaksanakan	10%		1	10,00
	19 Reviu Manajemen Layanan SPBE telah dilaksanakan	15%		1	15,00
3	LAYANAN SPBE	100%	30%		30
	20 Reviu Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik telah dilaksanakan	20%			26,25
	21 Reviu Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik telah dilaksanakan	25%		1	20,00
	22 Reviu Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik telah dilaksanakan	25%		1	25,00
	23 Reviu Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik	30%		0,5	12,50
Nilai					82,19
Nilai Akhir (+5)					87,19

b) Kendala

Kurangnya kemampuan SDM dalam memenuhi data dukung dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

c) Tindak Lanjut

Koordinasi dengan Pusdatin Kemenperin untuk diberikan penjelasan lebih lanjut dalam rangka pemenuhan kertas kerja SPBE yang belum dapat dilaksanakan.

3) Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan IV TA. 2025 target fisik dari indikator ini 100 % dengan realisasi 100%

Sampai dengan akhir Triwulan IV, telah dilaksanakan berbagai kegiatan pendukung secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi review dan evaluasi internal terhadap standar pelayanan serta penerapan sistem diskon layanan guna memastikan kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan pengguna jasa. Selain itu, dilakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan terhadap sarana dan prasarana pelayanan publik, khususnya pencahayaan dan fasilitas pendingin ruangan, guna menjaga kenyamanan dan kelancaran pelayanan. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik berupa ruang laktasi dan ruang bermain anak untuk memastikan kelayakan dan fungsinya.

Selanjutnya telah dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelayan publik melalui keikutsertaan petugas pelayanan dalam pendidikan dan pelatihan bidang kehumasan. Dalam rangka memastikan kelancaran komunikasi dua arah, tersedia sarana konsultasi dan pengaduan masyarakat melalui nomor layanan pelanggan, media sosial resmi, dan website resmi. Publikasi layanan publik juga dilaksanakan melalui media cetak dan media sosial dengan melibatkan kerja sama pihak ketiga, serta sosialisasi layanan melalui forum konsultasi publik yang melibatkan unsur masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Sebagai upaya peningkatan akses informasi diwujudkan melalui penyediaan sistem informasi pelayanan publik yang diperbarui secara berkala melalui media sosial resmi, serta disediakan media informasi layanan berupa booklet dan flyer yang ditempatkan di ruang konsultasi dan front office sebagai sarana edukasi bagi masyarakat.

Selain itu dilakukan juga pengembangan dan perbaikan sistem survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi Sistem Informasi Laboratorium (SIL) untuk mendukung evaluasi kinerja pelayanan secara objektif. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai dasar perumusan rencana tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik

Hasil perhitungan indeks pelayanan publik sampai dengan triwulan IV tahun 2025 diperoleh dari penilaian indikator berdasarkan pedoman Permenpan No.5 tahun 2023 , sebagai berikut:

Tabel 23. Aspek Penilaian Indeks Pelayanan Publik

No	Aspek	Indeks Aspek	Bobot Aspek	Indeks Pelayanan Publik
1	Kebijakan Pelayanan	4,34	24%	1,04
2	Profesionalisme SDM	4,90	25%	1,23
3	Sarana dan Prasarana	5,00	18%	0,90
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	5,00	11%	0,55
5	Konsultasi dan Pengaduan	4,70	10%	0,47
6	Inovasi	4,50	12%	0,54
Nilai Indeks Pelayanan Publik				4,73

Berdasarkan hasil penilaian pada Triwulan IV, nilai Indeks Pelayanan Publik yang telah dicapai adalah 4,73. Nilai ini telah memenuhi kriteria kategori “A” yang bermakna “Pelayanan Prima”. Nilai tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 4,51 dengan capaian sebesar 104,88%.

b) Kendala

Adapun kendala yang dialami pada Triwulan IV, diantaranya:

- Berdasarkan hasil penilaian, aspek Kebijakan Pelayanan memperoleh nilai indeks terendah. Hal ini disebabkan karena pada saat penilaian PEKPPP dilakukan, belum dilaksanakannya kegiatan peninjauan ulang standar pelayanan periode tahun 2025 dengan melibatkan 5 unsur masyarakat karena dijadwalkan dilaksanakan pada bulan desember 2025.
- Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana masih bersifat pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan, belum sampai pada peningkatan kualitas sarana/prasarana secara signifikan. Hal ini dapat berpotensi menghambat upaya peningkatan standar layanan dalam jangka panjang.

c) Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan peningkatan dalam Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik serta diharapkan adanya peningkatan pelayanan publik terutama pada aspek Kebijakan Pelayanan sehingga dapat meningkatkan nilai indeks pelayanan publik

SK 5 : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Tabel 24. Capaian Kinerja SK 5

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
6	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	60,00	100	166,67%	100	100	B10: Kegiatan selesai B11: Kegiatan selesai B12: Kegiatan selesai	B10: Kegiatan selesai B11: Kegiatan selesai B12: Kegiatan selesai
		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	94,98	100	105,29%	100	100	B10: a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Melaksanakan pemberkasan arsip aktif B11: a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Melaksanakan penyimpanan arsip aktif B12: a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Membuat daftar arsip kegiatan per 6 bulan (Juli-Desember) c) Melaksanakan Pemindahan arsip dari unit pengolahan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip mewakili fungsi satker d) Membuat berita acara pemindahan arsip	B10: Melakukan penyeleksian arsip inaktif yang di musnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip B11: Membuat daftar arsip usul musnah dan daftar isi berkas berdasarkan Kode Klasifikasi dan Jadwal Retensi Arsip B12: Melakukan Penyeleksian arsip bernilai guna dan membuat daftar arsip usul serah berdasarkan Jadwal Retensi Arsip

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

1) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan IV TA. 2025 target fisik dari indikator ini 100% dengan realisasi 100%.

Pelaksanaan audit kinerja oleh Tim Auditor Inspektorat IV untuk kegiatan TA. 2024 dilakukan mulai tanggal 16 Januari s.d 31 Januari 2025. Pada triwulan sebelumnya telah diterima surat balasan atas penyampaian tindak lanjut hasil audit dari Sekretariat Itjen dengan Nomor: R/ 137/IJ-IND/PW/IX/2025 tanggal 09 September 2025 dengan *pernyataan "Adapun temuan hasil pemeriksaan tersebut sebanyak 7 (tujuh) temuan dan 17 (tujuh belas) saran pada Tahun Anggaran 2024, seluruhnya telah ditindaklanjuti dan kami dapat menyatakan selesai sesuai dengan lingkup program dan keuangan yang telah diaudit"*

Selanjutnya, adapun rekapitulasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal BSPJI Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan

Tahun				
2015 – 2023 (C)		2024 (B)		
Saldo Temuan	% Penyelesaian Hasil Temuan	Hasil Temuan	Rekomendasi "SR"	% Penyelesaian Hasil Temuan
0	100%	7	7	100%

Berdasarkan data tersebut, maka realisasi target dari indikator *"rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker"* adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} A &= (B+C)/2 \\ &= (100\% + 100\%)/2 \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh realisasi rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker sebesar 100% dari target 60% dengan capaian 166,67%.

b) Kendala

Tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaannya

c) Tindak Lanjut

-

2) Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)

Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan) pada masing-masing Satuan Kerja.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan IV TA. 2025 target fisik dari indikator ini 100% dengan realisasi 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan IV adalah:

1. Melaksanakan kegiatan penyeleksian arsip inaktif
2. Menginput daftar arsip dan daftar isi berkas arsip usul musnah
3. Penyerahan arsip statis

Tabel 26. Daftar Arsip

No	Kode	Uraian Informasi	Tahun	Jumlah	Akses Arsip	Retensi		Nasib Akhir
						Aktif	Inaktif	
Daftar Arsip Inaktif yang Akan Dimusnahkan								
1.	MS.08	Surat Tanda Uji Baristand Industri Samarinda	2016 - 2019	1 Berkas	Biasa	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
Daftar Arsip Usul Serah								
1.	MS.08	Berkas Sertifikat Paten Alat Pembuat Kacang Goyang	2015	1 Berkas	Asli	1 Tahun	5 Tahun	Permanen
2.	MS.08	Berkas Sertifikat Paten Alat Penggoreng Kerupuk Amplang Mekanis	2017	1 Berkas	Asli	1 Tahun	5 Tahun	Permanen
3.	MS.08	Laporan Akuntabilitas Kinerja BSPJI Samarinda 2014	2014	1 Berkas	Asli	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
4.	MS.08	Laporan Akuntabilitas Kinerja BSPJI Samarinda 2015	2015	1 Berkas	Asli	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
5.	MS.08	Laporan Akuntabilitas Kinerja BSPJI Samarinda 2016	2016	1 Berkas	Asli	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
No	Kode	Uraian Informasi	Tahun	Jumlah	Tingkat Perkembangan		Keterangan	
Daftar Arsip Usul Musnah								
1	MS.08	Surat Tanda Uji Baristand Industri Samarinda	2016	1 Berkas	Asli		Kondisi baik	
2	MS.08	Surat Tanda Uji Baristand Industri Samarinda	2017	1 Berkas	Asli		Kondisi baik	
3	MS.08	Surat Tanda Uji Baristand Industri Samarinda	2018	1 Berkas	Asli		Kondisi baik	
4	MS.08	Surat Tanda Uji Baristand Industri Samarinda	2019	1 Berkas	Asli		Kondisi baik	

Pada triwulan ke IV telah dilakukan pengawasan kearsipan oleh Biro Umum dan telah diperoleh hasil penilaian pengawasan kearsipan internal pada Unit Kearsipan. Dari hasil penilaian diperoleh Nilai Unit Kearsipan sebesar 100 dengan capaian 105,29% terhadap target sebesar 94,98.

b) Kendala

Tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaannya.

c) Tindak Lanjut

-

SK 6 : Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi

Tabel 27. Capaian Kinerja SK 6

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi Terwujudnya akuntabilitas organisasi	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	80,45	85,40	106,09%	100	100	B10: a) Penyusunan Laporan PP 39 TW 3 b) Penyusunan RBA Indikatif TA.2027 B11: a) Penyusunan TRPNBP TA. 2027 b) Rapat Monev TW 4 B12: a) Penyusunan Renja TA. 2026 b) Pelaporan Monev BAPPENAS c) Penyusunan Laporan PP 39 TW 4	B10: a) Penyusunan Laporan PP 39 TW 3 b) Penyusunan RBA Definitif TA. 2026 dan RBA Indikatif TA.2027 B11: a) Penyusunan TRPNBP TA. 2027 b) Rapat Monev TW 4 B12: a) Penyusunan Renja TA. 2026 b) Pelaporan Monev BAPPENAS c) Penyusunan Laporan PP 39 TW 4
		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,18			100	100	B10: a) Pelaporan CAPUT September b) Revisi DIPA TW 4 Pemutakhiran RPD (maks 10 Oktober) c) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Oktober d) Pengajuan GUP Oktober B11: a) Pelaporan CAPUT Oktober b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja November c) Pengajuan TUP d) Pengajuan GUP November B12: a) Pelaporan CAPUT November b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Desember c) GUP/TUP Nihil d) Monev Penyerapan Anggaran TW 4	B10: a) Pelaporan Caput September 2025 dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2025 b) Pengajuan Usulan Revisi Pemutakhiran Hal III dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2025 dan disahkan melalui DIPA ke 16 tanggal 13 Oktober 2025 c) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBPN BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 30 Oktober 2025 B11: a) Pelaporan Caput Oktober 2025 dilakukan pada tanggal 4 November 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBPN BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 26 November 2025 B12: a) Pelaporan Caput November 2025 dilakukan pada tanggal 4 Desember 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBPN BLU pada tanggal 15 dan 31 Desember 2025 c) Pengajuan TUP pada tanggal 4 Desember 2025 dan pengajuan GUP Nihil pada tanggal 22 Desember 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75,00	92,00	122,67%	100	100	B10: a) Monev capaian realisasi anggaran dan kegiatan Triwulan IV B11: a) Update data persediaan dan penyusunan laporan B12: a) Penyelesaian pelaporan keuangan bendahara (GU, Pengesahan, LPJ, dll)	B10: a) Monev tanggal 3 Oktober 2025 b) Melakukan tutup buku pada aplikasi Sakti utuk periode oktober c) Penyampaian rekonsiliasi triwulan III ke KPPN dan Kanwil d) Pengajuan Penetapan Status Penggunaan (PSP) untuk pengadaan semester 1 2025 B11: a) Melakukan tutup buku pada aplikasi Sakti utuk periode November B12: a) Melakukan tutup buku pada aplikasi Sakti utuk periode desember b) Pengajuan TUP pada tanggal 4 Desember 2025 dan pengajuan GUP Nihil pada tanggal 22 Desember 2025

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

1) Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker

Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan IV TA. 2025 target fisik dari indikator ini 100% dengan realisasi 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan IV adalah:

- Penyusunan Laporan PP 39 TW 3 dilaksanakan dan dikirimkan ke BSKJI tanggal 7 Oktober 2025.

- Finalisasi draft Renstra 2025-2029 telah dilaksanakan tanggal 28-29 November 2025.
- Penyusunan dan finalisasi RBA Definitif TA. 2026 dan RBA Indikatif TA.2027.
- Reviu RBA indikatif TA. 2027 tanggal 18 Desember 2025.
- Penyusunan Proposal PNBPN dan reviu TRPNBP tanggal 11 Desember 2025.
- Penyusunan Renja TA. 2026.
- Rapat Monev tanggal 3 Oktober 2025.
- Rapat Tinjauan Manajemen tanggal 30 Desember 2025 dilaksanakan sebagai rapat monev.
- Pelaporan Monev BAPPENAS.

Berdasarkan kegiatan tersebut, rencana aksi dan target fisik telah berhasil dilaksanakan. Selain pelaksanaan kegiatan yang mendukung akuntabilitas kinerja, dilakukan pula upaya persiapan penilaian SAKIP di tahun 2026 melalui self asesmen pemenuhan LKE AKIP dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 28. Self Asesmen penilaian SAKIP

No	Komponen	Sub Komponen	Kriteria	Kegiatan yang dilaksanakan/ Dokumen yang disusun
1	Perencanaan Kinerja	1. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	1. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.	SOP Penyusunan Renstra, Renkin, Perjakin, TPNBP, RKAKL
			2. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.	Penyusunan konsep Renstra 2025-2029
			3. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.	Rencana Kinerja 2025, Rencana Kerja 2025
			4. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.	Perjanjian Kinerja 2025
			5. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.	Rencana Aksi 2025
			6. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.	Penyusunan KAK RAB TA.2026
			7. Setiap unit satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja	Draft Renstra, Renkin, Perjakin, TPNBP
		2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.	Seluruh dokumen perencanaan telah ditandatangani pimpinan dan diberi stempel
			2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.	Seluruh dokumen perencanaan telah dipublikasikan di website
			3. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.	Konsep Renstra dan Perjanjian Kinerja 2025
			4. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	Konsep Renstra dan Perjanjian Kinerja 2025

No	Komponen	Sub Komponen	Kriteria	Kegiatan yang dilaksanakan/ Dokumen yang disusun
			5. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.	Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra BSKJI
			6. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 (satu) periode Perencanaan Strategis).	Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra BSKJI
			7. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.	Target kinerja ditetapkan sesuai dengan histori pencapaian periode sebelumnya
			8. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).	Cascading SKP dari Perjanjian Kinerja Kepala Balai dalam bentuk Matrik Peran Hasil
			9. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan <i>Crosscutting</i>).	Matrik Crosscutting
			10. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	Penyusunan SKP seluruh pegawai
		3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.	1. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.	KAK dan RAB, serta Matrik Keterkaitan kinerja dan anggaran
			2. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	Rencana Aksi 2025
			3. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .	Perjanjian Kinerja 2025
			4. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.	Pengukuran Rencana Aksi per bulan, Pelaporan Rencana Aksi per triwulan
			5. Terdapat perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.	Revisi SOP, Reviu Renstra, Revisi DIPA.
			6. Terdapat perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/ hasil yang lebih baik.	Revisi SOP, Reviu Renstra, Revisi DIPA.
			7. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen	Rapat Kick Off dan Rapat Kerja

No	Komponen	Sub Komponen	Kriteria	Kegiatan yang dilaksanakan/ Dokumen yang disusun
			dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	
			8. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	SKP Seluruh pegawai, Rapat Kick Off yang dihadiri seluruh pegawai
2.	Pengukuran Kinerja	1. Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan.	1. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.	SOP Pengumpulan Data Kinerja
			2. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.	Pedoman Kinerja di dalam Renstra
			3. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.	SOP Pengumpulan Data Kinerja
		2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara fektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (<i>Decision Maker</i>) dalam mengukur capaian kinerja.	Dokumentasi Rapat Kerja dan Rapat Kick Off
			4. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	Pengukuran kinerja TW 1 melalui SILABISA
			5. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	Pengukuran kinerja TW 1 melalui SILABISA
			6. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.	Pengukuran kinerja TW 1 melalui SILABISA
			7. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.	SKP Per Triwulan, Laporan PP 39 per Triwulan
			8. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Pedoman Pengukuran Kinerja SILABISA
			9. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Pedoman Pengukuran Kinerja SILABISA
		3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward and Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.	1. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan tunjangan kinerja/ penghasilan).	Rekap Belanja Pegawai
			2. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.	Pengukuran Kinerja sampai dengan TW3
			3. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (<i>Refocusing</i>) Organisasi.	Pengukuran Kinerja sampai dengan TW3
			4. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.	Dokumentasi Rapat Kerja, Rapat Kick Off dihadiri ketua tim dan/ atau seluruh pegawai yang memuat hasil pengukuran kinerja

No	Komponen	Sub Komponen	Kriteria	Kegiatan yang dilaksanakan/ Dokumen yang disusun
			5. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.	Dokumentasi Rapat Kerja, Rapat Kick Off dihadiri ketua tim dan/ atau seluruh pegawai yang memuat hasil pengukuran kinerja
			6. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.	Dokumentasi Rapat Kerja, Rapat Kick Off dihadiri ketua tim dan/ atau seluruh pegawai yang memuat hasil pengukuran kinerja
			7. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.	Nota Dinas Penyampaian efisiensi anggaran
			8. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	Nota Dinas Penyampaian efisiensi anggaran
			9. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Dokumentasi Rapat Kerja, Rapat Kick Off dihadiri ketua tim dan/ atau seluruh pegawai yang memuat hasil pengukuran kinerja
			10. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Bahan Rapat Rapat Kick Off di sampaikan kepada seluruh pegawai melalui WA Grup.
3.	Pelaporan Kinerja	1. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	1. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.	Laporan Trwiulan (PP 39)
			2. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.	Laporan Trwiulan (PP 39)
			3. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.	Laporan Trwiulan (PP 39) dengan Surat Pengantar
			4. Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.	Penyusunan dan Reviu LAKIP
			5. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.	Penyusunan dan publikasi LAKIP
			6. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.	Laporan Trwiulan (PP 39) dengan Surat Pengantar disampaikan tepat waktu
		2. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.	1. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.	Penyusunan LAKIP
			2. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.	Penyusunan LAKIP
			3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.	Penyusunan LAKIP
			4. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	Penyusunan LAKIP

No	Komponen	Sub Komponen	Kriteria	Kegiatan yang dilaksanakan/ Dokumen yang disusun
			5. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Penyusunan LAKIP
			6. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	Penyusunan LAKIP
			7. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.	Penyusunan LAKIP
			8. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Penyusunan LAKIP
			9. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	Penyusunan LAKIP
		Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	1. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).	Penyusunan LAKIP
			2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.	Penyusunan LAKIP
			3. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	Penyusunan LAKIP
			4. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	Penyusunan LAKIP
			5. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	Penyusunan LAKIP
			6. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	Penyusunan LAKIP
			7. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Penyusunan LAKIP
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan Evaluasi.	1. Terdapat pedoman teknis Evaluasi AKIP Internal.	Keputusan Menteri Perindustrian No. 2181 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian

No	Komponen	Sub Komponen	Kriteria	Kegiatan yang dilaksanakan/ Dokumen yang disusun
			2. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja.	Telah dilaksanakan pada evaluasi SAKIP
			3. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	Telah dilaksanakan pada evaluasi SAKIP
		2. Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.	1. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan sesuai standar.	Telah dilaksanakan pada evaluasi SAKIP
			2. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.	Pemenuhan dokumen untuk evaluasi AKIP ditugaskan kepada bagian Program di Sub bagian TU
			3. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	Telah dilaksanakan pada evaluasi SAKIP
			4. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja.	Telah dilaksanakan pada evaluasi SAKIP
			5. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Telah dilaksanakan pada evaluasi SAKIP
		3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	1. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP internal telah ditindaklanjuti.	Telah ditindaklanjuti
			2. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal.	Telah ditindaklanjuti
			3. Hasil Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	Perbaikan dilakukan berdasarkan masukan tim penilai saat penilaian SAKIP.
			4. Hasil dari Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	Telah ditindaklanjuti
			5. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil Evaluasi AKIP internal.	Telah ditindaklanjuti

b) Kendala

Dalam pemenuhan dokumen untuk penilaian SAKIP telah diupayakan dengan maksimal.

c) Tindak Lanjut

-

2) Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan perencanaan anggaran kualitas anggaran.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan IV TA. 2025 target fisik dari indikator ini 100% dengan realisasi 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan IV meliputi pelaksanaan revisi DIPA Triwulan IV, pengesahan penerimaan dan belanja, penyusunan RPD, pelaporan CAPUT, pengajuan GUP, dan Monev Penyerapan Anggaran Triwulan IV. Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, diperoleh Nilai IKPA pada Triwulan II dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29. Rekapitulasi IKPA Triwulan IV

Bulan	Ket.	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM	Nilai Akhir
		Revisi DIPA	Deviasi Hal. III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
Okt	Nilai	100,00	83,47	90,37	100,00	100,00	0,00	100,00	67,52	70%	0,00	96,46
	Nilai Akhir	10,00	12,52	0,00	10,00	10,00	0,00	25,00				
Nov	Nilai	100,00	83,27	91,93	93,33	100,00	0,00	100,00	66,82	70%	0,00	95,46
	Nilai Akhir	10,00	12,43	0,00	9,33	10,00	0,00	25,00				
Des	Nilai	100,00	83,27	94,09	93,33	100,00	0,00	100,00	66,82	70%	0,00	95,46
	Nilai Akhir	10,00	12,49	0,00	9,33	10,00	0,00	25,00				

Dari tabel diatas, diperoleh capaian nilai IKPA Triwulan IV sebesar 95,46 dari target sebesar 94,18 dengan capaian 101,36%.

b) Kendala

Pelaksanaan anggaran belum dapat berjalan maksimal dikarenakan penerimaan PNBPN yang belum sesuai dengan target sehingga mempengaruhi realisasi belanja. Kondisi ini juga mengakibatkan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran sehingga berdampak pada pencapaian aspek “Deviasi Hal. III DIPA” dan “Penyerapan Anggaran”.

c) Tindak Lanjut

Perlu dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran agar dapat mengikuti perencanaan (RPD) sehingga dapat mempertahankan nilai “Deviasi Hal. III DIPA” yang tidak terlalu besar deviasinya. Selain itu, aspek “Penyerapan Anggaran” perlu diperhatikan agar lebih dimaksimalkan melalui penggunaan saldo BLU sambil menunggu penerimaan PNBPN.

3) Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan

Perolehan nilai minimal laporan keuangan menggunakan metodologi penilaian desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN berdasarkan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan IV TA. 2025 target fisik dari indikator ini adalah 100% dengan realisasi 100%.

Penilaian atas laporan keuangan untuk periode tahun 2024 telah selesai dilakukan sampai ditingkat Kementerian Perindustrian, dimana telah diperoleh hasil penilaian untuk seluruh satker yang disampaikan melalui Nota Dinas BSKJI Nomor 3970/BSKJI.1/KU/IX/2025 tanggal 18 September 2025. Adapun capaian target realisasi nilai laporan keuangan TA. 2024 telah mencapai target yakni sebesar 92,00 dari target 75,00 dengan capaian sebesar 122,67%.

b) Kendala

-

c) Tindak Lanjut

-

SK 7 : Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri

Tabel 30.Capaian Kinerja SK 7

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
8	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	80,00	87,62	109,53%	100	100	B10: Penyampaian laporan reviu pengadaan barang/ jasa Triwulan III & IV 2025 B11: Evaluasi capaian penggunaan TKD pada pengadaan barang/ jasa Semester II TA. 2025 B12: Evaluasi penyelesaian pengadaan barang/ jasa	B10: Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di bulan Oktober B11: a) Evaluasi data pengadaan barang/jasa pada Semester II TA 2025 untuk mengetahui tingkat pemenuhan dan persentase penggunaan TKDN. b) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di bulan November B12: a) Evaluasi penyelesaian paket pengadaan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan, ketepatan waktu, kepatuhan, serta kelengkapan administrasi b) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di bulan Desember

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan IV TA. 2025 target fisik dari indikator ini 100% dengan realisasi 100%

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan IV adalah Belanja Keperluan Perkantoran, Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi dan Belanja Jasa Lainnya.

Persentase penggunaan produk dalam negeri pada proses pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan akun belanja 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, dan 525115.

Dari akun tersebut sampai triwulan IV telah terealisasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31. Realisasi P3DN Akun Terpilih

No	Akun	Pagu	Realisasi P3DN (Rp)	Impor (Rp)	Total Realisasi	% RP3DN
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7 = (4/3x100%)
1	521211	16.200.000	15.979.551	-	15.979.551	98,64%
2	521811	39.849.000	39.730.050	-	39.730.050	99,70%
3	521111	210.252.000	210.237.540	-	210.237.540	99,99%
4	522191	234.964.000	234.964.000	-	234.964.000	100,00%
5	522111	329.523.000	329.421.131	-	329.421.131	99,97%
6	525112	532.210.000	427.543.739	-	427.543.739	80,33%
7	525113	1.702.505.000	1.374.627.277	-	1.374.627.277	80,74%
8	525115	2.018.854.000	1.822.355.207	-	1.822.355.207	90,27%
	Total	5.084.357.000	4.454.858.495	-	4.454.858.495	87,62%

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh capaian Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri sampai Triwulan IV sebesar 87,62% dari target 80% dengan capaian 109,53%.

Selanjutnya juga dilakukan perhitungan capaian Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri berdasarkan aplikasi LKPP melalui <https://data.inaproc.id> dengan rincian sebagai berikut:

- Total Perencanaan (Rp) : 9,151,385,000.00
- Total Perencanaan Penyedia (Rp) : 6,132,422,000.00
- Total Perencanaan PDN (Rp) : 5,567,572,000.00

- Total Pembayaran (Rp) : 7,320,388,502.00
- Total Pembayaran PDN (Rp) : 5,903,614,191.00
- Total Pembayaran Impor (Rp) : 1,416,774,311.00

$$RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotRA} \times 100\%$$

$$RP3DN = \frac{5,903,614,191.00}{7,320,388,502.00} \times 100\%$$

$$RP3DN = 80,65 \%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh capaian Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar 80,65% dari target 80% dengan capaian 100,81%.

b) Kendala

Tidak ada kendala.

c) Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan penggunaan produk dalam negeri pada proses pengadaan barang/jasa adalah melakukan peninjauan terhadap tingkat pencapaian penggunaan produk dalam negeri, mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi selama proses pengadaan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program P3DN ke depan, termasuk optimalisasi pemanfaatan e-Katalog, peningkatan kapasitas penyedia lokal, dan penyusunan strategi pengadaan yang mendukung peningkatan nilai TKDN secara berkelanjutan.

Rencana perbaikan selanjutnya adalah meningkatkan koordinasi dengan penyedia produk dalam negeri untuk memastikan ketersediaan barang/jasa yang memiliki nilai TKDN, memperkuat pemahaman dan komitmen seluruh pegawai terkait pentingnya penggunaan produk dalam negeri melalui sosialisasi dan bimbingan teknis, mengoptimalkan pemanfaatan e-Katalog dan sistem informasi TKDN dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, serta memperbaiki proses monitoring dan evaluasi agar pelaporan penggunaan produk dalam negeri lebih akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3.2 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Monitoring Rincian Output Bulanan

Kegiatan pada Triwulan IV TA 2025 terdiri dari kegiatan:

a. Kegiatan I Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri

RO	Pagu	Pagu Efektif	% Real. Keu	TVRO	RVRO	Prog	sd. TW 3		Oktober		November		Desember	
							RVRO	Prog	RVRO	Prog	RVRO	Prog	RVRO	Prog
AEC Kerja Sama														
Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	152,319	124,174	86.40%	5	5	100%	4	88.0%	0	9.0%	0	2.0%	1	1.0%
AEF Sosialisasi dan Diseminasi														
Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis	623,313	245,520	81.87%	500	549	100%	408	84.0%	48	9.0%	43	6.0%	50	1.0%
BAD Pelayanan Publik kepada Industri														
Jasa pelayanan teknis pengujian	1,704,016	1,704,016	95.75%	300	513	100%	281	86.7%	5	8.5%	12	3.0%	215	1.8%
Jasa pelayanan teknis kalibrasi	41,842	41,842	38.26%	29	19	100%	11	73.5%	2	10.5%	3	9.0%	3	7.0%
Jasa pelayanan teknis sertifikasi	460,317	370,755	90.11%	44	44	100%	15	70.5%	1	10.0%	18	10.0%	10	9.5%
Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri	179,050	179,050	98.58%	13	15	100%	11	85.0%	1	12.0%	0	2.0%	3	1.0%
BDI Fasilitas dan Pembinaan Industri														
Pemanfaatan Teknologi Industri	297,148	297,148	85.16%	10	17	100%	9	90.1%	0	4.0%	0	1.0%	8	4.9%
CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan														
Peralatan fasilitas laboratorium/ workshop/ layanan	2,007,500	1,341,592	74.84%	59	32	100%	29	74.5%	2	10.0%	0	12.0%	1	3.5%
Total EC	5.465.505	4.304.097	86.51%											

1) Hasil yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada kegiatan ini terdapat terdapat 5 (lima) Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) yang terdiri dari:

a. AEC. Kerja sama

Pada Triwulan IV, realisasi kegiatan kerjasama dilaksanakan melalui perjalanan dinas dalam rangka peninjauan kerja sama dengan industri ataupun perusahaan yang akan melakukan kerja sama dengan BSPJI Samarinda.

b. AEF. Sosialisasi dan Diseminasi

Pada KRO ini terdiri dari sub komponen Temu Pelanggan, Pameran, Webinar, Promosi dan Pemasaran Layanan, serta Unit Pelayanan Publik. Dalam rangka efisiensi belanja, pagu belanja dalam KRO ini sebagian besar diblokir dan menyisakan pagu hanya untuk mendukung kegiatan Promosi dan Pemasaran Layanan serta Unit Pelayanan Publik. Pada Triwulan IV, realiasi kegiatan dilaksanakan melalui pelaksanaan sosialisasi terkait layanan LPH Utama kepada pelanggan, belanja barang yang berupa pencetakan kalender, pencetakan *bookled*, pembuatan *souvenir*, dan pembuatan plakat yang diperlukan dalam pelaksanaan promosi dan pemasaran layanan ke industri/perusahaan yang berpotensi menjadi pengguna jasa layanan BSPJI Samarinda. Selain itu, juga terdapat realisasi terhadap kebutuhan terkait *Sosial Media Management*.

c. BAD. Pelayanan Publik kepada industri

Pada KRO ini terdiri dari Rincian Output yang mendukung pelaksanaan layanan jasa teknis yakni Layanan Pengujian, Layanan Kalibrasi, Layanan Sertifikasi, serta Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri. Adapun realiasi pada KRO ini diperoleh dari pelaksanaan kegiatan layanan-layanan jasa serta diperoleh melalui pelaksanaan uji profisiensi serta pengembangan kelembagaan sepanjang triwulan ini.

d. BDI. Fasilitas dan Pembinaan Industri

Pada Triwulan IV, realisasi kegiatan pada KRO ini dilaksanakan melalui pelaksanaan layanan Konsultasi dan Pembinaan Industri.

e. CAH. Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

Pada KRO Sarana Bidang Industri dan Perdagangan selama triwulan ini direalisasikan melalui pembelian alat laboratorium yakni *Testo Air Velocity and IAQ Measuring Instrument (CO CO2 meter ambien)*, *Genset QRV6500XSE-Silent Inverter Generator-PROQUIP*, *Bromine Checker*, *Logger Thermocouple*, dan *Flue Gas Analyzer*.

2) Kendala

Pada triwulan ini, adapun target yang ditetapkan oleh BSKJI adalah realisasi keuangan sebesar 93,50% dan capaian realisasi keuangan hanya sebesar 86,51%. Kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan pada triwulan ini adalah kondisi lambatnya progres penerimaan PNPB juga menghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama triwulan IV. Kondisi ini paling berdampak pada pengadaan alat laboratorium yang baru di akhir triwulan dapat direalisasikan, sementara kebutuhan akan alat ini cukup mendesak mengingat adanya pengembangan ruang lingkup serta kebutuhan akan peningkatan pada layanan pengujian yang merupakan layanan dengan proporsi jumlah penerimaan terbesar diantara layanan-layanan yang ada di BSPJI Samarinda. Selain itu, pada KRO Sosialisasi dan

Diseminasi Layanan Jasa Teknis juga mengalami penundaan pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan-kegiatan Temu Pelanggan, *Focus Group Discussion*, dan Pameran yang selama ini menjadi forum untuk berinteraksi dengan pelanggan tidak dapat dilaksanakan.

3) Rekomendasi

Dalam menindaklanjuti kondisi efisiensi belanja, BSPJI Samarinda telah menyusun skala prioritas kegiatan berdasarkan urgensi dan dampaknya, sehingga kegiatan yang paling krusial seperti layanan jasa tetap dapat berjalan meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran. Dalam menanggapi kondisi penerimaan PNBP yang belum sesuai dengan target, BSPJI Samarinda sebagai satuan kerja BLU, telah menggunakan Saldo BLU untuk menutupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sepanjang triwulan ini. Sepanjang tahun tetap diupayakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak diblokir sehingga pencapaian realisasi fisik tetap berjalan sambil menunggu proses penerimaan PNBP.

b. Kegiatan II Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri

RO	Pagu	Pagu Efektif	% Real. Keu	TVRO	RVRO	Prog.	sd. TW 3		Oktober		November		Desember	
							RVRO	Prog	RVRO	Prog	RVRO	Prog	RVRO	Prog
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal														
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	150,000	150,000	83.66%	1	1	100%	0	76.0%	0	9.0%	0	9.0%	1	6.0%
Layanan Perkantoran	13,118,903	12,639,782	93.46%	1	1	100%	0	79.0%	0	9.0%	0	10.0%	1	2.0%
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
Layanan Sarana Internal	621,000	238,374	94.20%	37	18	100%	16	77.0%	0	9.0%	0	10.0%	2	4.0%
EBC Layanan Manajemen SDM Internal														
Layanan Pendidikan dan Pelatihan	532,806	371,686	75.27%	52	70	100%	49	85.0%	0	6.0%	2	8.0%	19	1.0%
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal														
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	87,370	-	0.00%	1	1	100%	0	73.5%	0	9.0%	0	9.0%	1	8.5%
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	71,110	-	0.00%	1	1	100%	0	73.5%	0	9.0%	0	9.0%	1	8.5%
Layanan Manajemen Keuangan	75,500	-	0.00%	2	2	100%	1	88.0%	0	9.0%	0	2.0%	1	1.0%
Layanan Reformasi Kinerja	25,100	25,100	100.00%	1	1	100%	0	79.0%	0	12.0%	0	8.0%	1	1.0%
Layanan Penyelenggara -an Kearsipan	1,100	1,100	100.00%	1	1	100%	0	75.5%	0	19.0%	0	4.0%	1	1.5%
Total WA	14.682.889	13.426.042	92.84%											

1) Hasil yang dicapai dan Analisis capaian kinerja

Pada kegiatan ini terdapat terdapat 4 (empat) Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) yang terdiri dari:

a. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Pada KRO ini terdiri dari RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi serta RO Layanan Perkantoran. Pada Triwulan IV, pada RO Layanan Hubungan Masyarakat sudah terdapat realisasi melalui pembelian barang persediaan dan belanja ekstrakomptabel serta pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi. Sementara pada RO Layanan Perkantoran telah menunjukkan realisasi yang baik. Adapun Layanan Perkantoran meliputi pelaksanaan pembayaran gaji serta pemenuhan kebutuhan operasional balai, yang sepanjang triwulan telah berjalan dengan baik dan sesuai jadwal rutin sehingga tidak mengganggu operasional sehari-hari.

b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Pada KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal selama triwulan ini sudah menunjukkan adanya realisasi, meskipun pada KRO ini jumlah anggaran yang diblokir cukup besar. Realisasi dari KRO ini meliputi pengadaan alat pengolah data seperti *Personal Computer* serta peralatan perkantoran dan mebelair.

c. Layanan Manajemen SDM Internal

Realisasi Layanan Manajemen SDM Internal diperoleh melalui pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai dan *In House Training* yang dilaksanakan sepanjang triwulan ini. Adapun blokir Kegiatan Peningkatan Potensi SDM telah dibuka sebagian, namun dana tersebut direvisi untuk menambah kebutuhan belanja di kegiatan Peningkatan Kompetensi dan *In House Training*.

d. Layanan Manajemen Kinerja Internal

Pada KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal terdiri dari RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Reformasi Kinerja, dan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan. Adapun RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan Layanan Manajemen Keuangan seluruh pagu belanjanya diblokir. Selanjutnya, untuk RO Layanan Reformasi Kinerja dan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan telah terealisasi seluruhnya.

2) Kendala

Pada triwulan ini, realisasi keuangan dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri mencapai 92,84% namun belum memenuhi target keuangan dari BSPJI sebesar 93,50%. RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi dan Layanan Pendidikan dan Pelatihan belum menunjukkan capaian realisasi keuangan yang sesuai dengan target

BSKJI. Sementara pada KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal secara umum tidak dapat terealisasi akibat hampir seluruh anggaran diblokir. Kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan pada triwulan ini secara garis besar sama seperti pada kegiatan sebelumnya, yakni terkait adanya efisiensi belanja serta lambatnya progres penerimaan PNBP. Namun, dikarenakan kegiatan yang ada merupakan kegiatan rutin yang memang harus direalisasikan seperti pembayaran gaji dan honor, pembayaran langganan daya dan jasa, serta pemenuhan kebutuhan operasional balai, maka realisasi keuangan pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri lebih baik daripada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri.

3) Rekomendasi

Rencana perbaikan kedepannya adalah melakukan perhitungan proyeksi penerimaan bulanan dan perencanaan pemanfaatan saldo BLU untuk mengakomodasi pelaksanaan kegiatan prioritas. Hal ini dilakukan agar meskipun penerimaan belum sesuai target bulanan, namun kegiatan masih tetap dapat dilaksanakan. Adapun saldo yang telah digunakan dapat diganti dengan penerimaan yang biasanya diterima diakhir tahun.

3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Hambatan dan kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan Perjanjian Kinerja diantaranya adalah:

- Pada indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* dan *Nilai Net Promoter Score (NPS)* terdapat kendala dimana pelaksanaan survei pada beberapa layanan jasa masih menggunakan metode konvensional sehingga tingkat partisipasi responden belum mencakup semua pengguna jasa.
- Pada indikator *Jumlah Perusahaan Industri yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri*, *Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*, dan *Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri* ditemukan kendala dimana terdapat beberapa layanan seperti pemeriksaan halal, pelatihan, konsultasi, verifikasi TKDN, dan layanan penggunaan aset yang permintaannya masih sangat sedikit. Selain itu, pada layanan jasa konsultasi, pendampingan, pembimbingan dan verifikasi masih didominasi oleh industri kecil yang mendapatkan fasilitasi dari pemerintah. Selanjutnya, strategi penambahan pelanggan baru melalui rencana penambahan lingkup layanan yang dibutuhkan pelanggan seperti layanan kalibrasi dan pengujian aneka komoditi belum bisa sepenuhnya dilakukan dikarenakan keterbatasan sumber daya terutama peralatan pendukung.

- Pada indikator *Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)* ditemukan beberapa kendala pada layanan pengujian dan kalibrasi seperti keterbatasan jumlah peralatan *sampling* dan laboratorium, serta adanya perbedaan tahapan pengujian berdasarkan karakteristik sampel.
- Pada indikator *Indeks Profesionalitas ASN* kendala yang dihadapi adalah ketersediaan anggaran yang terbatas sehingga mengakibatkan perlu dilakukan seleksi terhadap pengajuan kegiatan pelatihan/ pengembangan kompetensi.
- Pada indikator *Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI* ditemukan kendala dimana integrasi data teknis cukup Kompleks sehingga butuh dilakukan penginputan dan penyesuaian data kembali pada sistem.
- Pada indikator *Tingkat Penerapan SPBE* kendala yang terjadi lebih kepada kurangnya pemahaman sumber daya tim teknis dalam memenuhi data dukung dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pada indikator *Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)* terdapat kendala dimana pelaksanaan anggaran juga belum dapat berjalan maksimal dikarenakan penerimaan PNBPN yang belum sesuai dengan target sehingga mempengaruhi realisasi belanja pada masing-masing kegiatan.

3.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kegiatan

Hambatan dan Kendala pada Pelaksanaan Kegiatan pada Triwulan IV 2025 secara garis besar terkait dengan penerimaan PNBPN yang belum sesuai dengan target yang diharapkan. Sepanjang triwulan IV telah dilakukan layanan jasa seperti *sampling*, namun untuk pembayaran tidak langsung dilakukan sehingga penerimaan PNBPN menjadi piutang yang tidak dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Pembayaran atas piutang juga baru dilakukan diakhir tahun sehingga tidak cukup waktu untuk menggunakan penerimaan yang telah diperoleh. Selain itu, proses pengembangan layanan dan penambahan ruang lingkup juga membutuhkan proses yang lebih lama sehingga layanan baru yang diharapkan dapat mendorong penerimaan PNBPN, tidak dapat memberikan kontribusi sampai dengan triwulan ini.

3.3. Langkah Tindak Lanjut

3.3.1 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Langkah dan tindak lanjut atas kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan Perjanjian Kinerja diantaranya adalah:

- Pada indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* dan *Nilai Net Promoter Score (NPS)* diupayakan untuk pengembangan survei terhadap seluruh jenis pelayanan melalui sistem

informasi serta dilakukan sosialisasi pentingnya survei kepuasan masyarakat melalui sosial media, serta himbauan langsung kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi dan jumlah responden. Selain itu, juga dilakukan pendekatan secara langsung kepada responden yang memberikan nilai terendah untuk mendapatkan informasi terkait kendala yang dihadapi.

- Pada indikator *Jumlah Perusahaan Industri yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri, Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri* akan dilakukan promosi (*bundling service*) dan koordinasi di beberapa industri/pelaku usaha dan Dinas Kota/Kabupaten terkait layanan yang potensial untuk digunakan industri/pelaku usaha dengan memanfaatkan media digital, booklet layanan, dan testimoni pengguna jasa untuk meningkatkan *awareness* pelanggan, serta peningkatan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dan *stakeholder* terkait.
- Pada indikator *Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)* diperlukan perencanaan dalam proses pengujian, pengadaan peralatan, bahan kimia, bahan pendukung pengujian, perencanaan penjadwalan sampling serta perencanaan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan sehingga kegiatan layanan dapat berjalan dengan lancar.
- Pada indikator *Indeks Profesionalitas ASN* untuk menindaklanjuti kondisi keterbatasan anggaran pada pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, maka setiap pegawai diarahkan untuk dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara online yang dapat diikuti secara gratis.
- Pada indikator *Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI* Perlu dilakukan optimalisasi dua layanan yang terintegrasi dengan melakukan uji coba berkelanjutan terhadap layanan pengujian dan kalibrasi pada sistem integrasi untuk memastikan alur data berjalan konsisten dan dapat direplikasi pada layanan lainnya
- Pada indikator *Tingkat Penerapan SPBE* akan dilakukan koordinasi dengan Pusdatin Kemenperin untuk diberikan penjelasan lebih lanjut dalam rangka pemenuhan kertas kerja SPBE yang belum dapat dilaksanakan
- Pada indikator *Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)* perlu dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran agar sebisa mungkin dapat mengikuti perencanaan (RPD) sehingga dapat mempertahankan nilai “Deviasi Hal. III DIPA” yang tidak terlalu besar deviasinya.

3.3.2 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan

Rencana perbaikan selanjutnya adalah mengupayakan perencanaan yang matang serta strategis di awal triwulan serta melakukan monitoring yang lebih baik terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga pencapaian kinerja baik fisik maupun keuangan dapat terealisasi sesuai dengan perencanaan pada setiap triwulan. Selanjutnya, terkait dengan penerimaan PNBPN yang belum sesuai dengan target, kedepannya akan tetap dilakukan kegiatan promosi melalui *direct marketing* ke perusahaan-perusahaan serta mengikuti lelang/tender pengujian lingkungan. Selain itu, akan dirumuskan strategi penawaran harga berupa diskon 15-20% untuk menarik pelanggan. Kemudian, akan dilakukan penugasan kepada personel khusus agar fokus untuk melakukan penagihan piutang ke perusahaan yang telah dilayani.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Realisasi Kegiatan

Capaian Kinerja triwulan IV menunjukkan progres realisasi fisik dari pemenuhan target Perjakin mencapai 100,00%. Selain itu, persentase realisasi keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI berbasis SP2D terhadap pagu efektif sebesar 91,31%, sementara realisasi keuangan berdasarkan Sistem Informasi Keuangan Intranew berbasis SP2P terhadap pagu efektif sebesar 91,31%, sementara persentase realisasi keuangan berdasarkan Ompsas terhadap pagu total sebesar 80.34%. Adapun capaian realisasi fisik tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan BSKJI yakni sebesar 100,00%, sementara untuk capaian realisasi keuangan belum sesuai dengan target yang ditetapkan BSKJI yakni sebesar 93,50%.

Selama periode Triwulan IV ini, untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan melalui efisiensi anggaran, juga telah dilakukan telah dilakukan 1 kali revisi DIPA kewenangan DJA, 1 kali revisi DIPA kewenangan Kanwil, dan 4 kali revisi DIPA kewenangan KPA. Selanjutnya, sampai akhir triwulan ini dari 18 (delapan belas) indikator kinerja yang ada, terdapat 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang telah mendapatkan hasil capaian dengan rata-rata capaian sebesar 168,74%, yakni:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri
3. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)
4. Nilai Net Promoter Score (NPS)
5. Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
6. Jumlah hasil layanan jasa industri
7. Nilai Revenue on Asset (RoA)
8. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)
9. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)
10. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI
11. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
12. Indeks Pelayanan Publik (IPP)
13. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker
14. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker
15. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
16. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan
17. Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktifitas Industri

Sementara untuk indikator *Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)* belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kinerja per Kegiatan pada triwulan ini, terdapat beberapa KRO telah mencapai target realisasi fisik meskipun adanya keterbatasan anggaran, namun untuk target keuangan belum dapat mencapai target ditetapkan oleh BSKJI. Pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri realisasi keuangan masih mencapai nilai 86,51% dan pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri hanya mencapai 92,84% (Aplikasi SAKTI berbasis SP2D terhadap Pagu Efektif).

4.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Adapun kendala utama yang menghambat pelaksanaan kinerja keuangan maupun fisik sampai triwulan ini adalah belum tercapainya target penerimaan PNB, dimana capaian penerimaan PNB masih sebesar Rp. 6.781.819.885 dari target penerimaan pada DIPA yang senilai Rp. 9,359,130,000. Hal ini mempengaruhi realisasi belanja pada kegiatan-kegiatan yang memiliki sumber dana dari PNB/BLU. Selain itu, kondisi sumber penerimaan yang masih didominasi oleh Layanan Pengujian, sementara Layanan Pendampingan/Pelatihan, Sertifikasi Produk, dan Pemeriksaan Halal belum memberikan kontribusi yang baik bagi capaian Penerimaan PNB BSPJI Samarinda.

4.3. Saran dan Tindak Lanjut

Rencana perbaikan selanjutnya adalah perlu dilakukan optimalisasi aktifitas yang mendukung pencapaian target keuangan dan layanan jasa yang sebelumnya tertunda dan tidak tercapai. Selain itu, terkait dengan penerimaan PNB perlu diupayakan penagihan terhadap pekerjaan kontraktual yang telah selesai dikerjakan agar dapat dibayarkan sebelum tahun 2025 berakhir sehingga PNB yang diperoleh dapat digunakan untuk mengejar target realisasi keuangan. Kemudian, pada Layanan Pelatihan yang dianggap potensial untuk mendatangkan pelanggan dan PNB, direncanakan untuk menambah judul pelatihan yang dapat diselenggarakan. Selanjutnya, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang lebih baik antar tim kerja untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pencapaiannya membutuhkan peran dari masing-masing tim kerja.

Demikian laporan triwulan IV tahun 2025 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda. Semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi Badan standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, maupun pihak terkait.

LAMPIRAN

REALISASI RENCANA AKSI SAMPAI TRIWULAN IV TA. 2025
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan IV						Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana		Realisasi					
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9		10		11	12	13	14
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,66	Indeks	3,85	105,19%	100%	100%	B10	a) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	B10	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA. b)Pemantauan pengaduan pelanggan	- Pelaksanaan survei yang masih menggunakan metode konvensional pada beberapa layanan jasa - Adanya keterbatasan petugas dalam memonitoring pengguna jasa yang sudah maupun yang belum mengisi survei - Kurangnya pengetahuan responden akan pentingnya dilakukan survei kepuasan masyarakat - Beberapa responden memberikan penilaian survei kurang baik karena hasil uji sample pada layanan pengujian tidak sesuai harapan pengguna jasa.	- Evaluasi Responden dengan Nilai di Bawah Target - Perbaikan pada Unsur dengan Nilai Terendah - Pendekatan kepada Responden dengan Nilai Terendah - Pengembangan Sistem Survei pada SIL - Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Responden	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	-
										B11	a) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	B11	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA. b)Pemantauan pengaduan pelanggan				
										B12	a) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	B12	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA. b)Pemantauan pengaduan pelanggan c) Melakukan analisis hasil survey kepuasan pelanggan kepada responden yang memberi nilai di bawah 3,66				
		TJ.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	210	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	358	170,48%	100%	100%	B10	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada	B10	) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultansi industri. b) Pengajuan peningkatan kualifikasi dan penambahan ruang lingkup Lembaga Pemeriksa Halal c) Persiapan dokumen	- Adanya penghematan anggaran pemerintah khususnya pada Dinas Kota/Kabupaten - Penambahan lingkup layanan belum bisa sepenuhnya dilakukan dikarenakan keterbatasan sumber	- Pelaksanaan promosi dan koordinasi di beberapa industri/pelaku usaha dan Dinas Kota/Kabupaten terkait layanan yang potensial untuk digunakan industri/pelaku	Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi, Tim Kerja Standardisasi dan Sertifikasi, dan Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan	-

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan IV				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
								% Fisik		Kegiatan					
								Target Antara	Realisasi	Rencana					
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Pembinaan SDM Industri	teknis untuk parameter yang akan diakreditasi d) Monitoring jumlah perusahaan industri pada layanan SILABISA e) Pengelolaan Database Industri potensial guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan serta memberikan inovasi program promosi penawaran harga	daya terutama peralatan pendukung. - Layanan lain (kalibrasi, sertifikasi produk, pelatihan, konsultasi, dll.) belum dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna jasa - Hasil dari upaya pengembangan seperti pembuatan sistem penawaran harga melalui aplikasi SILABISA dan update booklet belum terlihat signifikan pada layanan selain pengujian	- Melakukan kajian terhadap lingkup layanan yang akan dikembangkan dengan menyesuaikan sumber daya yang ada. - Melakukan diversifikasi layanan dengan melakukan sosialisasi dan promosi khusus untuk layanan non-pengujian serta membuat paket layanan terpadu (bundling service) agar industri terdorong memanfaatkan lebih dari satu jenis layanan. - Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur peningkatan pemanfaatan layanan non-pengujian serta menggunakan hasil survei kepuasan pelanggan sebagai dasar perbaikan kualitas dan penyesuaian strategi promosi	Teknologi Industri, Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	
										B11 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Verifikasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk	B11 a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Pengajuan peningkatan kualifikasi dan penambahan ruang lingkup Lembaga Pemeriksa Halal c) Persiapan dokumen teknis untuk parameter yang akan diakreditasi d) Monitoring jumlah perusahaan industri pada layanan SILABISA e) Pengelolaan Database Industri potensial guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan serta memberikan inovasi program promosi penawaran harga				

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan IV				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
								% Fisik		Kegiatan					
								Target Antara	Realisasi	Rencana					
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										B12 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Verifikasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk	B12 a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Pengajuan peningkatan kualifikasi dan penambahan ruang lingkup Lembaga Pemeriksa Halal c) Persiapan dokumen teknis untuk parameter yang akan diakreditasi d) Monitoring jumlah perusahaan industri pada layanan SILABISA e) Pengelolaan Database Industri potensial guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan serta memberikan inovasi program promosi penawaran harga				
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	SK.1.1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	86,00	Persen	96,96	112,74%	100%	100%	B10 a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	B10 Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak pada aplikasi silabisa, melakukan pengembangan parameter aneka komoditi diluar lingkup serta layanan kalibrasi	- Keterbatasan jumlah peralatan pengambilan contoh serta kalibrasi dapat berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan sampling - Waktu penyelesaian terhadap beberapa jenis sampel dengan karakteristik yang berbeda belum dipisahkan dengan jelas seperti sampel air dan aneka komoditi	Diperlukan Kerjasama dari semua pihak pencapaian target penyelesaian layanan jasa teknis sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan. Diperlukan juga perencanaan dalam pengadaan peralatan, bahan kimia, bahan pendukung pengujian,perencanaan penjadwalan sampling serta perencanaan kalibrasi dan	Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi, Tim Kerja Standardisasi dan Sertifikasi, dan Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	-
										B11 a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring	B11 Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak pada aplikasi silabisa.				

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan IV				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi	
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
										capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	melakukan pengembangan parameter aneka komoditi diluar lingkup serta layanan kalibrasi	dengan rangkaian pengujian yang memiliki tahapan yang panjang - Modernisasi peralatan laboratorium baik untuk peralatan pendukung proses maupun proses belum sepenuhnya dilakukan - Terbatasnya sumber daya untuk melakukan pengujian dan kalibrasi parameter diluar lingkup yang sudah diuji - Pasokan listrik dari PLN ke laboratorium kurang stabil (sehingga pengoperasian alat menjadi tidak optimal	pemeliharaan peralatan sehingga kegiatan layanan dapat berjalan dengan lancar				
										B12	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan					B12	Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak pada aplikasi silabisa, melakukan pengembangan parameter aneka komoditi diluar lingkup serta layanan kalibrasi
										B10	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial					B10	a) Melakukan promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial b) Melakukan Survey Net Promoter Score
										B11	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial					B11	a) Melakukan promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial b) Melakukan Survey Net Promoter Score
				SK.1.2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	6,00	Nilai	60,58	1009,67%	100%	100%			Pelaksanaan survey Net Promotore Score masih dilakukan secara manual menggunakan media WhatsApp sehingga responden memberikan jawaban secara sukarela, sehingga jumlah responden belum maksimal sesuai dengan jumlah	Pelaksanaan survei dapat dilakukan menggunakan sistem survei melalui aplikasi SILABISA	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	-

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan IV				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
								% Fisik		Kegiatan					
								Target Antara	Realisasi	Rencana					
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										B12 Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	B12 a) Melakukan promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial b) Melakukan Survey Net Promoter Score	pengguna jasa yang dilayani			
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	SK.2.1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2,00	Indeks	1,00	50,00%	100%	100%	B10 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA	B10 a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Melakukan monitoring dan evaluasi jumlah PNBP c) Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi d) Melakukan inventarisasi dan evaluasi kontrak kerjasama serta memberikan penawaran harga dan evaluasi jumlah penawaran yang menjadi order	- Distribusi pendapatan yang belum merata antar layanan - Jumlah penawaran yang terealisasi menjadi order belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan pendapatan PNBP - Penerimaan PNBP pada layanan utama selain jasa pengujian seperti kalibrasi, sertifikasi, pemeriksa	- Melakukan monitoring dan evaluasi capaian pendapatan PNBP secara berkala setiap bulan untuk memastikan progres realisasi PNBP sesuai dengan target. - Melakukan pendekatan lebih aktif kepada calon pelanggan potensial berdasarkan penawaran yang sudah diberikan agar dapat direalisasikan menjadi order serta melakukan evaluasi terhadap penawaran yang tidak menjadi order. - Melakukan peningkatan promosi layanan Jasa Lainnya selain layanan jasa pengujian melalui kunjungan, audiensi serta promosi melalui sosial media	Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi, Tim Kerja Standardisasi dan Sertifikasi, dan Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	-
										B11 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA	B11 a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Melakukan monitoring dan evaluasi jumlah PNBP c) Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi d) Melakukan inventarisasi dan evaluasi kontrak kerjasama serta memberikan penawaran harga dan evaluasi jumlah	halal pelatihan, verifikasi TKDN, masih menunjukkan kontribusi minim terhadap total pendapatan			

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan IV				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
							% Fisik		Kegiatan					
							Target Antara	Realisasi	Rencana					
1	2	3		4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan IV				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi						
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
										c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	stakeholder melalui kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan d) Promosi sosial media	dengan layanan BSPJI Samarinda serta keterbatasan waktu dan sumber daya manusia - Ketercapaian layanan belum merata pada semua jenis jasa	memperluas jangkauan promosi, baik secara daring melalui media sosial maupun luring melalui audiensi langsung dengan industri potensial - Melakukan peningkatan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dan stakeholder dalam rangka pengembangan kapasitas dan kemampuan pelayanan jasa kepada pelanggan				
										B12	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA					B12	a) Melakukan monitoring jumlah layanan pada aplikasi SILABISA b) Melakukan penambahan dan perluasan ruang lingkup layanan c) Koordinasi dengan stakeholder melalui kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan d) Promosi sosial media
		SK.2.3	Nilai Revenue on Asset (RoA)	8,10	Persen	17,07	210,74%	100%	100%	B10	a) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL b) Lanjutan Pengadaan Mebelair dan Inventaris Kantor Lainnya	B10	a) Telah disampaikan laporan pengelolaan pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan BMN Bulan September tahun 2025 kepada KPKNL. b) Telah dilakukan survei penyedia untuk pengadaan meubelair dan inventaris kantor lainnya.	Tidak ada kendala	-	Subbag Tata Usaha	-
										B11	a) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL b) Penyelesaian To Do List Triwulan III	B11	a) Telah disampaikan laporan pengelolaan pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan BMN Bulan Oktober tahun 2025 kepada KPKNL. b) Telah dilakukan penyelesaian to do list pada				

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan IV				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi	
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
											panatausahaan BMN triwulan III tahun 2025						
										B12	a) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL b) Pengusulan PSP untuk pengadaan belanja modal Semester 2 c) Perhitungan dan Evaluasi capaian nilai ROA d) Penyelesaian To Do List Triwulan III					B12	a) Telah disampaikan laporan pengelolaan pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan BMN Bulan November tahun 2025 kepada KPKNL. b) Telah dilakukan inventarisasi data pengadaan BMN pada Semester 2 Tahun 2025 untuk dilakukan pengusulan PSP kepada Sekretaris Jenderal dan KPKNL. c) Telah dilakukan perhitungan RoA dan capaian nilai RoA pada BSPJI Samarinda pada akhir Desember Tahun 2025. d) Telah dilakukan penyelesaian to do list pada panatausahaan BMN triwulan III tahun 2025
		SK.2.4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	41,50	Persen	47,33	114,05%	100%	100%	B10	a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPU BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPU BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBPU BLU	B10	a) Penyampaian target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPU BLU ke PPK BLU pada tanggal 2 Oktober 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBPU BLU pada Minggu ke IV yaitu pada 30 Oktober 2025. c) Monitoring penagihan piutang	Tidak ada kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini	-	Subbag Tata Usaha	-
										B11	a) Membuat dan menyampaikan target	B11	a) Penyampaian target penerimaan dan				

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan IV				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
								% Fisik		Kegiatan					
								Target Antara	Realisasi	Rencana					
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										penerimaan dan penggunaan anggaran PNBP BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBP BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBP BLU	penggunaan anggaran PNBP BLU ke PPK BLU pada tanggal 3 November 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBP BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 26 November 2025. c) Monitoring penagihan piutang				
										B12 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBP BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBP BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBP BLU	B12 a) Penyampaian target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBP BLU ke PPK BLU pada tanggal 3 Desember 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBP BLU pada tanggal 15 dan 31 Desember 2025. c) Monitoring penagihan piutang				
4	Terwujudnya SDM yang profesional	SK.3.1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,30	Indeks	83,18	102,31%	100%	100%	B10 a) Evaluasi kebutuhan pelatihan dengan ketersediaan anggaran b) Revisi anggaran pengembangan kompetensi (bila diperlukan)	B10 Evaluasi kebutuhan pelatihan dengan ketersediaan anggaran	Ketersediaan anggaran yang terbatas mengakibatkan perlu dilakukan seleksi terhadap pengajuan kegiatan pelatihan/ pengembangan kompetensi dengan mempertimbangkan urgensi dari pelaksanaan kegiatan tersebut.	Setiap pegawai diarahkan untuk dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara online yang dapat diikuti secara gratis. Pada triwulan selanjutnya masih terdapat beberapa rencana kegiatan pengembangan kompetensi yang akan dilaksanakan seperti kegiatan team building	Subbag Tata Usaha	-
									B11 a) Update data pengembangan kompetensi pegawai pada Link yang dikeluarkan Biro OSDM b) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi terkait pengembangan layanan	B11 a) Update data pengembangan kompetensi pegawai pada Intranet Kementerian Perindustrian Menu SiPegi b) Pelaksanaan Workshop Penggunaan Aplikasi Coretax DJP pada Pelaporan SPT Tahunan pada tanggal 6					

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan IV				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi	
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9		10		11	12	13	14
												November 2025 dan diikuti seluruh pegawai		ataupun pelatihan internal bagi pegawai BSPJI Samarinda			
										B12	Evaluasi hasil penetapan nilai IP ASN Semester 2	B12	a) In House Training Refreshment Teori dan Perhitungan Estimasi Ketidakpastian Pengujian dan Laboratorium pada tanggal 22 – 23 Desember 2025 dan diikuti 20 orang peserta b) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan In House Training yang telah dilaksanakan sampai dengan Desember 2025 c) Penyampaian Sertifikat In House Training kepada peserta d) Rekapitulasi Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah diikuti masing-masing pegawai				
5	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	SK.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00	Persen	20,00	100,00%	100%	100%	B10	Melakukan pengujian pengembangan aplikasi SILABISA	B10	Melaksanakan proses integrasi SILABISA dengan SIPPT melalui pengembangan Modul API Client di SILABISA	Proses integrasi data pada aplikasi SIPPTBSKJI masih bergantung pada jasa pihak ketiga dan infrastruktur IT belum maksimal sehingga berpotensi menimbulkan kendala teknis, keterlambatan,	- Melakukan monitoring dan koordinasi intensif dengan BSKJI terkait standar data dan prosedur integrasi agar tidak terjadi pengulangan proses.	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	-
										B11	Melakukan Implementasi pengembangan aplikasi SILABISA	B11	Melaksanakan proses integrasi SILABISA dengan SIPPT melalui pengembangan Modul API Client di SILABISA				

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan IV				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi	
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9		10		11	12	13	14
										B12	Kegiatan selesai	B12	Melaksanakan proses integrasi SILABISA dengan SIPPT melalui pengembangan Modul API Client di SILABISA	serta keterbatasan fleksibilitas dalam pengembangan dan pengelolaan sistem			
		SK.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77,00	Persen	87,19	113,23%	100%	100%	B10	Membuat data dukung LKE SPBE	B10	a) Membuat dokumen reviu sesuai indikator Tata Kelola SPBE b) Membuat dokumen reviu sesuai indikator Manajemen SPBE c) Membuat dokumen reviu sesuai indikator Layanan SPBE d) Rapat Konsultasi Pembangunan SPBE e) Rapat pembahasan indikator Tingkat penerapan SPBE	Kurangny kemampuan SDM dalam memenuhi data dukung dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Koordinasi dengan Pusdatin Kemenperin untuk diberikan penjelasan lebih lanjut dalam rangka pemenuhan kertas kerja SPBE yang belum dapat dilaksanakan	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	-
										B11	Membuat data dukung LKE SPBE	B11	a) Membuat dokumen reviu sesuai indikator Tata Kelola SPBE b) Membuat dokumen reviu sesuai indikator Manajemen SPBE c) Membuat dokumen reviu sesuai indikator Layanan SPBE d) Rapat Konsultasi Pembangunan SPBE e) Rapat pembahasan indikator Tingkat penerapan SPBE				

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan IV				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
								% Fisik		Kegiatan					
								Target Antara	Realisasi	Rencana					
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										B12 Kegiatan selesai	B12 a) Memperbaiki dokumen reviu sesuai indikator Tata Kelola SPBE b) Memperbaiki dokumen reviu sesuai indikator Manajemen SPBE c) Memperbaiki dokumen reviu sesuai indikator Layanan SPBE.				
		SK.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,51	Indeks	4,73	104,88%	100%	100%	B10 a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	B10 a) Melakukan review dan evaluasi internal standar pelayanan dan penerapan sistem diskon layanan b) Pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan terhadap sarana serta prasarana layanan publik. c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update melalui sosmed resmi d) Melakukan perbaikan dan pngembangan sistem survey kepuasan melalui aplikasi SIL	- Pengembangan inovasi pelayanan sebagai salah satu aspek penilaian belum maksimal dan masih menjadi titik lemah yang perlu mendapat perhatian - Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana masih bersifat pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan, belum sampai pada peningkatan kualitas sarana/prasarana secara signifikan	Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan peningkatan dalam Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	-
									B11 a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	B11 a) Menyediakan sistem informasi layanan berupa booklet dan flayer layanan di ruang konsultasi dan front office. b) Diklat SDM Kehumasan sebagai penguatan kompetensi peningkatan kualitas pelayanan publik c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update pada media sosial resmi.					

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan IV				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi	
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9		10		11	12	13	14

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan IV						Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana		Realisasi					
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9		10		11	12	13	14
											penerapan SRIKANDI b) Melaksanakan penyimpanan arsip aktif		Klasifikasi dan Jadwal Retensi Arsip				
										B12	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Membuat daftar arsip kegiatan per 6 bulan (Juli-Desember) c) Melaksanakan Pemindahan arsip dari unit pengolah berdasarkan Jadwal Retensi Arsip mewakili fungsi satker d) Membuat berita acara pemindahan arsip	B12	Melakukan Penyeleksian arsip bernilai guna dan membuat daftar arsip usul serah berdasarkan Jadwal Retensi Arsip				
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	SK.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	80,50	Nilai	85,40	106,09%	100%	100%	B10	a) Penyusunan Laporan PP 39 TW 3 b) Penyusunan RBA Indikatif TA.2027	B10	a) Penyusunan Laporan PP 39 TW 3 b) Penyusunan RBA Definitif TA. 2026 dan RBA Indikatif TA.2027	Dalam pemenuhan dokumen untuk penilaian SAKIP telah diupayakan dengan maksimal	-	Subbag Tata Usaha	-
										B11	a) Penyusunan TRPNBP TA. 2027 b) Rapat Monev TW 4	B11	a) Penyusunan TRPNBP TA. 2027 b) Rapat Monev TW 4				
										B12	a) Penyusunan Renja TA. 2026 b) Pelaporan Monev BAPPENAS c) Penyusunan Laporan PP 39 TW 4	B12	a) Penyusunan Renja TA. 2026 b) Pelaporan Monev BAPPENAS c) Penyusunan Laporan PP 39 TW 4				

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan IV				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi	
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9		10		11	12	13	14
		SK.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,18	Nilai	95,46	101,36%	100%	100%	B10	a) Pelaporan CAPUT September b) Revisi DIPA TW 4 Pemutakhiran RPD (maks 10 Oktober) c) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Oktober d) Pengajuan GUP Oktober	B10	a) Pelaporan Caput September 2025 dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2025 b) Pengajuan Usulan Revisi Pemutakhiran Hal III dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2025 dan disahkan melalui DIPA ke 16 tanggal 13 Oktober 2025 c) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBPN BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 30 Oktober 2025	Pelaksanaan anggaran juga belum dapat berjalan maksimal dikarenakan penerimaan PNBPN yang belum sesuai dengan target sehingga mempengaruhi realisasi belanja serta berdampak pada pencapaian aspek “Deviasi Hal. III DIPA” dan “Penyerapan Anggaran”.	Dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran agar sebisa mungkin dapat mengikuti perencanaan (RPD) sehingga dapat mempertahankan nilai “Deviasi Hal. III DIPA” yang tidak terlalu besar deviasinya. Selain itu, aspek “Penyerapan Anggaran” juga perlu diperhatikan agar dapat lebih dimaksimalkan melalui penggunaan saldo BLU sambil menunggu penerimaan PNBPN setiap periodenya	Subbag Tata Usaha	-
								B11	a) Pelaporan CAPUT Oktober b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja November b) Pengajuan TUP d) Pengajuan GUP November	B11	a) Pelaporan Caput Oktober 2025 dilakukan pada tanggal 4 November 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBPN BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 26 November 2025						
									B12	a) Pelaporan CAPUT November b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Desember c) GUP/TUP Nihil d) Monev Penyerapan Anggaran TW 4	B12	a) Pelaporan Caput November 2025 dilakukan pada tanggal 4 Desember 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBPN BLU pada tanggal 15 dan 31 Desember 2025 c) Pengajuan TUP pada tanggal 4 Desember 2025 dan pengajuan GUP Nihil pada tanggal 22 Desember 2025					

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan IV				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi	
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9		10		11	12	13	14
		SK.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75,00	Nilai	92,00	122,67%	100%	100%	B10	a) Monev capaian realisasi anggaran dan kegiatan Triwulan IV	B10	a) Monev tanggal 3 Oktober 2025 b) Melakukan tutup buku pada aplikasi Sakti utuk periode oktober c) Penyampaian rekonsiliasi triwulan III ke KPPN dan Kanwil d) Pengajuan Penetapan Status Penggunaan (PSP) untuk pengadaan semester 1 2025	Tidak ada kendala	-	Subbag Tata Usaha	-
										B11	a) Update data persediaan dan penyusunan laporan	B11	a) Melakukan tutup buku pada aplikasi Sakti utuk periode November				
										B12	a) Penyelesaian pelaporan keuangan bendahara (GU, Pengesahan, LPJ, dll)	B12	a) Melakukan tutup buku pada aplikasi Sakti utuk periode desember b) Pengajuan TUP pada tanggal 4 Desember 2025 dan pengajuan GUP Nihil pada tanggal 22 Desember 2025				
8	Terwujudnya SDM yang profesional	SK.7.1	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	80,00	Persen	87,62	109,53%	100%	100%	B10	Penyampaian laporan reviu pengadaan barang/ jasa Triwulan III & IV 2025	B10	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di bulan Oktober	Tidak ada kendala	Peninjauan terhadap tingkat pencapaian penggunaan produk dalam negeri, mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi selama proses pengadaan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program P3DN ke	Subbag Tata Usaha	-
										B11	Evaluasi capaian penggunaan TKD pada pengadaan barang/ jasa Semester II TA. 2025	B11	a) Evaluasi data pengadaan barang/jasa pada Semester II TA 2025 untuk mengetahui tingkat pemenuhan dan persentase penggunaan TKDN. b) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di bulan November				
										B12	Evaluasi penyelesaian pengadaan barang/ jasa	B12	a) Evaluasi penyelesaian paket pengadaan untuk memastikan kesesuaian				

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan IV				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
							% Fisik		Kegiatan							
							Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi	
1	2	3		4,00	5	6	7	8	9		10		11	12	13	14
											pelaksanaan dengan perencanaan, ketepatan waktu, kepatuhan, serta kelengkapan administrasi b) Pelaksaaan pengadaan barang dan jasa di bulan Desember		depan, termasuk optimalisasi pemanfaatan e-Katalog, peningkatan kapasitas penyedia lokal, dan penyusunan strategi pengadaan yang mendukung peningkatan nilai TKDN secara berkelanjutan			
Rata-rata						168,74%	100%	100,00%								

**TABEL MONITORING RINCIAN OUTPUT JANUARI-DESEMBER 2025
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA**

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Pagu Efektif	% Realisasi Keuangan s/d Sep	TVRO	RVRO	Progres	sd. TW 3		Oktober		November		Desember	
											RVRO	Progres	RVRO	Progres	RVRO	Progres	RVRO	Progres
1	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	AEC Kerja sama	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	152,319	124,174	86.40%	5	5	100.0%	4	88.00%	0	9.0%	0	2.0%	1	1.0%
2			AEF Sosialisasi dan Diseminasi	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis	623,313	245,520	81.87%	500	549	100.0%	408	84.00%	48	9.0%	43	6.0%	50	1.0%
3			BAD Pelayanan Publik kepada industri	Jasa pelayanan teknis pengujian	1,704,016	1,704,016	95.75%	300	513	100.0%	281	86.70%	5	8.5%	12	3.0%	215	1.8%
4				Jasa pelayanan teknis kalibrasi	41,842	41,842	38.26%	29	19	100.0%	11	73.55%	2	10.5%	3	9.0%	3	7.0%
5				Jasa pelayanan teknis sertifikasi	460,317	370,755	90.11%	44	44	100.0%	15	70.50%	1	10.0%	18	10.0%	10	9.5%
6				Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri	179,050	179,050	98.58%	13	15	100.0%	11	85.00%	1	12.0%	0	2.0%	3	1.0%
7			BDI Fasilitas dan Pembinaan Industri	Pemanfaatan Teknologi Industri	297,148	297,148	85.16%	10	17	100.0%	9	90.10%	0	4.0%	0	1.0%	8	4.9%
8			CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/ layanan	2,007,500	1,341,592	74.84%	59	32	100.0%	29	74.50%	2	10.0%	0	12.0%	1	3.5%
			Total EC		5,465,505	4,304,097	86.51%											

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Pagu Efektif	% Realisasi Keuangan s/d Sep	TVRO	RVRO	Progres	sd. TW 3		Oktober		November		Desember	
											RVRO	Progres	RVRO	Progres	RVRO	Progres	RVRO	Progres
9	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	150,000	150,000	83.66%	1	1	100.0%	0	76.00%	0	9.0%	0	9.0%	1	6.0%
10				Layanan Perkantoran	13,118,903	12,639,782	93.46%	1	1	100.0%	0	79.00%	0	9.0%	0	10.0%	1	2.0%
11			EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	621,000	238,374	94.20%	37	18	100.0%	16	77.00%	0	9.0%	0	10.0%	2	4.0%
12				EBC Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	532,806	371,686	75.27%	52	70	100.0%	49	85.00%	0	6.0%	2	8.0%	19
13			EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	87,370	-	0.00%	1	1	100.0%	0	73.50%	0	9.0%	0	9.0%	1	8.5%
14				Layanan Pemantauan dan Evaluasi	71,110	-	0.00%	1	1	100.0%	0	73.50%	0	9.0%	0	9.0%	1	8.5%
15				Layanan Manajemen Keuangan	75,500	-	0.00%	2	2	100.0%	1	88.00%	0	9.0%	0	2.0%	1	1.0%
16				Layanan Reformasi Kinerja	25,100	25,100	100.00%	1	1	100.0%	0	79.00%	0	12.0%	0	8.0%	1	1.0%
17				Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1,100	1,100	100.00%	1	1	100.0%	0	75.50%	0	19.0%	0	4.0%	1	1.5%
Total WA					14,682,889	13,426,042	92.84%											
Total					20,148,394	17,730,139	91.31%											



Kementerian PPN/
Bappenas



TRIWULAN IV
2025

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN

#539081

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



REKAP PELAPORAN KOMPONEN

TRIWULAN IV (KUMULATIF)

Tahun : 2025
 K/L : 019 - KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
 UK. Eselon I : 07 - Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
6042.EBA.958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	1	0	150,000,000	125,488,358	83.66%							
1	051 Pengelolaan Data dan Informasi		1	1	150,000,000	125,488,358	83.66%	Selesai	Pengembangan SILABISA dan Belanja Persediaan/Ekstrakomtable	100.00	1 Layanan	Sudah	Anggaran	PNBP masih digunakan untuk memenuhi kegiatan yang lebih prioritas
6042.EBA.994 - Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	13,118,903,000	11,813,618,023	90.05%							
2	001 Gaji dan Tunjangan		1	1	8,709,981,000	8,612,745,623	98.88%	Selesai	Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan September	100.00	1 Layanan	Sudah	Anggaran	Belanja Pegawai tidak terserap 100%
3	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1	1	4,408,922,000	3,200,872,400	72.60%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan opsional balai	100.00	1 Layanan	Sudah	Anggaran	Penerimaan PNBP belum sesuai dengan target
6042.EBB.951 - Layanan Sarana Internal		Unit	37	16	621,000,000	220,230,333	35.46%							
4	053 Pengadaan peralatan inventaris perkantoran		37	28	278,200,000	126,222,328	45.37%	Selesai	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	100.00	28 Unit	Sudah	Anggaran	Ketersediaan Sumber Dana BLU dan Blokir Anggaran
5	052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		37	10	342,800,000	94,008,005	27.42%	Selesai	Proses menunggu tercapainya PNBP untuk pengadaan peralatan pengolah data	100.00	10 Unit	Sudah	Anggaran	Ketersediaan Sumber Dana BLU dan Blokir Anggaran
6042.EBC.996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan		Orang	52	51	532,806,000	279,780,537	52.51%							

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
6	051 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM		52	70	532,806,000	279,780,537	52.51%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah dilaksanakan	100.00	70 Orang	Sudah	Anggaran	Pemilihan Kegiatan Pengembangan Kompetensi lebih selektif mengingat capaian PNBP yang belum sesuai target dan adanya blokir anggaran
6042.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Dokumen	1	0	87,370,000	0	0.00%							
7	051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran		1	1	87,370,000	0	0.00%	Selesai	Pelaksanaan anggaran tahun 2025	100.00	1 Layanan	Sudah	Anggaran	Anggaran di Blokir
6042.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	1	0	71,110,000	0	0.00%							
8	051 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		1	1	71,110,000	0	0.00%	Selesai	Pelaksanaan Monev bulan Desember	100.00	1 Layanan	Sudah	Anggaran	Anggaran di Blokir
6042.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	2	1	75,500,000	0	0.00%							
9	051 Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan		2	1	75,500,000	0	0.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan terkait keuangan	100.00	1 Layanan	Sudah	Anggaran	Anggaran di Blokir
6042.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja		Dokumen	1	0	25,100,000	25,100,000	100.00%							
10	051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP		1	1	25,100,000	25,100,000	100.00%	Selesai	Pembayaran Honor Tim SPI	100.00	1 Dokumen	Sudah	Anggaran	Tidak ada permasalahan
6042.EBD.974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		Dokumen	1	0	1,100,000	1,100,000	100.00%							
11	051 Penyelenggaraan Kearsipan		1	1	1,100,000	1,100,000	100.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan terkait kearsipan	100.00	1 Dokumen	Sudah	Anggaran	Tidak ada permasalahan
6077.AEC.002 - Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis		Dokumen	5	4	152,319,000	107,280,992	70.43%							

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
12	051 Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	Dokumen	5	5	152,319,000	107,280,992	70.43%	Selesai	Penjajakan kerjasama ke Industri/Perusahaan	100.00	5 Dokumen	Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Penjadwalan kunjungan penjajakan kerjasama
6077.AEF.001 - Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis		orang	500	499	623,313,000	201,011,723	32.25%							
13	051 Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	Orang	500	549	623,313,000	201,011,723	32.25%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan promosi dan pemenuhan kebutuhan di Unit Pelayanan Publik	100.00	549 Orang	Sudah	Anggaran	Ketersediaan sumber dana BLU
6077.BAD.001 - Jasa pelayanan teknis pengujian		Industri	300	298	1,704,016,000	1,631,580,670	95.75%							
14	056 Pengembangan kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Pengujian dan ISO 9001	SMM	1	1	33,825,000	28,385,128	83.92%	Selesai	Pengembangan Ruang Lingkup pada Layanan Jasa Pengujian	100.00	1 SMM	Sudah	Waktu	Proses Akreditasi penambahan Ruang Lingkup Layanan Jasa Pengujian
15	051 Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	Industri	300	513	1,670,191,000	1,603,195,542	95.99%	Selesai	Pelaksanaan Layanan Jasa Pengujian	100.00	513 Industri	Sudah	Waktu	Pelaksanaan Layanan Jasa Pengujian
6077.BAD.024 - Jasa pelayanan teknis kalibrasi		Industri	29	16	41,842,000	16,009,000	38.26%							
16	052 Pengembangan kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Kalibrasi	SMM	1	1	9,460,000	0	0.00%	Selesai	Penyusunan Jadwal Pengembangan Ruang Lingkup Kalibrasi dengan Tim Akreditasi	100.00	1 SMM	Sudah	Waktu	Perencanaan Pengembangan Ruang Lingkup Kalibrasi
17	051 Terselenggaranya jasa pelayanan teknis kalibrasi	Industri	29	25	32,382,000	16,009,000	49.44%	Selesai	Pelaksanaan Layanan Jasa Kalibrasi	100.00	25 Industri	Sudah	Waktu	Pelaksanaan Layanan Jasa Kalibrasi
6077.BAD.036 - Jasa pelayanan teknis sertifikasi		Industri	44	34	460,317,000	334,087,458	72.58%							
18	051 Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	Industri	44	44	87,009,000	66,525,400	76.46%	Selesai	Pelaksanaan Layanan Jasa Sertifikasi	100.00	44 Industri	Sudah	Waktu	Pelaksanaan Layanan Jasa Sertifikasi

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
19	052 Pengembangan kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Sertifikasi Produk	SMM	1	1	373,308,000	267,562,058	71.67%	Selesai	Pengembangan Ruang Lingkup Layanan Jasa Sertifikasi	100.00	1 SMM	Sudah	Waktu	Pengembangan Ruang Lingkup Layanan Jasa Sertifikasi
6077.BAD.058 - Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri		Industri	13	12	179,050,000	176,515,315	98.58%							
20	051 Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	Industri	13	15	179,050,000	176,515,315	98.58%	Selesai	Pelaksanaan Layanan Jasa Bimbingan dan Pendampingan Industri	100.00	15 Industri	Sudah	Waktu	Pelaksanaan Layanan Jasa Bimbingan dan Pendampingan Industri
6077.BDI.006 - Pemanfaatan Teknologi Industri		Industri	10	9	297,148,000	253,047,716	85.16%							
21	051 Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri	Industri	10	17	297,148,000	253,047,716	85.16%	Selesai	Pelaksanaan Layanan Jasa Konsultansi	100.00	17 Industri	Sudah	Waktu	Pelaksanaan Layanan Jasa Konsultansi
6077.CAH.021 - Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan		Unit	59	31	2,007,500,000	1,004,050,500	50.01%							
22	051 Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	Unit Paket	59	29	2,007,500,000	1,004,050,500	50.01%	Selesai	Pengadaan peralatan Laboratorium	100.00	29 Unit	Sudah	Anggaran	Menunggu penerimaan PNB

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA



Achmad Taufik



Kementerian PPN/
Bappenas



2025

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas

TRIWULAN IV
2025



Kementerian PPN/
Bappenas



LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN



#539081

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

TRIWULAN IV (PARSIAL)

Tahun : 2025
 K/L : 019 - KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
 UK. Eselon I : 07 - Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
6042.EBA.958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	1	0	150,000,000	122,944,758	81.96%							
1	051 Pengelolaan Data dan Informasi		1	1	150,000,000	122,944,758	81.96%	Selesai	Pengembangan SILABISA dan Belanja Persediaan/Ekstrakomtable	100.00	1 Layanan	Sudah	Anggaran	PNBP masih digunakan untuk memenuhi kegiatan yang lebih prioritas
6042.EBA.994 - Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	13,118,903,000	2,433,631,896	18.55%							
2	001 Gaji dan Tunjangan		1	0	8,709,981,000	1,399,935,392	16.07%	Selesai	Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan September	100.00	1 Layanan	Sudah	Anggaran	Belanja Pegawai tidak terserap 100%
3	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1	0	4,408,922,000	1,033,696,504	23.45%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan opsional balai	100.00	1 Layanan	Sudah	Anggaran	Penerimaan PNBP belum sesuai dengan target
6042.EBB.951 - Layanan Sarana Internal		Unit	37	0	621,000,000	81,812,556	13.17%							
4	053 Pengadaan peralatan inventaris perkantoran		37	17	278,200,000	75,179,556	27.02%	Selesai	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	100.00	28 Unit	Sudah	Anggaran	Ketersediaan Sumber Dana BLU dan Blokir Anggaran
5	052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		37	5	342,800,000	6,633,000	1.93%	Selesai	Proses menunggu tercapainya PNBP untuk pengadaan peralatan pengolah data	100.00	10 Unit	Sudah	Anggaran	Ketersediaan Sumber Dana BLU dan Blokir Anggaran
6042.EBC.996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan		Orang	52	2	532,806,000	128,464,879	24.11%							

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
6	051 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM		52	21	532,806,000	128,464,879	24.11%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah dilaksanakan	100.00	70 Orang	Sudah	Anggaran	Pemilihan Kegiatan Pengembangan Kompetensi lebih selektif mengingat capaian PNBP yang belum sesuai target dan adanya blokir anggaran
6042.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Dokumen	1	0	87,370,000	0	0.00%							
7	051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran		1	1	87,370,000	0	0.00%	Selesai	Pelaksanaan anggaran tahun 2025	100.00	1 Layanan	Sudah	Anggaran	Anggaran di Blokir
6042.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	1	0	71,110,000	0	0.00%							
8	051 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		1	1	71,110,000	0	0.00%	Selesai	Pelaksanaan Monev bulan Desember	100.00	1 Layanan	Sudah	Anggaran	Anggaran di Blokir
6042.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	2	0	75,500,000	0	0.00%							
9	051 Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan		2	0	75,500,000	0	0.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan terkait keuangan	100.00	1 Layanan	Sudah	Anggaran	Anggaran di Blokir
6042.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja		Dokumen	1	0	25,100,000	18,900,000	75.30%							
10	051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP		1	0	25,100,000	18,900,000	75.30%	Selesai	Pembayaran Honor Tim SPI	100.00	1 Dokumen	Sudah	Anggaran	Tidak ada permasalahan
6042.EBD.974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		Dokumen	1	0	1,100,000	1,100,000	100.00%							
11	051 Penyelenggaraan Kearsipan		1	1	1,100,000	1,100,000	100.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan terkait kearsipan	100.00	1 Dokumen	Sudah	Anggaran	Tidak ada permasalahan
6077.AEC.002 - Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis		Dokumen	5	0	152,319,000	9,861,000	6.47%							

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
12	051 Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	Dokumen	5	1	152,319,000	9,861,000	6.47%	Selesai	Penjajakan kerjasama ke Industri/Perusahaan	100.00	5 Dokumen	Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Penjadwalan kunjungan penjajakan kerjasama
6077.AEF.001 - Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis		orang	500	91	623,313,000	107,207,784	17.20%							
13	051 Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	Orang	500	141	623,313,000	107,207,784	17.20%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan promosi dan pemenuhan kebutuhan di Unit Pelayanan Publik	100.00	549 Orang	Sudah	Anggaran	Ketersediaan sumber dana BLU
6077.BAD.001 - Jasa pelayanan teknis pengujian		Industri	300	17	1,704,016,000	591,321,349	34.70%							
14	056 Pengembangan kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Pengujian dan ISO 9001	SMM	1	0	33,825,000	2,510,000	7.42%	Selesai	Pengembangan Ruang Lingkup pada Layanan Jasa Pengujian	100.00	1 SMM	Sudah	Waktu	Proses Akreditasi penambahan Ruang Lingkup Layanan Jasa Pengujian
15	051 Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	Industri	300	232	1,670,191,000	588,811,349	35.25%	Selesai	Pelaksanaan Layanan Jasa Pengujian	100.00	513 Industri	Sudah	Waktu	Pelaksanaan Layanan Jasa Pengujian
6077.BAD.024 - Jasa pelayanan teknis kalibrasi		Industri	29	5	41,842,000	255,000	0.61%							
16	052 Pengembangan kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Kalibrasi	SMM	1	1	9,460,000	0	0.00%	Selesai	Penyusunan Jadwal Pengembangan Ruang Lingkup Kalibrasi dengan Tim Akreditasi	100.00	1 SMM	Sudah	Waktu	Perencanaan Pengembangan Ruang Lingkup Kalibrasi
17	051 Terselenggaranya jasa pelayanan teknis kalibrasi	Industri	29	14	32,382,000	255,000	0.79%	Selesai	Pelaksanaan Layanan Jasa Kalibrasi	100.00	25 Industri	Sudah	Waktu	Pelaksanaan Layanan Jasa Kalibrasi
6077.BAD.036 - Jasa pelayanan teknis sertifikasi		Industri	44	19	460,317,000	171,204,090	37.19%							
18	051 Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	Industri	44	29	87,009,000	36,220,000	41.63%	Selesai	Pelaksanaan Layanan Jasa Sertifikasi	100.00	44 Industri	Sudah	Waktu	Pelaksanaan Layanan Jasa Sertifikasi

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
19	052 Pengembangan kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Sertifikasi Produk	SMM	1	0	373,308,000	134,984,090	36.16%	Selesai	Pengembangan Ruang Lingkup Layanan Jasa Sertifikasi	100.00	1 SMM	Sudah	Waktu	Pengembangan Ruang Lingkup Layanan Jasa Sertifikasi
6077.BAD.058 - Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri		Industri	13	1	179,050,000	102,107,105	57.03%							
20	051 Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	Industri	13	4	179,050,000	102,107,105	57.03%	Selesai	Pelaksanaan Layanan Jasa Bimbingan dan Pendampingan Industri	100.00	15 Industri	Sudah	Waktu	Pelaksanaan Layanan Jasa Bimbingan dan Pendampingan Industri
6077.BDI.006 - Pemanfaatan Teknologi Industri		Industri	10	0	297,148,000	99,775,140	33.58%							
21	051 Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri	Industri	10	8	297,148,000	99,775,140	33.58%	Selesai	Pelaksanaan Layanan Jasa Konsultansi	100.00	17 Industri	Sudah	Waktu	Pelaksanaan Layanan Jasa Konsultansi
6077.CAH.021 - Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan		Unit	59	2	2,007,500,000	368,378,500	18.35%							
22	051 Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	Unit Paket	59	0	2,007,500,000	368,378,500	18.35%	Selesai	Pengadaan peralatan Laboratorium	100.00	29 Unit	Sudah	Anggaran	Menunggu penerimaan PNB

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA



Achmad Taufik



Kementerian PPN/
Bappenas



2025

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas